

Katalog: 2101038.16



  
Sensus  
Penduduk  
2020  
#MencatatIndonesia

# Analisis Profil Penduduk Provinsi Sumatera Selatan

Potret Demografi Sumatera Selatan



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Sensus  
Penduduk  
2020

#MencatatIndonesia

# Analisis Profil Penduduk Provinsi Sumatera Selatan

Potret Demografi Sumatera Selatan



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



# **Analisis Profil Penduduk Provinsi Sumatera Selatan**

## Potret Demografi Sumatera Selatan

ISBN :  
Nomor Publikasi : 16000.2215  
Katalog : 2101038.16

Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm  
Jumlah halaman : viii + 111 halaman

Naskah:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Gambar Kulit:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Diterbitkan Oleh:  
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dicetak Oleh:  
CV. ItemPuteh Creation

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggungjawab Umum:**

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.

### **Penanggungjawab Teknis:**

Tri Ratna Dewi, S.Si., M.M.

### **Penyunting:**

Eko Tris Darmanto, S.ST, M.Si

### **Penulis:**

Evi Rosiana, S.ST, M.Si

Desi Eryani, S.ST., M.Si.

Aditya Mangestika, S.ST

Lismiana, SE., M.Si

Financy Ramadhani, S.ST., M. EKK

M. Irfan Zulfahmi S.Tr.Stat

Roghibah Salsabila S.Tr.Stat.

### **Layout:**

Lismiana, S.ST, M.Si

### **Cover :**

Roghibah Salsabila S.Tr.Stat.





# Kata Pengantar

**B**adan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online pada bulan Mei 2020 dan telah melaksanakan SP2020 wawancara pada bulan September 2020. Cakupan data dasar dari hasil Sensus Penduduk 2020 adalah jumlah penduduk menurut jenis kelamin, wilayah administrasi, berikut parameter-parameter turunannya seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan laju pertumbuhan penduduk.

Publikasi Analisis Profil Penduduk Provinsi Sumatera Selatan merupakan output analisis dari hasil Sensus Penduduk 2020 yang menyajikan informasi terkait kependudukan diantaranya jumlah dan persebaran penduduk, perubahan struktur penduduk serta tantangan bonus demografi yang saat ini sedang dialami Sumatera Selatan. Selain itu publikasi ini juga memberikan gambaran kondisi penduduk Sumatera Selatan berdasarkan kelompok usia yang terbagi menjadi usia anak, usia produktif dan lansia.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan banyak pihak untuk berbagai kepentingan.

Palembang, 24 Juni 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera selatan



Zulkipli







# Daftar Isi

Halaman

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tim Penyusun .....                                                            | iii       |
| Kata Pengantar .....                                                          | v         |
| Daftar Isi .....                                                              | vii       |
| <b>1. Pendahuluan .....</b>                                                   | <b>3</b>  |
| A. Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Terbesar Kesembilan di Indonesia .....    | 3         |
| B. Antara Kuantitas dan Kualitas .....                                        | 10        |
| C. Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah .....                         | 15        |
| D. Sebaran Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota .....             | 20        |
| E. Perubahan Struktur Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan .....             | 23        |
| F. Implikasi Perubahan Struktur Penduduk Sumatera Selatan di Masa Depan ..... | 25        |
| G. Kesimpulan .....                                                           | 29        |
| <b>2. Profil Anak .....</b>                                                   | <b>31</b> |
| A. Anak dan Bonus Demografi .....                                             | 33        |
| B. Struktur Pendudukan dan Persebaran Anak di Indonesia .....                 | 36        |
| C. Pendidikan Anak .....                                                      | 40        |
| D. Kesehatan Anak .....                                                       | 47        |
| E. Pekerja Anak .....                                                         | 52        |
| F. Perkawinan Anak .....                                                      | 54        |
| G. Kesimpulan .....                                                           | 59        |
| <b>3. Profil Usia Produktif .....</b>                                         | <b>63</b> |
| A. Usia Produktif dan Pembangunan Sumatera Selatan .....                      | 65        |
| B. Bonus Demografi: Potensi dan Tantangannya .....                            | 65        |
| C. Profil Penduduk Usia Produktif di Sumatera Selatan .....                   | 68        |
| D. Kesimpulan .....                                                           | 80        |
| <b>4. Profil Penduduk Lanjut Usia .....</b>                                   | <b>83</b> |
| A. Lansia dan Bonus Demografi .....                                           | 85        |
| B. Lansia SMART, Tantangan dan Peluang .....                                  | 87        |
| C. Sebaran Lansia .....                                                       | 94        |
| D. Lansia dan Keluarga .....                                                  | 96        |
| E. Perlindungan Bagi Lansia .....                                             | 100       |
| F. Potensi Lansia di Masa Setelah Bonus Demografi .....                       | 107       |
| G. Kesimpulan .....                                                           | 110       |





1

# Pendahuluan

- A. Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Terbesar Kesembilan di Indonesia
- B. Antara Kuantitas dan Kualitas
- C. Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
- D. Sebaran Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota
- E. Perubahan Struktur Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan
- F. Implikasi Perubahan Struktur Penduduk Sumatera Selatan di Masa Depan
- G. Kesimpulan





# Pendahuluan

**K**eberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh dinamika kependudukan yang terjadi. Hal ini karena dalam pembangunan, peran penduduk (manusia) sangat urgen yaitu sebagai subjek maupun objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk adalah sumber daya yang menggerakkan roda pembangunan. Sedangkan sebagai objek, penduduk adalah individu yang perlu dibangun kualitasnya.

Sebegitu pentingnya peran penduduk dalam pembangunan sehingga pemahaman mengenai kondisi kependudukan yang terjadi, beserta dinamika perubahannya dari waktu ke waktu perlu difahami berbagai pihak. Dalam mencermati permasalahan kependudukan, tidak akan pernah lepas dari masalah kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi, dan struktur umur) serta kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, pekerjaan dll). Pengetahuan mengenai sejauh mana kuantitas dan kualitas penduduk merupakan modal penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat. Pengetahuan ini ibarat kompas yang bisa menunjukkan arah yang tepat untuk pembangunan di masa mendatang.

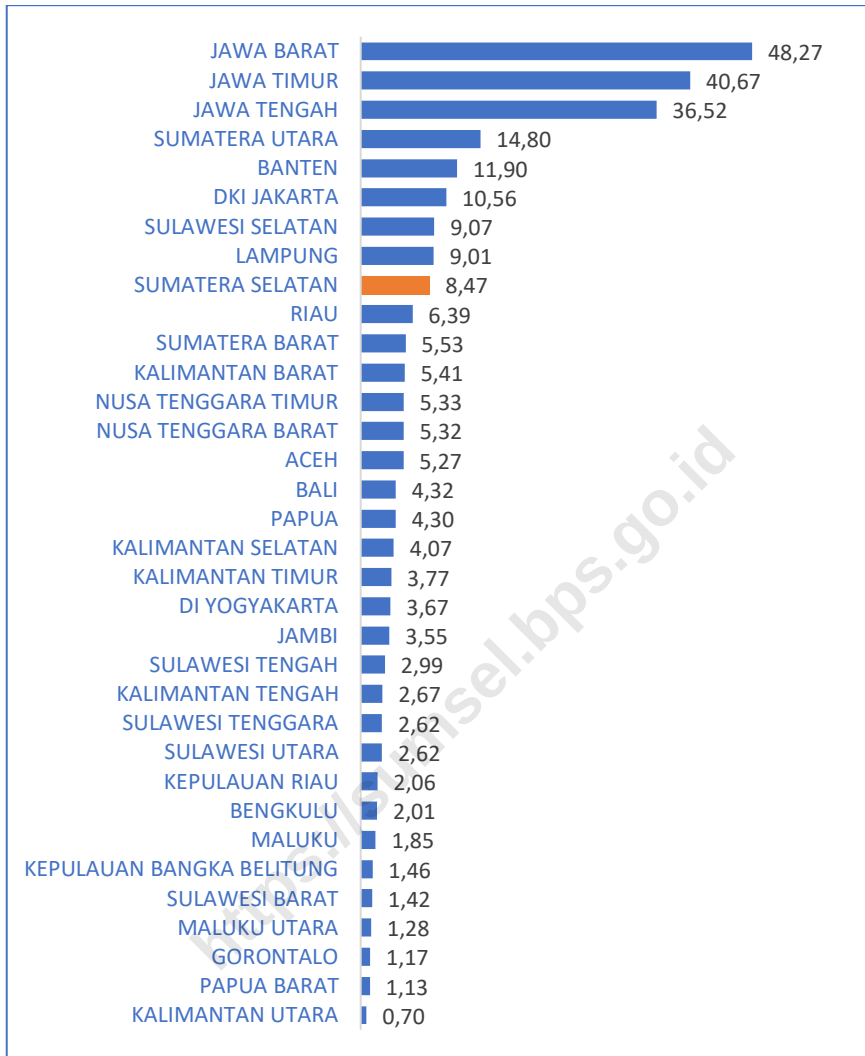
Saat ini Sumatera Selatan sedang berada pada era Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah kondisi dimana penduduk Sumatera Selatan didominasi penduduk usia kerja atau usia produktif. Kondisi ini sangat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan pemahaman yang tepat mengenai kondisi kependudukan Sumatera Selatan, maka fenomena bonus demografi yang terjadi di Sumatera Selatan dapat menjadi momentum peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan.

## A. Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Terbesar Kesembilan di Indonesia

### 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Selatan

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah 8.467.432 jiwa atau sebanyak 3,13 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini cukup besar karena merupakan jumlah penduduk terbesar kesembilan di antara 34 Provinsi di Indonesia. Untuk Pulau Sumatera, jumlah penduduk Sumatera Selatan menempati ketiga terbesar setelah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lampung. Gambar 1 menunjukkan jumlah penduduk tiap Provinsi di Indonesia. Penduduk terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dan terkecil di Kalimantan Utara.

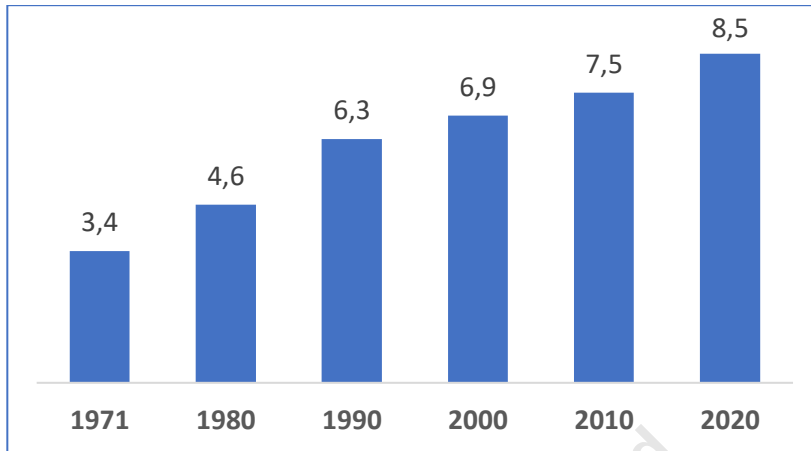




**Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia, 2020 (juta jiwa)**

Sumber : SP2020 diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

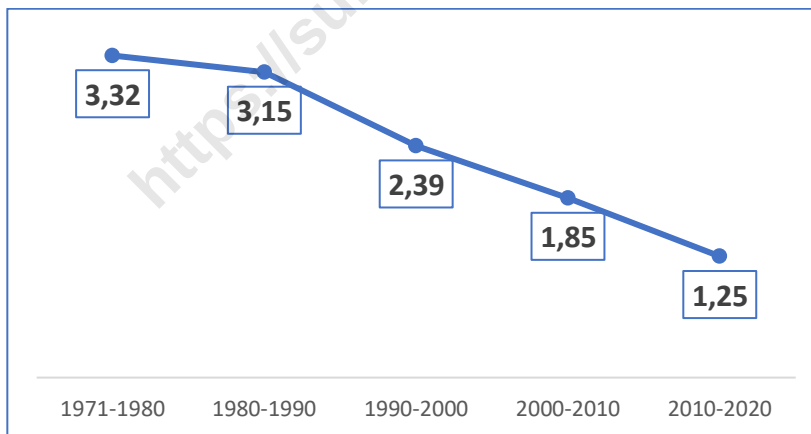
Dari waktu ke waktu, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan terus bertambah. Hasil Sensus Penduduk tahun 1971 mencatat jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,4 juta jiwa meningkat menjadi 4,6 juta jiwa di tahun 1980. Pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan pada periode 1971-1980 ini merupakan pertumbuhan yang tertinggi dengan laju pertumbuhan penduduk 3,32 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk dengan tren tertinggi terjadi pada periode tersebut dikarenakan pada saat itu program KB belum gencar sehingga perempuan di Sumatera Selatan memiliki TFR yang lebih tinggi dibanding periode setelahnya.



**Gambar 2. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (juta jiwa), 1971-2020**

Sumber : Sensus Penduduk 1971-2000, diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dengan membandingkan jumlah penduduk hasil suatu sensus dengan sensus sebelumnya maka akan didapatkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun antar kedua sensus tersebut. Gambar 3 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan pertahun (LPP per tahun) berdasarkan dataz Sensus Penduduk Tahun 1971-2020.



**Gambar 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Provinsi Sumatera Selatan (Persen), 1971-2020**

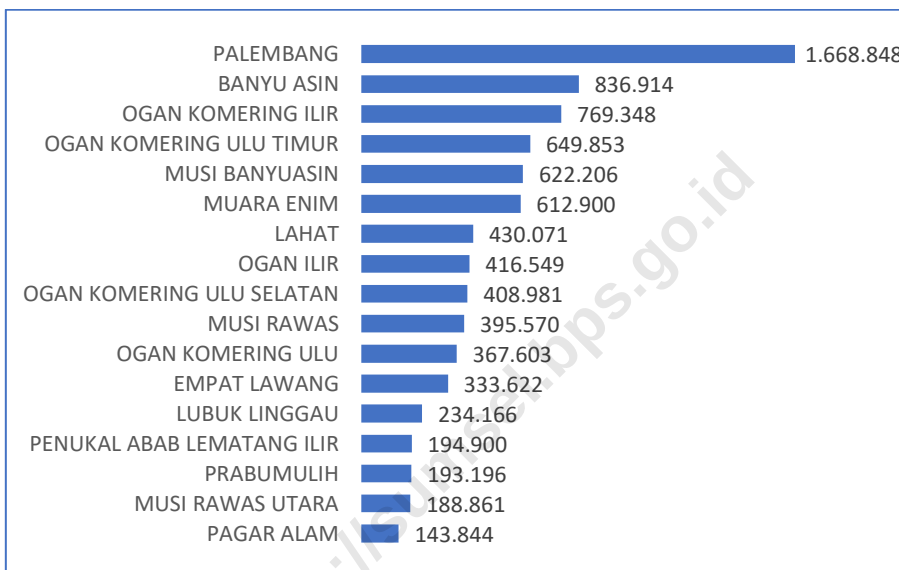
Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah setiap tahunnya, namun pertumbuhannya melambat atau dengan laju pertumbuhan yang terus menurun. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 1971-1980 sebesar 3,32 persen per tahun dan terus menurun pada periode tahun-tahun selanjutnya hingga menjadi 1,25 persen per tahun di tahun 2010-2020. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Sumatera Selatan tahun 2010-2020 sama dengan LPP nasional yaitu sebesar 1,25 persen. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini kemungkinan disebabkan keberhasilan pembangunan dalam menurunkan tingkat kelahiran

dan kematian, termasuk keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan sektor kesehatan.

## 2. Persebaran Penduduk Sumatera Selatan

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 17 kabupaten/kota dengan persebaran terbanyak di Kota Palembang. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki dua tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,67 juta jiwa. Atau dapat dikatakan bahwa hampir seperlima penduduk Sumatera Selatan tinggal di Kota Palembang.



**Gambar 4. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Provinsi Sumatera Selatan (Persen), 1971-2020**

Sumber : SP2020 diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 bertambah sebanyak 1,02 juta penduduk dibanding Sensus Penduduk 2010. Penambahan jumlah penduduk pada periode 2010-2020 terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Tiga kabupaten/kota dengan penambahan jumlah penduduk terbanyak periode tahun 2010-2020 adalah di Kota Palembang, kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sebaliknya kabupaten/kota dengan penambahan jumlah penduduk paling sedikit pada periode tahun 2010-2020 adalah Kota Pagar Alam, kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Pali.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2010-2020**

| Kabupaten/Kota            | Penduduk Tahun 2010 | Penduduk Tahun 2020 | Penambahan Penduduk 2010-2020 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| (1)                       | (2)                 | (3)                 | (4)                           |
| Ogan Komering Ulu         | 324,045             | 367,603             | 43,558                        |
| Ogan Komering Ilir        | 727,376             | 769,348             | 41,972                        |
| Muara Enim                | 551 202             | 612 900             | 61 698                        |
| Lahat                     | 369 974             | 430 071             | 60 097                        |
| Musi Rawas                | 356 076             | 395 570             | 39 494                        |
| Musi Banyuasin            | 561 458             | 622 206             | 60 748                        |
| Banyuasin                 | 750 110             | 836 914             | 86 804                        |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 318 428             | 408 981             | 90 553                        |
| Ogan Komering Ulu Timur   | 609 982             | 649 853             | 39 871                        |
| Ogan Ilir                 | 380 904             | 416 549             | 35 645                        |
| Empat Lawang              | 221 176             | 333 622             | 112 446                       |
| Pali                      | 165 474             | 194 900             | 29 426                        |
| Musi Rawas Utara          | 169 432             | 188 861             | 19 429                        |
| Palembang                 | 1 455 284           | 1 668 848           | 213 564                       |
| Prabumulih                | 161 984             | 193 196             | 31 212                        |
| Pagar Alam                | 126 181             | 143 844             | 17 663                        |
| Lubuk Linggau             | 201 308             | 234 166             | 32 858                        |
| <b>Sumatera Selatan</b>   | <b>7 450 394</b>    | <b>8 467 432</b>    | <b>1 017 038</b>              |

Sumber : SP2020 diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

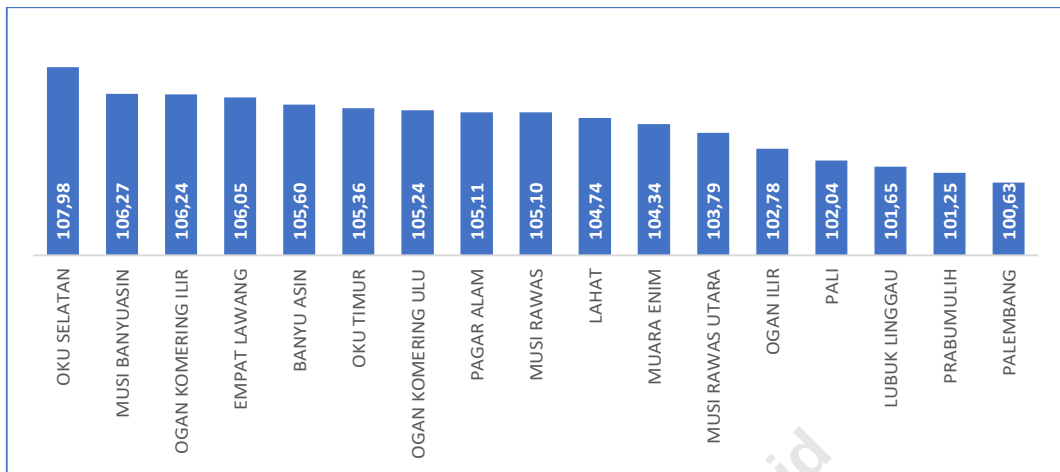
### 3. Penduduk Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin

Data rasio jenis kelamin bermanfaat dalam perencanaan pembangunan berwawasan gender. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Sumatera Selatan hampir sama banyaknya dengan penduduk laki-laki. Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4,3 juta jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 4,1 juta jiwa.

Dengan mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dapat diketahui Rasio Jenis Kelamin. Rasio Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 adalah 104. Artinya terdapat 104 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan. Di Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penduduk laki-laki masih sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang terlihat dari nilai rasio jenis kelamin yang nilainya di atas 100.

Rasio jenis kelamin penduduk di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan bernilai di atas 100. Hal ini bermakna jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Rasio jenis kelamin tertinggi adalah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan rasio sebesar 107,98 dan terendah di Kota





**Gambar 5. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Palembang sebesar 100,63. Nilai rasio jenis kelamin yang tidak jauh dari 100 menunjukkan bahwa kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dengan perbandingan yang hampir sama.

#### 4. Penduduk Sumatera Selatan Menurut Komposisi Umur

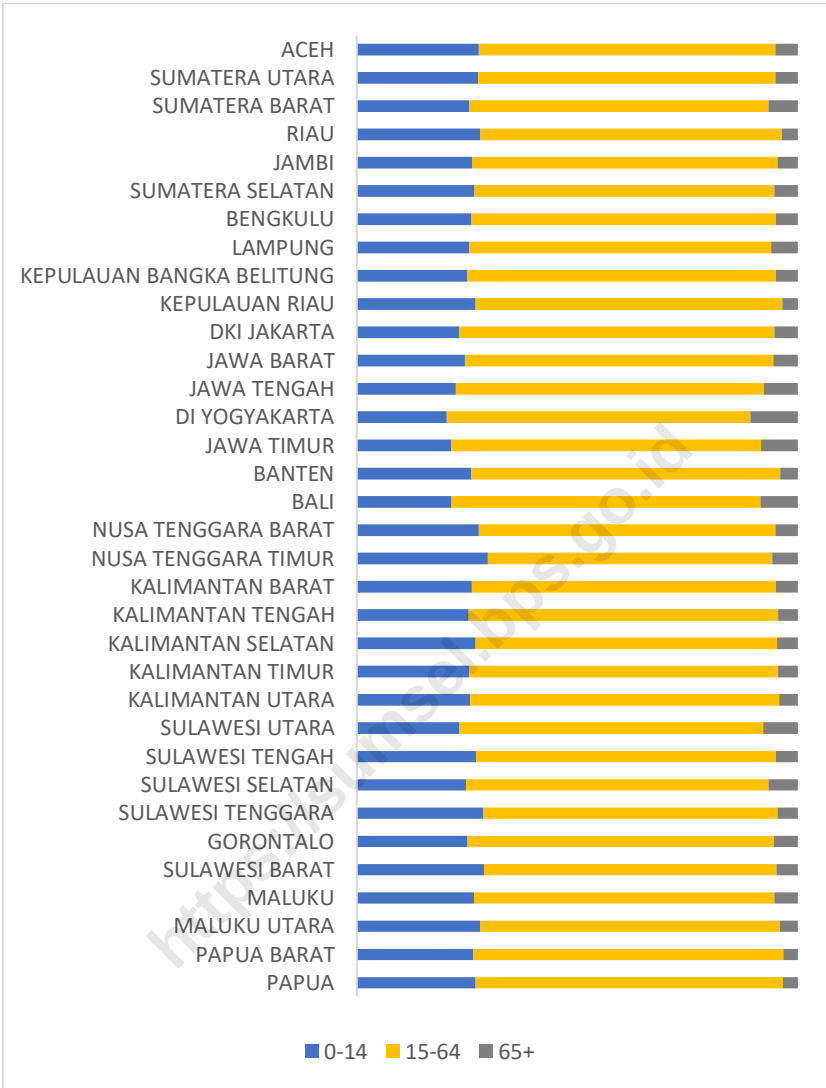
Penduduk dibagi ke dalam usia produktif (15-64 tahun) dan usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65+). Penduduk usia 15-64 tahun disebut usia produktif karena umumnya berada pada usia kerja sebagai pencari nafkah keluarga. Penduduk dalam kelompok usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas disebut penduduk usia tidak produktif karena umumnya tidak sedang bekerja dan menjadi tanggungan penduduk usia produktif.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk usia kerja/produktif di Sumatera Selatan lebih banyak dibanding usia tidak produktif. Kondisi ini disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi dapat diketahui dari nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan adalah Nilai Rasio Ketergantungan Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar 47,09 persen. Nilai ini dapat diartikan dari setiap 100 orang penduduk Sumatera Selatan usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65+).

Kondisi rasio ketergantungan yang bernilai di bawah 50 baru terjadi pada Hasil Sensus Penduduk tahun 2020. Pada Sensus sebelumnya (SP2010) nilai rasio ketergantungan Sumatera Selatan masih di atas 50 (52,24).

Bonus Demografi tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, namun juga di sebagian besar Provinsi di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya komposisi penduduk produktif di hampir seluruh Provinsi di Indonesia sebagaimana pada gambar 6 berikut.

Bonus Demografi didefinisikan sebagai kondisi kependudukan ketika proporsi anak-anak di bawah 15 tahun terus menurun, sedangkan proporsi penduduk usia kerja 15-64 tahun meningkat cukup pesat dan kenaikan proporsi penduduk lansia masih lamban. Bonus demografi diukur dengan menurunnya secara terus menerus angka *dependency ratio* (Adioetomo dkk, 2018). Bonus demografi jika dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan

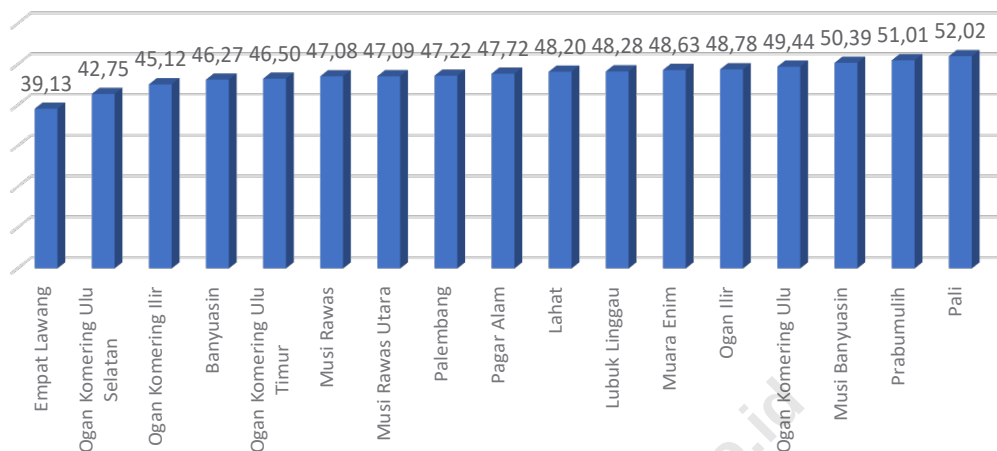


**Gambar 6. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Provinsi, 2020**

Sumber : SP2020

laju perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut, Todaro dan Smith (2011) mengungkapkan bahwa salah satu komponen penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja.

Kondisi bonus demografi tampaknya terjadi di sebagian besar provinsi di Indonesia. Nilai *dependency ratio* terendah tahun 2020 terdapat di DKI Jakarta yaitu sebesar 39,73. Seratus orang penduduk produktif di DKI Jakarta menanggung sekitar 40 (empat puluh) orang penduduk yang tidak produktif. Nilai *dependency ratio* nasional tahun 2020 sebesar 44,33 yang berarti dari 100 (seratus) orang penduduk produktif di Indonesia menanggung 44 (empat puluh empat) penduduk tidak produktif. Nilai *dependency ratio* Provinsi Sumatera Selatan lebih besar daripada nilai *dependency ratio* nasional. Ini berarti proporsi penduduk



**Gambar 7.** *Dependency Ratio* Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Sumber : SP2020, data diolah

usia produktif Sumatera Selatan masih di bawah proporsi usia produktif penduduk secara nasional.

Sejalan dengan nasional, kondisi bonus demografi juga merata hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ini terlihat dari nilai *dependency ratio* kabupaten/kota yang mayoritas nilainya di bawah 50. Hanya 3 (tiga) kabupaten/kota yang nilai *dependency ratio* tahun 2020 masih di atas 50 yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Prabumulih dan Kabupaten PALI.

Bonus Demografi akan menjadi kebaikan apabila penduduk usia produktif yang banyak tersebut tumbuh menjadi orang berkualitas serta memiliki daya saing terutama menghasilkan pekerja yang berproduktivitas tinggi. Sebaliknya jika banyaknya usia produktif hanya didominasi penduduk yang tidak berkualitas maka akan dapat menjadi beban bagi pembangunan. Akselerasi pembangunan disegala bidang memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang hanya akan optimal bila disertai dengan peningkatan produktivitasnya.

## B. Antara Kuantitas dan Kualitas

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu selaras dengan kualitas yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Untuk membandingkan antara kuantitas dan kualitas akan ditampilkan data Provinsi Sumatera Selatan beserta 10 (sepuluh) Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar lainnya di Indonesia. Perbandingan tersaji pada tabel 2 berikut ini.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara tampaknya memiliki capaian kuantitatif dan kualitatif tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Memiliki jumlah penduduk yang terbanyak sebanyak 10,56 juta jiwa dan kepadatan tertinggi yaitu 15.907 orang/km<sup>2</sup>, DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kategori sangat tinggi (IPM > 80). Dengan rasio ketergantungan paling rendah yang berarti DKI Jakarta didominasi penduduk usia produktif, wajar jika permasalahan yang dihadapi adalah terkait

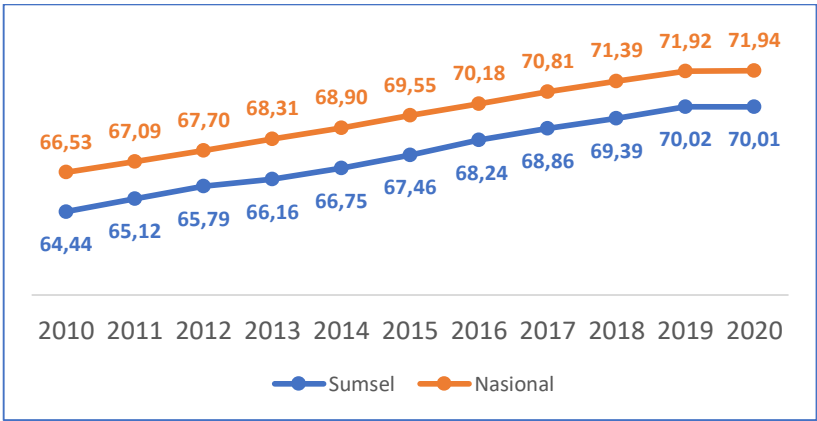
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Indikator Pembangunan di Beberapa Provinsi di Indonesia, 2020

| Provinsi         | Jumlah Penduduk (juta jiwa) | Kepadatan Penduduk (orang/ km2) | Sex Ratio (laki-laki per 100) | Rasio | Tingkat Pengangguran | PDRB per Kapita (rupiah) | IPM   |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|-------|
| (1)              | (2)                         | (3)                             | (4)                           | (5)   | (6)                  | (7)                      | (8)   |
| Jawa Barat       | 48,27                       | 1,365                           | 103,13                        | 42,94 | 10,46                | 41,81                    | 72,09 |
| Jawa Timur       | 40,67                       | 851                             | 99,60                         | 42,33 | 5,84                 | 57,65                    | 71,71 |
| Jawa Tengah      | 36,52                       | 1,113                           | 101,15                        | 43,16 | 6,48                 | 38,60                    | 71,87 |
| Sumatera Utara   | 14,80                       | 203                             | 100,61                        | 48,32 | 6,91                 | 55,18                    | 71,77 |
| Banten           | 11,90                       | 1,232                           | 104,04                        | 42,89 | 10,64                | 47,60                    | 72,45 |
| DKI Jakarta      | 10,56                       | 15,907                          | 102,06                        | 39,73 | 10,95                | 260,44                   | 80,77 |
| Sulawesi Selatan | 9,07                        | 194                             | 98,59                         | 45,84 | 6,31                 | 56,51                    | 71,93 |
| Lampung          | 9,01                        | 260                             | 105,14                        | 45,87 | 4,67                 | 41,62                    | 69,69 |
| Sumatera Selatan | 8,47                        | 92                              | 104,16                        | 47,09 | 5,51                 | 53,51                    | 70,01 |
| Riau             | 6,39                        | 73                              | 105,11                        | 46,24 | 6,32                 | 102,29                   | 72,71 |
| Sumatera Barat   | 5,53                        | 132                             | 101,39                        | 47,09 | 6,88                 | 44,03                    | 72,38 |

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

masih tingginya angka pengangguran di DKI Jakarta dibanding provinsi lainnya.

Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan sepuluh provinsi lain yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, maka secara kualitatif tidak jauh ketinggalan. Jumlah penduduk yang besar yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan diimbangi pula oleh tingginya PDRB per kapita penduduk serta tingkat pengangguran yang rendah. Kualitas manusia yang diwakili oleh angka IPM Sumatera Selatan pun telah masuk dalam kategori IPM tinggi. Meskipun begitu jika dibandingkan dengan kesepuluh provinsi dengan



Gambar 8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia, 2010-2020

Sumber : SP2020, data diolah

jumlah penduduk terbesar lainnya, IPM Sumatera Selatan masih berada nomor dua terakhir, sedikit di atas IPM Provinsi Lampung.

### 1. Perkembangan IPM Sumatera Selatan

Kualitas pembangunan manusia umumnya dapat diketahui dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Sumatera Selatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPM Sumatera Selatan dan Nasional sama-sama berada pada level IPM sedang. IPM nasional meningkat menjadi tinggi di tahun 2016, sedangkan IPM Provinsi Sumatera Selatan meningkat menjadi tinggi di tahun 2019.

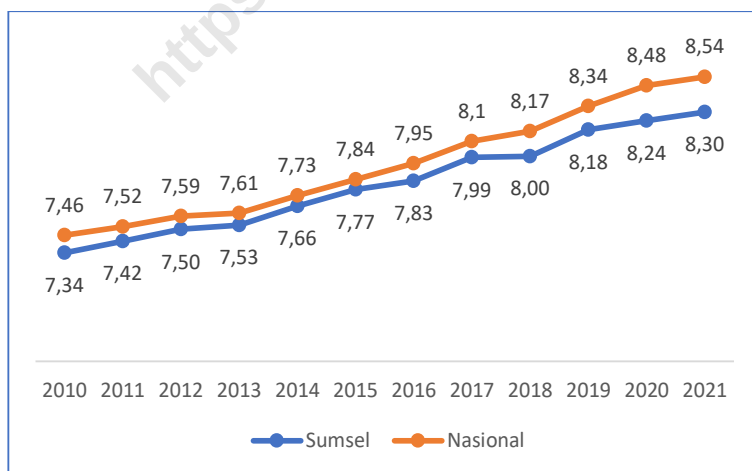
### 2. Perkembangan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan

Kualitas pendidikan penduduk Sumatera Selatan dapat diketahui diantaranya melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang merupakan komponen IPM untuk dimensi pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang meningkat dalam jangka panjang menunjukkan peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan di suatu wilayah.

### 3. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dimaksud dalam definisi ini adalah penduduk usia 25 tahun ke atas yang umumnya telah selesai mengenyam pendidikan formal. Sepanjang tahun 2010-2021 RLS penduduk Sumatera Selatan meningkat dari 7,34 tahun pada tahun 2010 menjadi 8,30 tahun di tahun 2021. Artinya pada tahun 2010, rata-rata penduduk Sumatera Selatan bersekolah hingga kelas 1 SLTP meningkat menjadi kelas 2 SLTP di tahun 2020.

Berdasarkan Gambar 9, dapat diketahui bahwa RLS penduduk Sumatera Selatan terus naik



**Gambar 9. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia, 2010-2021**

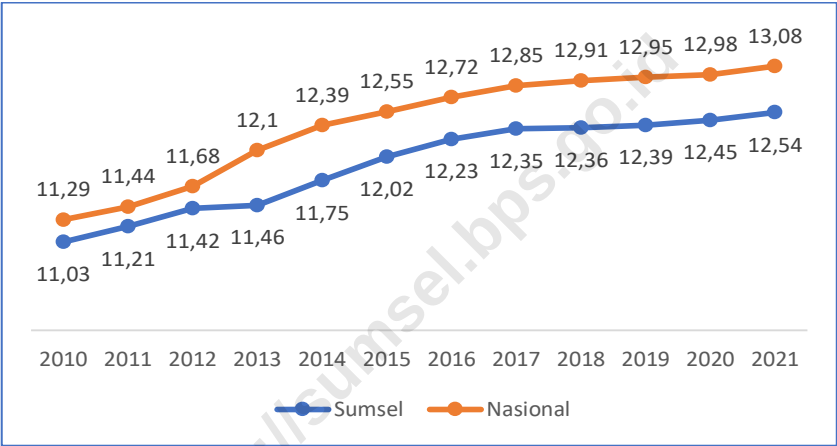
Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



tiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan angka nasional maka RLS penduduk Sumatera Selatan naik searah dengan kenaikan RLS pada level nasional, namun dengan *gap* yang semakin jauh. Dari gambar 9 juga terlihat bahwa perkembangan RLS nasional lebih cepat dibandingkan Sumatera Selatan.

4. Perkembangan Harapan Lama Sekolah

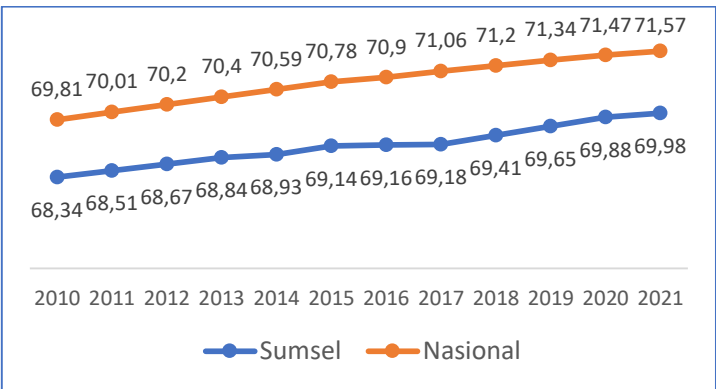
Harapan lama sekolah (HLS) diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Sumatera Selatan tahun 2010 sebesar 11,03 tahun dan meningkat menjadi 12,54 tahun pada 2021. Artinya saat ini penduduk usia 7 tahun ke atas di Sumatera Selatan berpeluang bersekolah formal hingga lulus SLTA.



Gambar 10. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia, 2010-2021

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

HLS penduduk Sumatera Selatan terus meningkat setiap tahunnya searah dengan peningkatan



Gambar 11. Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia, 2010-2021

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

HLS nasional. Serupa dengan RLS, HLS Sumatera Selatan meningkat namun dengan *gap* yang semakin lebar dengan HLS nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan HLS nasional lebih cepat dibanding Sumatera Selatan.

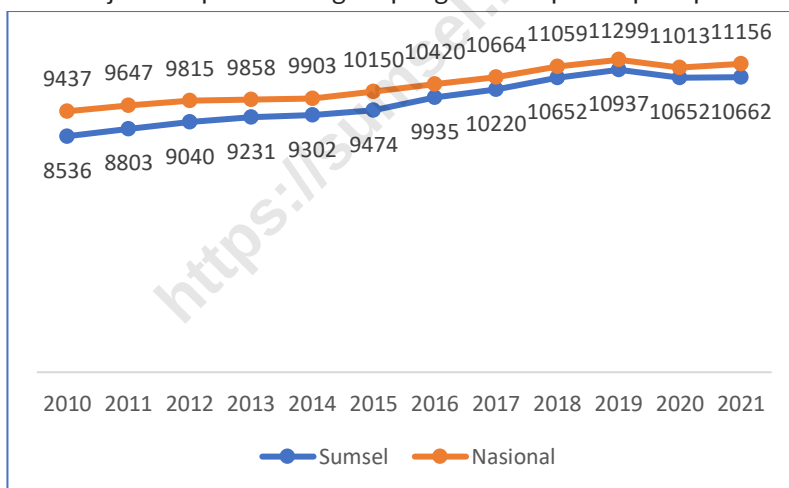
## 5. Perkembangan Kualitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan

Kualitas kesehatan penduduk Sumatera Selatan salah satunya dapat diketahui dari umur harapan hidup (UHH) yang merupakan salah satu komponen IPM. UHH penduduk Sumatera Selatan tahun 2010 sebesar 68,34 tahun, dan meningkat menjadi 69,98 tahun di tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan derajat kesehatan penduduk Sumatera Selatan selama satu dekade. Jika dibandingkan dengan nilai nasional, UHH Sumatera Selatan masih di bawah UHH nasional. Serupa dengan komponen pendidikan, komponen kesehatan yang diwakili UHH Sumatera Selatan terus naik tiap tahunnya namun dengan *gap* yang makin lebar dengan nasional.

## 6. Perkembangan Kualitas Kesejahteraan di Provinsi Sumatera Selatan

Kualitas penduduk juga dapat terlihat dari tingkat kesejahteraan atau perekonomiannya. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas kesejahteraan salah satunya adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Umumnya semakin tinggi pengeluaran perkapita penduduk suatu wilayah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pula.

Gambar 12 menunjukkan perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Sumatera



**Gambar 12. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2010-2021**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Selatan tahun 2010-2021. Pada tahun 2021 pengeluaran perkapita penduduk Sumatera Selatan sebesar Rp10.662.000,- per tahun, naik sekitar 24,9 persen dibanding tahun 2010. *Trend* kenaikan ini searah dengan kenaikan pengeluaran per kapita penduduk secara nasional, bahkan semakin lama nilai pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Selatan semakin mendekati nasional.

## 7. Kualitas Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Sejalan dengan IPM Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan turut mengalami kenaikan. IPM tertinggi

**Tabel 3. Perbandingan IPM Tahun 2013 dan IPM Tahun 2021 Antar Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan**

| Kabupaten/Kota<br>(1)     | IPM 2013<br>(2) | IPM 2021<br>(3) | Selisih<br>(4) | Pertumbuhan<br>(5) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Ogan Komering Ulu         | 65,51           | 69,60           | 4,09           | 6,24               |
| Ogan Komering Ilir        | 63,52           | 67,17           | 3,65           | 5,75               |
| Muara Enim                | 64,34           | 68,86           | 4,52           | 7,03               |
| Lahat                     | 64,15           | 67,58           | 3,43           | 5,35               |
| Musi Rawas                | 62,23           | 67,01           | 4,78           | 7,68               |
| Musi Banyuasin            | 64,18           | 68,10           | 3,92           | 6,11               |
| Banyuasin                 | 62,42           | 67,13           | 4,71           | 7,55               |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 61,58           | 65,34           | 3,76           | 6,11               |
| Ogan Komering Ulu Timur   | 66,09           | 69,58           | 3,49           | 5,28               |
| Ogan Ilir                 | 63,64           | 67,17           | 3,53           | 5,55               |
| Empat Lawang              | 62,74           | 65,39           | 2,65           | 4,22               |
| Pali                      | 59,69           | 64,88           | 5,19           | 8,69               |
| Musi Rawas Utara          | 60,56           | 64,93           | 4,37           | 7,22               |
| Palembang                 | 75,49           | 78,72           | 3,23           | 4,28               |
| Prabumulih                | 71,87           | 74,67           | 2,80           | 3,90               |
| Pagar Alam                | 64,14           | 68,68           | 4,54           | 7,08               |
| Lubuk Linggau             | 72,55           | 74,89           | 2,34           | 3,23               |

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

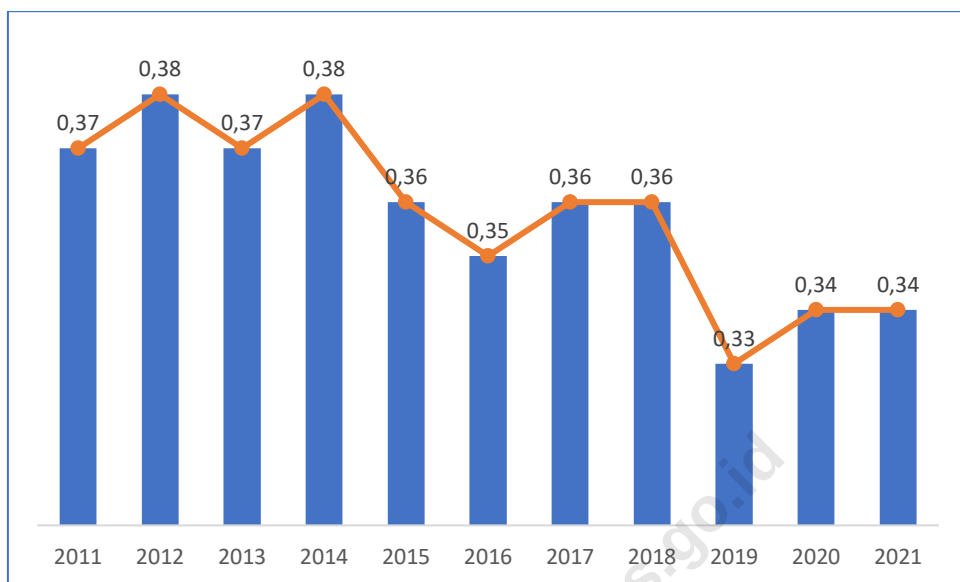
di Provinsi Sumatera Selatan adalah di Kota Palembang sedangkan terendah di Kabupaten Pali.

Terdapat 3 (tiga) kota di Sumatera Selatan yang masuk kategori IPM tinggi sedangkan kabupaten/kota lainnya masuk kategori IPM sedang. Kecepatan pertumbuhan IPM menunjukkan besarnya upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia. Kabupaten/kota dengan kecepatan pertumbuhan IPM paling tinggi di Sumatera Selatan periode 2013-2021 adalah kabupaten Pali sedangkan yang terendah adalah Kota Prabumulih. Umumnya kabupaten/kota dengan IPM sedang cenderung lebih cepat pertumbuhan IPM nya dibandingkan kabupaten/kota dengan IPM tinggi.

## C. Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

### 1. Gini Ratio Sumatera Selatan

Mewujudkan pembangunan yang merata merupakan sebuah tantangan, terutama agar pembangunan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan yang merata diperlukan upaya agar ketimpangan yang terjadi semakin mengecil dari waktu ke waktu. Ada beberapa metode dalam mengukur ketimpangan, salah satunya adalah Koefisien Gini.



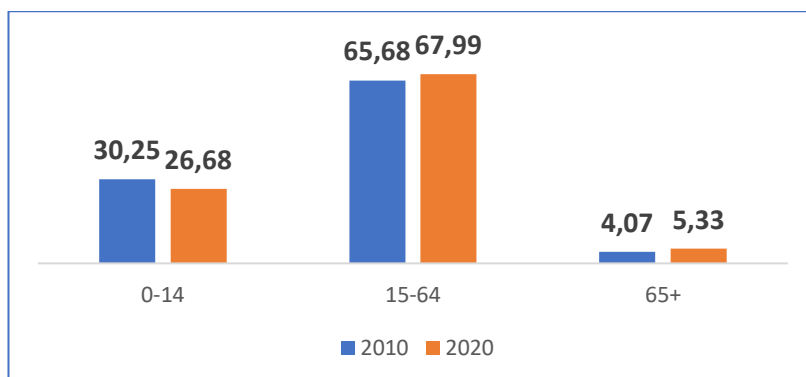
**Gambar 13. Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Sumatera Selatan, 2011-2021**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Adanya perubahan nilai *gini ratio* penduduk Sumatera Selatan pada periode 2011-2021 mengindikasikan adanya perubahan dalam distribusi pengeluaran penduduk. *Gini ratio* yang nilainya cenderung mengalami penurunan dimana *gini ratio* Sumatera Selatan tahun 2011 sebesar 0,37 menjadi 0,34 di tahun 2021 mengindikasikan pengeluaran penduduk Sumatera Selatan cenderung membaik dan lebih merata.

Simon Kuznet (1955) mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan akan semakin nyata sebagai akibat dari proses industrialisasi dan urbanisasi, terutama di negara-negara sedang berkembang yang disebabkan terkonsentrasinya pembangunan di sektor modern. Implikasi dari pemikiran Kuznet tersebut adalah bahwa ketimpangan seperti ini tidak bisa dihindari jika suatu negara ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan juga berkaitan dengan transisi demografi yang



**Gambar 14. Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Selatan, 2010 dan 2020**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

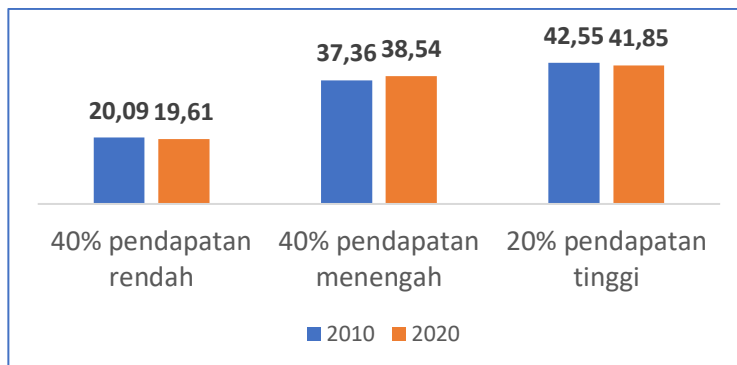
terjadi. Williamson (2011) menunjukkan bahwa sejalan dengan transisi demografi, tampak adanya pengaruh variabel demografi yaitu struktur umur terhadap ketimpangan. Jika struktur usia penduduk yang lebih besar adalah yang lebih muda atau lebih tua, maka ketimpangan akan meningkat. Sedangkan jika struktur usia penduduk yang lebih besar adalah yang dewasa (30-59 tahun) maka ketimpangan akan berkurang (menurun) dengan asumsi variabel lain konstan.

Gambar 14 menunjukkan bahwa dalam satu dasawarsa, yaitu antara tahun 2010 dan 2020 terjadi peningkatan proporsi penduduk Sumatera Selatan usia produktif. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif Sumatera Selatan sebesar 65,68 persen meningkat menjadi 67,99 persen di tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut kelompok usia muda (0-14) tahun proporsinya menurun dari sebelumnya di tahun 2010 sebesar 30,25 persen menjadi 26,68 persen di tahun 2020. Penurunan ini kemungkinan karena tingkat kelahiran yang menurun (gambar 14). Di sisi lain dengan adanya peningkatan umur harapan hidup sebagai akibat perbaikan sarana prasarana kesehatan, proporsi penduduk lansia meningkat dari 4,07 persen di tahun 2010 menjadi 5,33 persen di tahun 2020.

Penurunan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tampaknya sejalan dengan perubahan struktur umur / transisi demografi. Pada tahun 2010 struktur umur penduduk Sumatera Selatan masih didominasi penduduk usia tidak produktif namun di tahun 2020 dominasi penduduk usia produktif terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Nilai *dependency ratio* Sumatera Selatan tahun 2020 yang sebesar 47,09 menunjukkan bahwa penduduk usia muda saat ini mendominasi jumlah penduduk Sumatera Selatan. Di sisi lain data *gini ratio* menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2011 *gini ratio* Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,37 telah turun menjadi 0,34 di tahun 2020. Ini berarti searah dengan perubahan struktur umur penduduk Sumatera Selatan, ketimpangan di Sumatera Selatan juga menurun.

## 2. Ukuran ketimpangan Menurut World Bank

Selain *gini ratio*, ukuran ketimpangan lain yang umum digunakan adalah kriteria ketimpangan menurut *World Bank*. *World Bank* mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan yaitu 40 % penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.



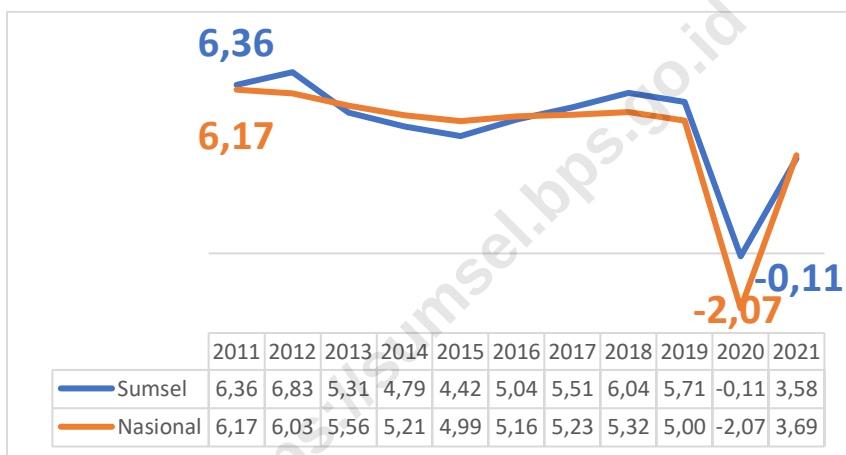
**Gambar 15. Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, 2010 dan 2020**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dalam periode satu dasawarsa, antara tahun 2010 dan 2020, terjadi peningkatan proporsi pengeluaran masyarakat yang masuk dalam 40 persen masyarakat berpendapatan menengah. Pada tahun 2010, 40 persen masyarakat berpendapatan menengah menikmati 37,36 persen dari total pengeluaran, meningkat menjadi 38,54 persen di tahun 2020. Sebaliknya penurunan terjadi pada masyarakat yang masuk dalam kategori 40 persen pendapatan rendah dan 20 persen masyarakat berpendapatan tinggi (Gambar 15).

### 3. Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita umumnya digunakan untuk melihat kemajuan perekonomian di suatu wilayah. Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan, nilai PDRB mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dengan angka pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan dan Nasional, 2011-2020**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

*Trend* perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada 2011-2021 menunjukkan peningkatan, sebagaimana pada gambar 16. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan 2011-2019 selalu tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontraksi ekonomi yang terjadi di tahun 2020 merupakan hal yang tidak terduga yaitu adanya pandemi Covid-19 namun di tahun 2021 perekonomian Sumatera Selatan telah mengalami pemulihan yang ditandai dengan ekonomi tumbuh 3,58 persen sedangkan perekonomian Indonesia tumbuh 3,69 persen.

Nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yaitu PDRB per kapita umumnya digunakan



**Tabel 4. Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Beberapa Provinsi di Indonesia, 2020**

| Provinsi<br>(1)  | Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)<br>(2) | PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)<br>(3) |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Jawa Barat       | 48,27                              | 43 288,70                            |
| Jawa Timur       | 40,67                              | 56 640,41                            |
| Jawa Tengah      | 36,52                              | 36 983,99                            |
| Sumatera Utara   | 14,80                              | 54 979,04                            |
| Banten           | 11,90                              | 52 736,47                            |
| DKI Jakarta      | 10,56                              | 262 702,12                           |
| Sulawesi Selatan | 9,07                               | 55 675,79                            |
| Lampung          | 9,01                               | 39 346,53                            |
| Sumatera Selatan | 8,47                               | 54 084,41                            |
| Riau             | 6,39                               | 114 331,74                           |

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sebesar Rp25.932.000,- meningkat menjadi Rp37.323.240,- di tahun 2020 atau meningkat 43,93 persen dalam waktu 10 (sepuluh) tahun. Hal ini berarti sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk Sumatera Selatan, tingkat kesejahteraan juga mengalami peningkatan.

Tabel 4 menunjukkan PDRB per kapita untuk 10 (sepuluh) Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki PDRB per kapita paling tinggi meskipun jumlah penduduknya bukan yang paling besar di Indonesia. Khadijah (2018) dalam penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Penduduk terutama yang berkualitas merupakan modal pembangunan. Adioetomo (2005) mengemukakan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk yang meningkatkan perekonomian adalah pertumbuhan penduduk usia kerja 15-64 tahun karena memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan perekonomian melalui produktivitas tenaga kerja.

Sepanjang periode tahun 2010-2020 terjadi perubahan kontribusi penduduk dan kontribusi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dari data pada tabel 5 diketahui bahwa distribusi penduduk Provinsi Sumatera Selatan masih terkonsentrasi di Kota Palembang, dengan peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palembang sebesar 19,53 persen atau hampir seperlima dari total penduduk Sumatera Selatan. Di tahun 2015 hasil SUPAS menunjukan kenaikan proporsi penduduk Sumatera Selatan menjadi 19,63 persen dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 19,71 persen dari total penduduk Sumsel (Hasil SP2020). Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya kontribusi PDRB Kota Palembang. Pada tahun 2010, Kota Palembang menyumbang 31,52 persen PDRB Sumsel, naik menjadi 32,10 di tahun 2015. Dan naik kembali tahun 2020 dimana 33,69 persen PDRB Sumsel disumbang Kota Palembang.

**Tabel 5. Distribusi Penduduk dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2010, 2015 dan 2020**

| Kabupaten/Kota     | Distribusi Penduduk (%) |                   |                   | Kontribusi PDRB (%) |       |       |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|
|                    | 2010 <sup>1</sup>       | 2015 <sup>2</sup> | 2020 <sup>3</sup> | 2010                | 2015  | 2020  |
| (1)                | (2)                     | (3)               | (4)               | (5)                 | (6)   | (7)   |
| Ogan Komering Ulu  | 4,35                    | 4,34              | 4,34              | 3,42                | 3,17  | 3,21  |
| Ogan Komering Ilir | 9,76                    | 9,78              | 9,09              | 6,44                | 6,48  | 6,34  |
| Muara Enim         | 7,40                    | 7,46              | 7,24              | 11,18               | 12,15 | 12,49 |
| Lahat              | 4,97                    | 4,88              | 5,08              | 4,39                | 4,11  | 3,75  |
| Musi Rawas         | 4,78                    | 4,77              | 4,67              | 4,67                | 4,20  | 4,17  |
| Musi Banyuasin     | 7,54                    | 7,59              | 7,35              | 16,37               | 15,85 | 14,38 |
| Banyuasin          | 10,07                   | 10,08             | 9,88              | 6,35                | 6,18  | 6,31  |
| OKU Selatan        | 4,27                    | 4,27              | 4,83              | 1,89                | 1,89  | 1,94  |
| OKU Timur          | 8,19                    | 8,06              | 7,67              | 3,14                | 3,30  | 3,29  |
| Ogan Ilir          | 5,11                    | 5,08              | 4,92              | 2,27                | 2,43  | 2,45  |
| Empat Lawang       | 2,97                    | 2,96              | 3,94              | 1,18                | 1,14  | 1,10  |
| Pali               | 2,22                    | 2,23              | 2,30              | 1,57                | 1,51  | 1,55  |
| Musi Rawas Utara   | 2,27                    | 2,27              | 2,23              | 1,96                | 1,77  | 1,56  |
| Palembang          | 19,53                   | 19,63             | 19,71             | 31,52               | 32,10 | 33,69 |
| Prabumulih         | 2,17                    | 2,20              | 2,28              | 1,56                | 1,66  | 1,70  |
| Pagar Alam         | 1,69                    | 1,66              | 1,70              | 0,76                | 0,68  | 0,61  |
| Lubuk Linggau      | 2,70                    | 2,73              | 2,77              | 1,34                | 1,39  | 1,46  |

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

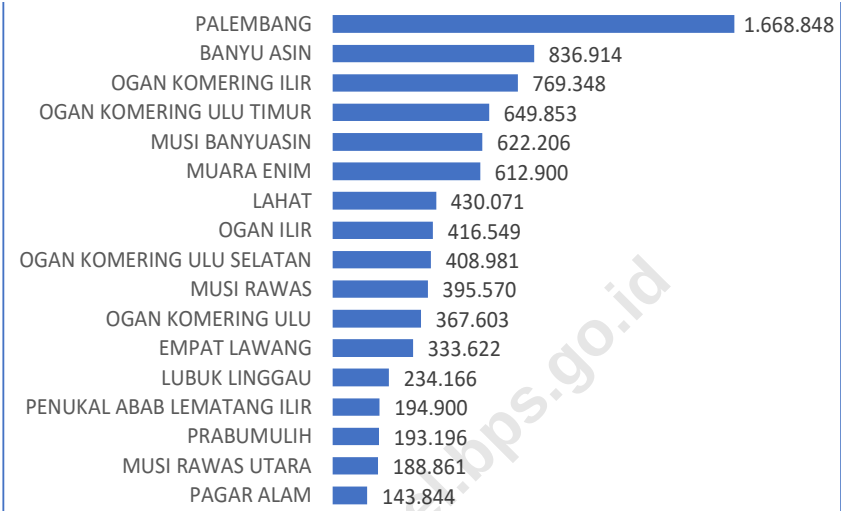
Kenaikan proporsi penduduk dan kontribusi PDRB Kota Palembang pada periode 2010-2020 ini menunjukkan bahwa Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi pusat segala aktivitas dan masih menjadi magnet yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Senada dengan pepatah ada gula ada semut dimana Kota Palembang yang memiliki kontribusi PDRB terbesar di Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki jumlah penduduk terbanyak.

Kabupaten/Kota yang naik kontribusi PDRB dan distribusi penduduknya jika dibandingkan tahun 2010 dan 2020 adalah kabupaten OKU Selatan, Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau. Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan kontribusi PDRB namun turun distribusi penduduknya adalah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur. Kabupaten/Kota yang distribusi penduduknya mengalami kenaikan di tahun 2020 dibanding 2010 namun kontribusi PDRB nya turun adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pali dan Kota Pagar Alam. Sedangkan yang mengalami penurunan kontribusi PDRB dan distribusi penduduk adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### **D. Sebaran Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota**

Penduduk Sumatera Selatan tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

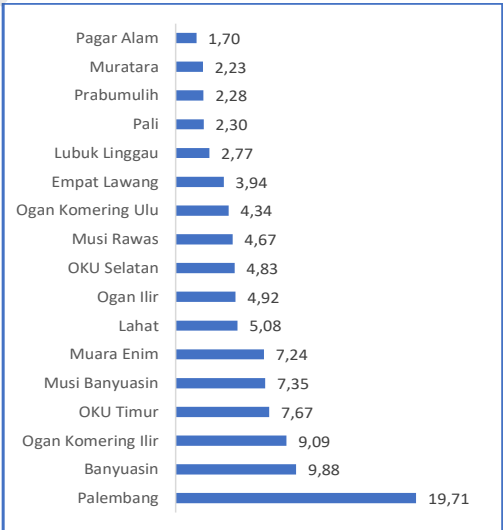
Tiga kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan adalah penduduk Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 1,67 juta jiwa, sedangkan Kota Pagar Alam memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sekitar 143,8 ribu jiwa.



Gambar 17. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Hampir seperlima penduduk Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang (19,71 persen). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar berikutnya adalah kabupaten Banyuasin yang berkontribusi sebesar 9,88 persen dari keseluruhan penduduk Sumatera Selatan dan kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jumlah penduduk sebesar 9,09 persen dari penduduk Sumatera Selatan.

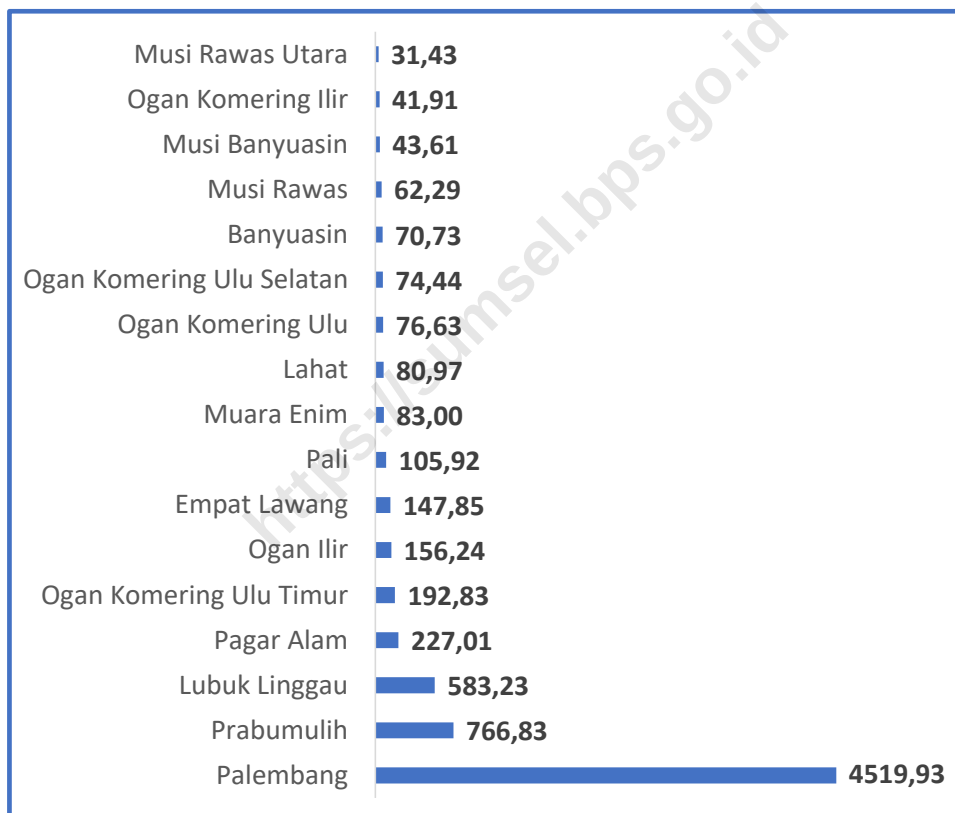


Gambar 18. Kontribusi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota terhadap Penduduk Sumatera Selatan, 2020

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Di antara seluruh kota di Sumatera Selatan hanya kota Palembang yang memiliki jumlah penduduk besar. Kota-kota lainnya memiliki kontribusi penduduk yang kecil seperti kota Lubuk Linggau hanya berkontribusi sebesar 2,77 persen dari seluruh penduduk Sumatera Selatan, Kota Prabumulih berkontribusi sebesar 2,28 persen sedangkan Kota Pagaralam yang memiliki jumlah penduduk paling kecil berkontribusi 1,70 persen dari total penduduk Sumatera Selatan.

Selain jumlah penduduk, hal lainnya yang terkait erat dengan permasalahan kependudukan adalah mengenai kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk berhubungan dengan seberapa luas suatu wilayah dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 91.592 km<sup>2</sup> dikategorikan cukup luas sehingga meskipun menempati peringkat sembilan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia namun kepadatan Provinsi Sumatera Selatan hanya sebesar 92 orang/km<sup>2</sup>.



**Gambar 19. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (orang/km<sup>2</sup>), 2020**

Sumber : Diolah dari hasil SP2020 dan luas wilayah yang diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017

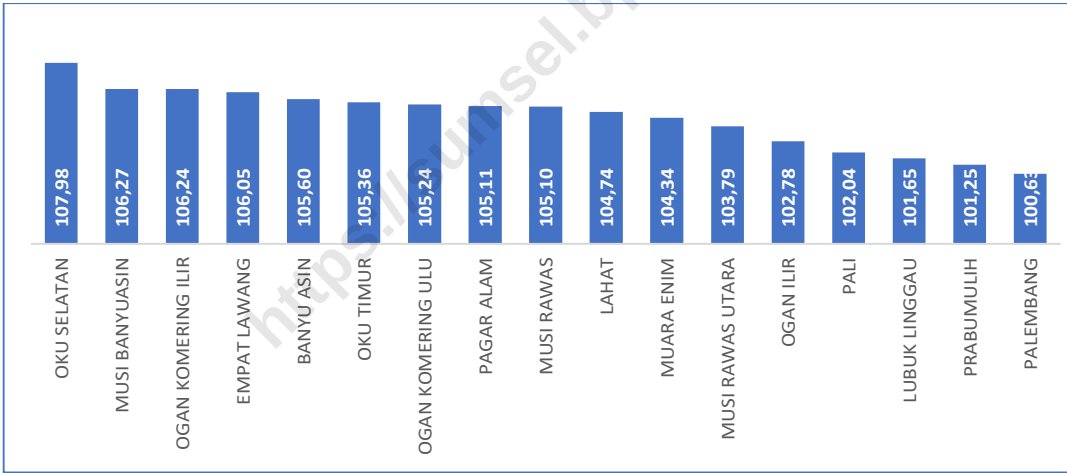
Permasalahan yang ada terkait kepadatan adalah adanya persebaran penduduk yang tidak merata di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagian besar penduduk Sumatera Selatan berada di Kota Palembang yang menjadikan Kota Palembang sebagai kota yang paling padat penduduknya, dengan tingkat kepadatan yang perbandingannya sangat jauh dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Kepadatan Kota Palembang sangat tinggi jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kepadatan tertinggi adalah di Kota Palembang dengan kepadatan penduduk mencapai 4519,9 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan terendah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kepadatan penduduk 31,43 jiwa/km<sup>2</sup>.

Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa penduduk laki-laki di Sumatera Selatan lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang terlihat dari nilai rasio jenis kelamin yang di atas 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Data rasio jenis kelamin bermanfaat dalam perencanaan pembangunan berwawasan gender.

Dari segi perbandingan jenis kelamin, penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4,3 juta jiwa atau 51,02 persen, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 4,1 juta jiwa atau 48,98 persen. Rasio jenis kelamin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 adalah 104. Artinya terdapat 104 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan.

Pada level kabupaten/kota, rasio jenis kelamin seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan bernilai di atas 100 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan



**Gambar 20. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Rasio jenis kelamin tertinggi adalah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan rasio sebesar 107,98 dan terendah di Kota Palembang sebesar 100,63. Nilai rasio jenis kelamin yang tidak jauh dari 100 menunjukkan bahwa kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir sama.

E. Perubahan Struktur Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan

Bonus demografi muncul karena adanya perubahan paradigma ‘banyak anak banyak rezeki’ menjadi ‘keluarga kecil lebih bahagia dan lebih sejahtera’. Dengan jumlah anak lebih sedikit, para orangtua bisa mengutamakan pengembangan anak berkualitas melalui pemenuhan gizi,

pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas sejak usia dini. Selain itu, orangtua dari anak-anak ini juga telah mengenyam pendidikan dan dengan status kesehatan yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya (Adioetomo dkk, 2009).

**Tabel 6. Angka Rasio Ketergantungan Sumatera Selatan, 2010-2020**

| Rasio Ketergantungan            | 2010 <sup>1</sup> | 2015 <sup>2</sup> | 2020 <sup>3</sup> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Usia 0-14 tahun                 | 46,05             | 41,49             | 39,24             |
| Usia 65+ tahun                  | 6,19              | 6,67              | 7,85              |
| Usia 0-14 dan 65+ tahun (total) | 52,24             | 48,16             | 47,09             |

Sumber : <sup>1</sup>Hasil SP2010, <sup>2</sup>Hasil SUPAS 2015, <sup>3</sup>Hasil SP2020

Adapun terciptanya bonus demografi diawali dengan transisi demografi yakni menurunnya angka kelahiran dan kematian diiringi peningkatan umur harapan hidup (UHH) dalam jangka panjang yang mengakibatkan perubahan struktur umur penduduk. Hal ini juga yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dimana dengan penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan umur harapan hidup yang terjadi, menjadikan penduduk Sumatera Selatan saat ini sedang berada pada fase bonus demografi.

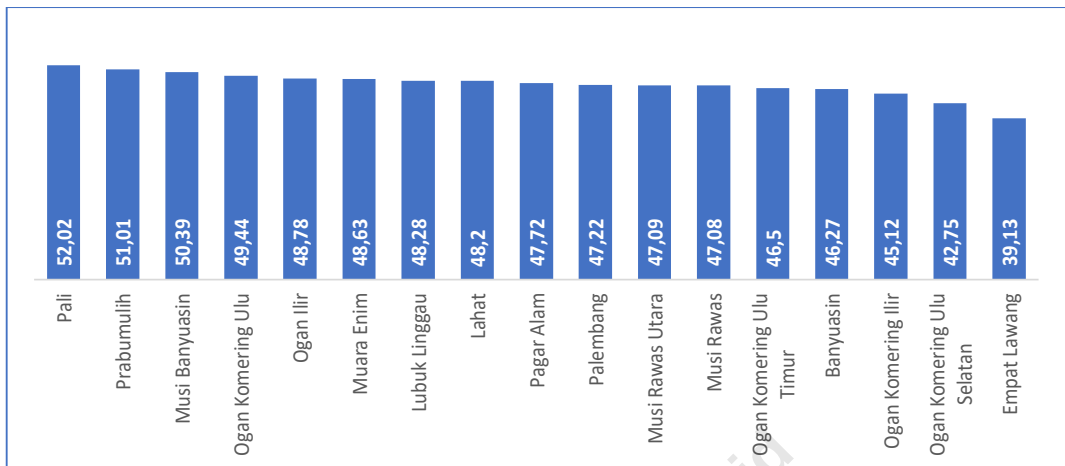
Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sebesar 52,24. Nilai ini berarti terdapat 52 persen penduduk tidak produktif di Sumsel (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) yang menjadi tanggungan 100 orang usia produktif di Sumsel. Adapun rasio ketergantungan penduduk Sumsel usia 0-14 tahun pada tahun 2010 adalah sebesar 46,05 sedangkan rasio ketergantungan usia 65 tahun ke atas sebesar 6,19. Data ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Sumatera Selatan tahun 2010 didominasi rasio ketergantungan penduduk muda (0-14 tahun).

Kondisi tahun 2015 (hasil SUPAS 2015) menunjukkan mulai terjadinya perubahan struktur umur penduduk Sumatera Selatan. Nilai rasio ketergantungan penduduk Sumsel tahun 2015 sebesar 48,16 yang menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif sudah lebih besar dibanding penduduk tidak produktif. Nilai 48,16 berarti terdapat 48 orang penduduk tidak produktif dari 100 orang penduduk usia produktif di Sumatera Selatan.

Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai rasio ketergantungan penduduk kembali turun menjadi 47,09. Data ini menunjukkan bahwa ada 47 penduduk Sumsel tidak produktif yang menjadi tanggungan 100 orang penduduk Sumsel yang produktif. Terus turunnya rasio ketergantungan penduduk Sumsel menjadi sebuah pertanda terciptanya bonus demografi di Sumsel. Bonus demografi ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam bentuk investasi kualitas manusia.

Investasi kualitas manusia utamanya pada usia anak (0-14 tahun) patut menjadi perhatian khususnya pemangku kebijakan, apalagi rasio ketrgantungan di Provinsi Sumatera Selatan didominasi rasio ketergantungan anak. Menurut Adioetomo dkk (2009), pada awal transisi demografi, terjadi penurunan persentase anak-anak di bawah usia 15 tahun yang menjadi tanggungan. Hal ini sejalan dengan data Provinsi Sumatera Selatan pada tabel 6 dimana pada tahun 2010 tiap seratus pekerja di Sumsel menanggung sekitar 46 anak, namun turun menjadi 41 anak di tahun 2015 dan kembali turun menjadi 39 anak di tahun 2020.





**Gambar 21. Total Rasio Beban Ketergantungan Usia 0-14 Tahun dan 65+ Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2020**

Sumber : Hasil SP2020

Berkebalikan dengan rasio ketergantungan anak yang terus mengalami penurunan, rasio ketergantungan penduduk usia 65 tahun ke atas di Sumatera Selatan justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilainya sebesar 6,19 yang artinya 100 orang pekerja di Sumsel menanggung sekitar 6 orang penduduk usia 65 tahun ke atas, naik menjadi 7,85 di tahun 2020, yang berarti 100 orang pekerja Sumsel menanggung sekitar 8 orang lansia.

Sejalan dengan rasio ketergantungan penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang telah menunjukkan kondisi bonus demografi (rasio ketergantungan di bawah 50), terlihat sebagaimana pada gambar 20 yang menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan juga tengah berada pada fase bonus demografi. Kabupaten/kota yang tengah berada pada fase bonus demografi dengan rasio ketergantungan dari yang terendah yaitu Kabupaten Empat Lawang, OKU Selatan, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, OKU Timur, Mura, Muratara, Palembang, Pagar Alam, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu. Sedangkan 3 (tiga) kabupaten/kota lainnya yaitu Musi Banyuasin, Prabumulih dan Pali masih memiliki rasio ketergantungan di atas 50 yang berarti belum berada pada fase bonus demografi.

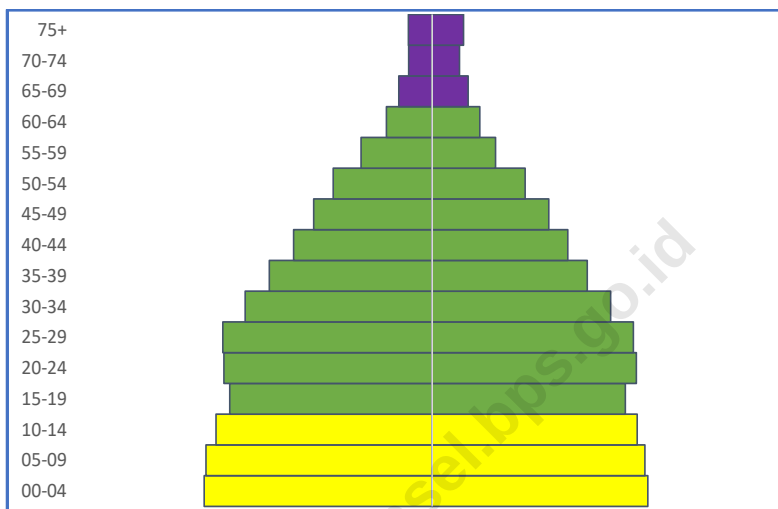
## F. Implikasi Perubahan Struktur Penduduk Sumatera Selatan di Masa Depan

Saat ini, Sumatera Selatan sedang mengalami periode bonus demografi. Di tahun 2010 (hasil SP2010), nilai angka ketergantungan Sumatera Selatan masih di atas 50 persen (52,24 persen). Namun di tahun 2020 (hasil SP2020), angka ketergantungan Sumatera Selatan di bawah 50 persen (47,09 persen). Perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar terhadap perekonomian dimana bonus demografi mendorong pembangunan ekonomi (Bloom dan Williamson, 1998; Lee dan Mason, 2007).

Untuk mengetahui “proses demografi” yang terjadi pada penduduk Sumatera Selatan digunakan piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menunjukkan proses transisi demografi. Transisi demografi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perubahan pada struktur umur penduduk. Hobbs (2004) mengelompokkan penduduk

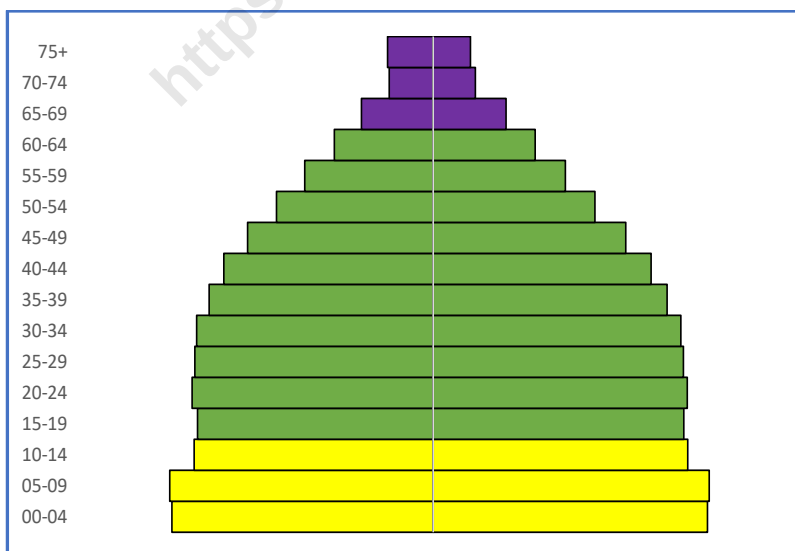
berdasarkan struktur umur menjadi 3 (tiga) kategori yaitu penduduk tua, penduduk muda, dan penduduk intermediate.

Penduduk dikatakan penduduk 'tua' jika yang usianya 65 tahun ke atas lebih dari 10 persen, penduduk muda yaitu apabila penduduk yang berusia 0-14 tahun lebih dari 40 persen, sedangkan apabila penduduk usia 0-14 tahun kurang dari 40 persen dan usia 65 tahun ke atas kurang dari 10 persen disebut sebagai penduduk antara muda dan tua (intermediate).



**Gambar 22. Piramida Penduduk Sumatera Selatan, 2010**

Sumber : Diolah dari data hasil SP2010



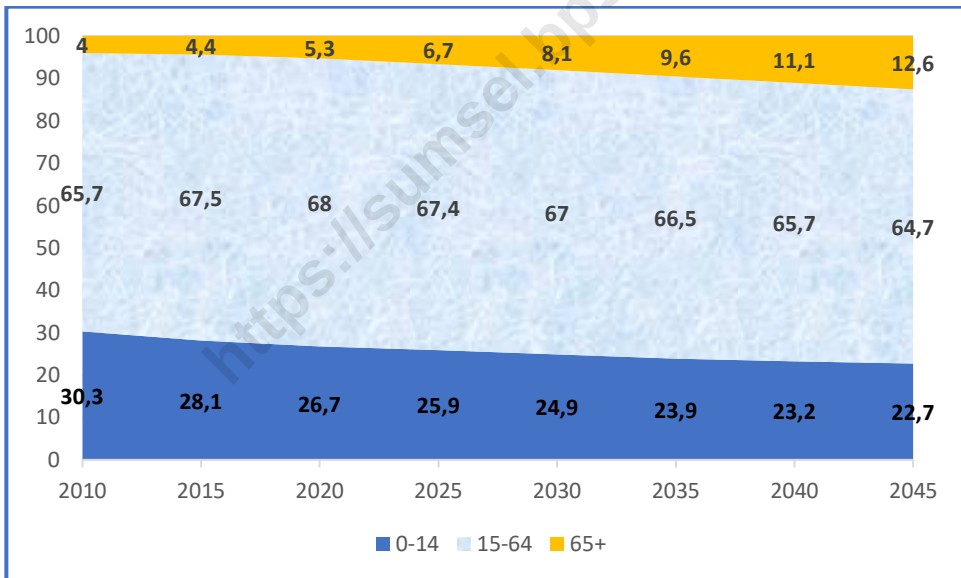
**Gambar 23. Piramida Penduduk Sumatera Selatan, 2020**

Sumber : Diolah dari data hasil SP2020

Struktur umur penduduk Sumatera Selatan tahun 2010 dan 2020 masih terkategori penduduk 'antara muda dan tua' atau lazim disebut intermediate. Dalam piramida penduduk struktur umur penduduk ini termasuk piramida konstrktif. Piramida penduduk terdiri atas 3 (tiga) yaitu ekspansif (penduduk muda), konstrikatif (antara muda dan tua) dan stasioner (penduduk tua).

Piramida penduduk Sumatera Selatan tahun 2010 dan 2020 memperlihatkan struktur umur penduduk Indonesia antara 'penduduk muda dan penduduk tua' atau disebut intermediate, dimana proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) Sumatera Selatan di bawah 40 persen sedangkan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) kurang dari 10 persen. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dan 2020 tersebut terjadi kenaikan proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sedangkan penduduk usia muda (0-14 tahun) mengalami penurunan.

Pada publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 yang diterbitkan BPS, *dependency ratio* Sumatera Selatan pada mulanya mengalami penurunan menjadi di bawah 50, dimana Sumatera Selatan mengalami bonus demografi. Bonus Demografi yang saat ini sedang terjadi diprediksi akan berakhir pada sekitar tahun 2035 yang ditandai dengan nilai *dependency ratio* penduduk Sumatera Selatan menjadi di atas 50. Kenaikan nilai *dependency ratio* ini disebabkan kenaikan proporsi jumlah penduduk lansia di Sumatera Selatan.



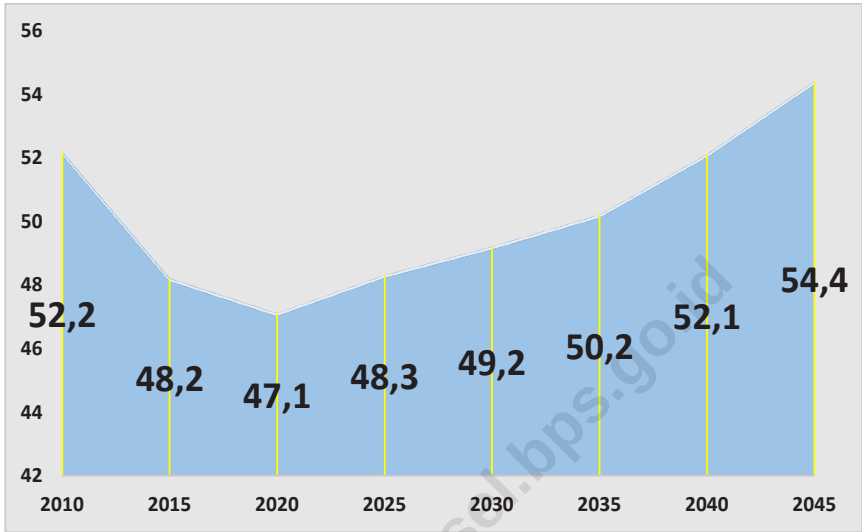
**Gambar 1.24. Piramida Penduduk Sumatera Selatan, 2020**

Sumber : SP 2010, SUPAS 2015, SP2020 dan Proyeksi Penduduk 2010

Ketika bonus demografi usai atau mengalami penurunan, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan mengalami fase penuaan penduduk (*ageing population*). Fenomena ini kemungkinan akan juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan setelah tahun 2035 dimana *dependency ratio* penduduk Sumatera Selatan kembali menjadi di atas 50.

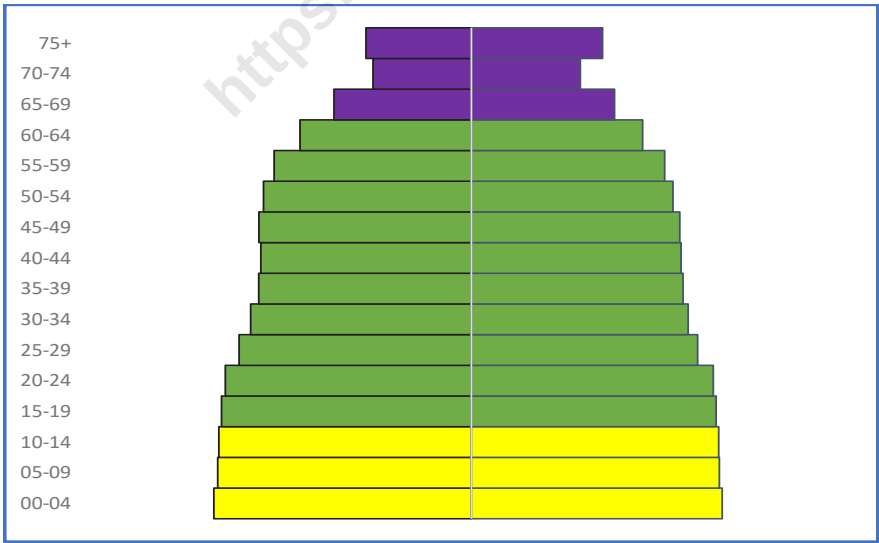
Gambar 25 menunjukkan bahwa Sumatera Selatan telah berhasil menurunkan kelahiran dan meningkatkan umur harapan hidup, dimana *dependency ratio* Sumatera Selatan mencapai titik terendah di tahun 2020, dan kemudian pada tahun 2025 sudah terlihat mulai meningkat disebabkan kenaikan proporsi penduduk lansia. Periode 2020-2025 ini merupakan jendela

peluang (*Windows of Opportunity*) yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Sumatera Selatan karena ketika tahun 2035, penduduk Sumatera Selatan akan menjadi penduduk tua yang didominasi lansia. Sebelum bonus demografi menutup, diperlukan langkah persiapan agar lansia di masa mendatang tidak menjadi beban pembangunan dan menyebabkan stagnasi



Gambar 25. *Dependency Ratio Sumatera Selatan, 2010-2045*

Sumber : SP 2010, SUPAS 2015, SP2020 dan Proyeksi Penduduk 2010 (data diolah)



Gambar 26. *Piramida Penduduk Sumatera Selatan, 2040*

Sumber : Diolah dari data proyeksi hasil SP2010

ekonomi. Ketika menjadi tua kapasitas fisik, preferensi, dan kebutuhan individu akan berubah seiring dengan bertambahnya usia (Lisenkov dkk, 2012). Namun sisi positifnya, Prettner (2012) mengklaim bahwa ada interaksi positif antara penuaan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Prettner (2012), individu yang lebih tua cenderung menabung lebih banyak.

Bonus Demografi di Sumatera Selatan diperkirakan akan menutup di tahun 2030, dan Sumatera Selatan diperkirakan akan menjadi penduduk 'tua' di tahun 2040. Hal ini karena pada tahun 2040 proporsi penduduk tua di Sumatera Selatan akan berada di atas 10 persen. Hal ini akan bisa membawa konsekuensi sosial ekonomi akibat penduduk yang menua. Penduduk lansia di tahun 2040 adalah yang saat ini merupakan usia kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang terarah serta terfokus sesuai kelompok umur yaitu strategi dan kebijakan terkait usia anak, usia kerja atau produktif dan usia tua yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

## G. Kesimpulan

1. Penduduk Sumatera Selatan mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya melambat
2. Sebaran penduduk masih belum merata, masih terkonsentrasi di Kota Palembang (hampir seperlima penduduk Sumsel berada di Kota Palembang). Kontribusi penduduk Kota Palembang tahun 2020 meningkat dibanding 2010.
3. Belum semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami bonus demografi. Berdasarkan hasil SP2020 terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota di Sumsel belum mengalami bonus demografi yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Prabumulih dan Kabupaten Pali.
4. Sebagian besar kabupaten/kota di Sumsel pada periode bonus demografi. Agar dapat memaksimalkan manfaat bonus demografi perlu rancangan kebijakan pada 3 (tiga) kategori usia Sumsel yaitu anak, produktif dan lansia

## DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M. (2005). *Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ekonomi Kependudukan*. Depok : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Adioetomo, S.M. dan Pardede, E.L. (2018). *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: Rajawali Pers
- Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), & United Nations Population Fund (UNFPA). 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2022. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*. Palembang : BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2022. *Sumatera Selatan Dalam Angka 2022*. Palembang : BPS
- Bloom, D.E & Williamson (1998). *Demographic Transitions and Economics in Emerging Asia*. The World Bank Economics Review, 12(3),419-455
- Kuznets, Simon (1955). *Economic Growth and Income Inequality*. The American Economic Review, 45(1), 1-28
- Prettner, Klaus (2012). *Population Ageing and Endogeneous Economic Growth*. Journal of Population Economics, Cambridge.
- Todaro,M.P.,&Smith, S.C. (2011). *Economic Development (11<sup>th</sup> ed)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Williamson, J.G. (2001). *Demographic Change, Economic Growth and Inequality*. In Birdsall, N., Kelly, A. C., & Sinding, S. W. (eds), *Population Matters*. New York : Oxford University Press





2

# Profil Anak

- A. Anak dan bonus demografi
- B. Struktur Pendudukan dan Persebaran Anak di Indonesia
- C. Pendidikan anak
- D. Kesehatan anak
- E. Pekerja Anak
- F. Perkawinan Anak
- G. Kesimpulan





# Profil Anak

## A. Anak Dalam Bonus Demografi

Bonus Demografi merupakan salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk menurut umur. Fenomena transisi demografi ini terjadi karena berkurangnya angka kelahiran yang dibarengi oleh tingginya angka kematian dalam jangka panjang. Pada saat terjadi penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang, akan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk berusia muda ( $< 15$  tahun), akan tetapi di satu sisi jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) akan meningkat secara drastis sebagai akibat angka kelahiran yang tinggi di masa lalu. Di sisi lain jumlah penduduk dengan umur di atas 64 tahun akan meningkat secara perlahan dan kemudian meningkat cepat akibat terjadinya peningkatan usia harapan hidup. Pada saat jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan di atas 64 tahun) kondisi seperti ini yang disebut dengan kondisi Bonus Demografi (Rusli, Toersilaningsih, Meirida, Kurniawan, & Setiawan, 2015).

Parameter yang digunakan dalam menilai fenomena Bonus Demografi adalah *Dependency Ratio* atau Rasio Ketergantungan, yaitu merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan di atas 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Angka Rasio Ketergantungan ini menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Pada saat angka rasio ketergantungan rendah, kondisi ini memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif hanya menanggung sedikit penduduk usia nonproduktif.

Angka rasio ketergantungan yang rendah akan berimplikasi pada perekonomian negara yang dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan produktivitas sebuah negara. Kondisi ini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif yang akan mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi ke butuhan konsumsi dan meningkatkan tabungan mereka yang pada akhirnya dapat dimobilisasi menjadi investasi (Maryati, 2015). Jadi teori Bonus Demografi pada dasarnya merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara dinamika kependudukan dengan ekonomi. Semakin sedikit jumlah usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Idealnya pertumbuhan ekonomi secara maksimal akan terjadi pada saat Rasio Ketergantungan berada di bawah angka 50. Kondisi ini juga disebut sebagai *the window of opportunity* (jendela kesempatan) (Kominfo, 2015).

Adioetomo (2005) menyatakan bahwa perubahan dinamika demografi di mana tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja akan memengaruhi *Gross Domestic Product* per kapita sebuah negara yang juga akan berdampak terhadap jumlah

penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja akan meningkatkan total output; akan meningkatkan tabungan masyarakat; tersedianya sumber daya manusia dalam proses pembangunan ekonomi. Kondisi ini hanya akan terjadi sehingga Bonus Demografi betul-betul dapat dimanfaatkan jika sebuah negara memenuhi beberapa prasyarat, yaitu:

- a. Pertambahan penduduk usia kerja dibarengi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari segi kesehatan maupun pendidikan dan keterampilan serta peningkatan *soft skill* sehingga mereka memiliki daya saing secara global.
- b. Penduduk usia kerja dapat diserap oleh pasar kerja yang tersedia
- c. Tersedianya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia Jika prasyarat di atas tidak dapat terpenuhi yang akan terjadi adalah kebalikan dari Bonus Demografi (*Demographic Dividend*) yaitu beban demografi (*Demographic Burden*), di mana banyaknya jumlah penduduk produktif yang tidak dapat terserap oleh pasar kerja akan menjadi beban ekonomi sebuah negara. Pada kondisi ini tingkat pengangguran akan tinggi, sehingga penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja.

Setiap negara hanya akan merasakan satu kali Bonus Demografi yang hanya akan terjadi selama satu atau dua dekade saja. Hal ini disebabkan karena seiring dengan berjalannya waktu, penduduk usia produktif akan bertransformasi menjadi penduduk usia nonproduktif dan jumlahnya akan terus bertambah. Hal ini akan berimplikasi pada rasio beban ketergantungan yang akan meningkat dengan cepat. Beberapa negara di dunia telah mampu memaksimalkan Bonus Demografi yang mereka miliki sehingga saat ini mereka muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura.

Selanjutnya Maryati (2015) memaparkan, jika dilihat dari *ratio dependency*, tampak bahwa tingkat ketergantungan penduduk Indonesia memperlihatkan tren yang menurun, di mana pada 1970an nilai *dependency ratio* Indonesia berkisar antara 85-90 per 100 dan pada 2000 menurun hingga ke level 54-55 per 100. Hasil Sensus Penduduk 2020 memperlihatkan proporsi penduduk usia produktif yang besar di mana Indonesia mencapai 69,28 persen, begitu juga Sumatera Selatan yang mencapai 67,99 persen dari total penduduknya.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Dependency Ratio Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2020**

| Provinsi                  | Jumlah Penduduk (Jiwa) |           |           |           | Dependency Ratio |       |
|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------|
|                           | 0-4                    | 5-9       | 10-14     | 15-19     | 0-14             | Total |
| (1)                       | (2)                    | (3)       | (4)       | (5)       | (6)              | (7)   |
| Aceh                      | 490.875                | 485.318   | 484.921   | 476.741   | 41,19            | 48,71 |
| Sumatera Utara            | 1.380.042              | 1.359.027 | 1.331.990 | 1.312.750 | 40,80            | 48,32 |
| Sumatera Barat            | 456.701                | 458.602   | 491.656   | 491.168   | 37,39            | 47,09 |
| Riau                      | 610.635                | 602.744   | 575.157   | 565.145   | 40,91            | 46,24 |
| Jambi                     | 313.535                | 312.226   | 304.473   | 302.566   | 37,91            | 44,61 |
| Sumatera Selatan          | 771.284                | 776.895   | 710.807   | 700.306   | 39,24            | 47,09 |
| Bengkulu                  | 175.561                | 173.886   | 172.247   | 172.144   | 37,56            | 44,77 |
| Lampung                   | 775.885                | 779.011   | 734.716   | 732.269   | 37,08            | 45,87 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 119.792                | 117.452   | 125.800   | 126.577   | 35,59            | 42,71 |
| Kepulauan Riau            | 190.488                | 190.803   | 173.608   | 172.485   | 38,62            | 43,71 |



Besarnya jumlah penduduk usia produktif di Sumatera Selatan tersebut menyebabkan semakin kecilnya nilai angka ketergantungan menjadi 47,09. Hal ini berarti 100 penduduk usia produktif menanggung 47,09 orang penduduk tak produktif. Sedangkan angka *dependency ratio* untuk usia 0-14 tahun sebesar 39,24 persen yang menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif menanggung 39,24 penduduk tak produktif yang berusia 0-14 tahun. Menurut *United Nations* (PBB) transisi demografi yang terjadi pada beberapa dekade terakhir di Indonesia akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menikmati Bonus Demografi (*demographic dividend*) pada periode 2020-2035. Kecenderungan *dependency ratio* yang semakin kecil ini akan berlanjut hingga 2030, dan menciptakan Bonus Demografi bagi Indonesia. Sementara itu diperkirakan setelah 2030 kecenderungan *dependency ratio* akan naik kembali karena jumlah lansia meningkat.

Melimpahnya jumlah penduduk muda di berbagai wilayah provinsi Indonesia telah menciptakan Bonus Demografi. Bonus Demografi di beberapa provinsi di Pulau Sumatera tersebut dapat dilihat dengan parameter *dependency ratio* yang cukup rendah, yaitu mencapai rata-rata 45. Yang berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya menanggung sekitar 45 penduduk tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas). Perhatikan data *dependency ratio* menurut provinsi di Indonesia pada tabel 1 di atas.

Bonus Demografi yang terjadi pada 2020 hingga 2035 yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi Bonus Demografi tentu mendatangkan keuntungan yang besar. Dengan Bonus Demografi berarti Indonesia yang mendapati kondisi di mana jumlah angkatan kerja yang melimpah-ruah. Angkatan kerja dengan jumlah yang besar tersebut jika dapat dikelola dengan baik yang akan mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negara. Kuncinya terletak pada peningkatan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing pada pasar tenaga kerja global.

Tahapan bonus demografi umumnya didahului dengan transisi demografi, yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan angka kematian. *Opportunity window* di Sumatera Selatan terjadi 2020, merepresentasikan dari *dependency ratio* di bawah 50. Bayi-bayi yang lahir di tahun itu hendaknya disertai dengan jaminan kesehatan, kualitas pengasuhan, serta pendidikan yang layak. Hal tersebut dikarenakan, pada tahun 2034, bayi-bayi tersebut akan berusia 14 tahun dan bersiap memasuki angkatan kerja produktif atau melanjutkan pendidikannya. Sedangkan anak yang berusia sekolah atau remaja (<20 tahun) juga perlu dipersiapkan dengan baik karena 14 tahun mendatang, mereka akan berusia 25-35 tahun dan akan memiliki peran yang dominan di bidang ketenagakerjaan. Sebagai dampaknya, proporsi penduduk yang memasuki usia angkatan kerja mulai meningkat. Bonus demografi terancam tidak dapat dimanfaatkan secara optimal apabila tingkat kelahiran belum dapat diturunkan. Selain itu, proporsi penduduk lansia juga mulai meningkat sebagai akibat peningkatan status kesehatan masyarakat dan penurunan tingkat kematian.

Profil anak dari hasil Sensus Penduduk 2020 akan membahas struktur penduduk dan persebaran anak, kemudian Pendidikan anak di Sumatera Selatan. Selain itu, didapatkan pula kesehatan anak Sumatera Selatan di saat pendataan SP2020. Anak seharusnya menikmati masa-masa tumbuh kembangnya seperti hak sekolah, bermain, dan mendapatkan hak perlindungan, namun ada kondisi tertentu yang memaksa anak untuk masuk ke dunia ketenagakerjaan. Hal tersebut akan dikupas dalam bahasan Pekerja Anak. Hal lainnya yang akan dibahas dalam profil anak Hasil SP2020 adalah Perkawinan Anak di Sumatera Selatan.

## B. Struktur Penduduk dan Persebaran Anak

### 1. Definisi Penduduk Usia Anak

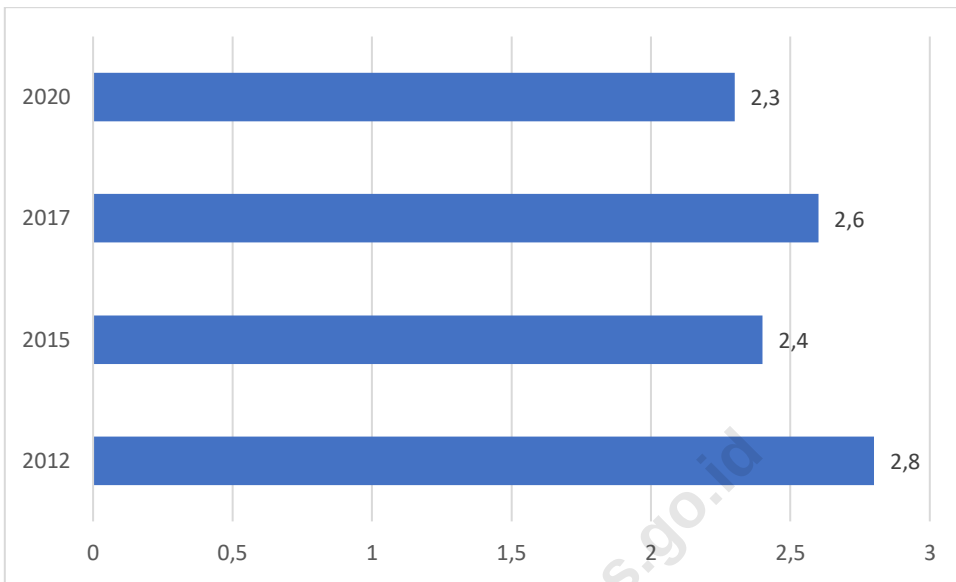
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian perlu jaminan agar setiap anak kehidupannya bisa berjalan dengan normal yang karena itulah adanya payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat terutama kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas maka UU yang telah berlaku kurang lebih 12 tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.

Anak sebagai bagian dari modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sekaligus generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sesuai dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial dibawah usia 18 tahun. Sehingga orang dewasa berkewajiban untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi anak dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Batasan anak yang digunakan dalam penulisan ini dimulai dari anak yang masih bayi (penduduk berumur di bawah 1 tahun) dan belum berusia 18 tahun (SP2020).

### 2. Komposisi Dan Pertumbuhan Penduduk Usia Anak

Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya. Dalam jangka panjang penduduk di suatu negara dengan TFR 2,1 akan mengalami pertumbuhan nol (*zero population growth*). Angka tidak tepat 2,0 karena memperhitungkan faktor mortalitas dari bayi yang dilahirkan.

Program Keluarga Berencana di Indonesia dimulai secara intensif sejak tahun 1970 sejalan dengan berdirinya lembaga BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Dibawah pemerintahan Orde Baru, program KB menjadi prioritas dan unggulan yang dilaksanakan dengan gegap gempita. Sebagai hasilnya, angka TFR yang sebelumnya mencapai 5,6 tahun 1970 menurun menjadi 2,8 (SDKI tahun 1997). Lalu laju pertumbuhan penduduk juga menurun dari 2,32 persen menjadi 1,3 persen. Akibatnya menurut perkiraan para ahli program KB masa Orde Baru bisa menghindari pertambahan sekitar 80 juta penduduk, karena seharusnya pada tahun 2000 Indonesia diproyeksikan akan memiliki 285 juta, tetapi bisa ditekan menjadi 205 juta jiwa.



**Gambar 1. Perkembangan TFR Sumatera Selatan, 2012-2020**

Sumber : BPS (Diolah)

Setelah otonomi daerah di tahun 2001 TFR Indonesia bisa diturunkan menjadi 2,6 yaitu hasil dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002. Akan tetapi sampai dengan SDKI 2007 dan SDKI 2012, TFR tetap bertahan (stagnan) pada posisi 2,6 (bertahan sekitar 15 tahun). Padahal visi BKKBN 2010 – 2014 adalah menuju penduduk tumbuh seimbang tahun 2015.

Klasifikasi didasarkan pada: Gubhaju, Bhakta. (2007). *"Fertility Decline in Asia: Opportunities and Challenges"*. *The Japanese Journal of Population*, Vol.5, No.1 (March 2007) membedakan TFR pada kelas *Critically Low* dimana TFR lebih kecil atau sama dengan 1,5, klasifikasi *low* dimana TFR bernilai 1,6-2,1, klasifikasi *near replacement* (2,2-2,9), *transitional* (3,0-4,9), dan klasifikasi *high* ketika TFR bernilai lebih besar atau sama dengan 5,0. Berdasarkan gambar 2, Sumatera Selatan berada pada klasifikasi *near replacement* selama 2015-2020 seperti pada gambar 3.

Penurunan TFR juga merupakan salah satu target Indonesia dalam SDGs yang tertuang dalam Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

### 3. Potensi Anak Indonesia Dari Sisi Jumlah

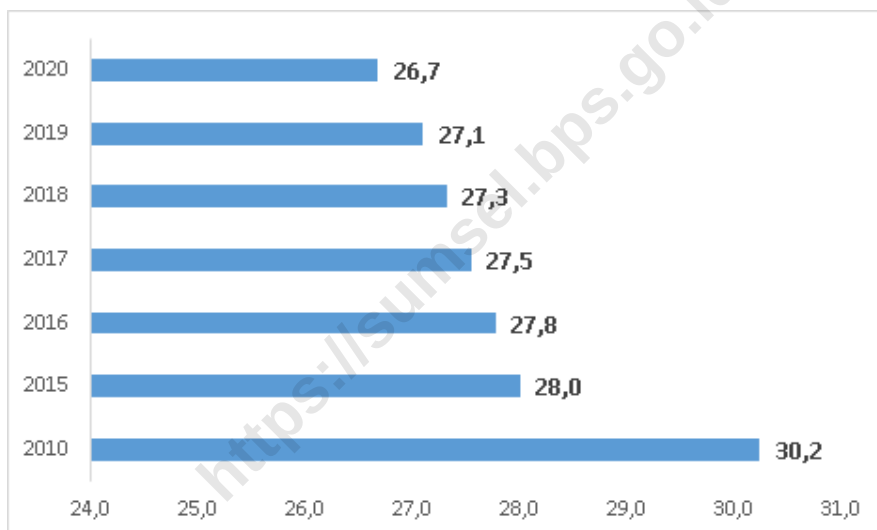
Situasi anak-anak dan perempuan di Indonesia telah membaik secara substansial selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tren nasional masih menyisakan kesenjangan yang signifikan di seluruh wilayah geografis dari berbagai kelompok sosial. Karena ukuran negara yang luas, kesenjangan ini sebanding dengan jumlah anak yang juga besar.

Tantangan ini diperburuk oleh geografi. Populasi tersebar di lebih dari 17.000 pulau yang mencakup jarak lebih dari 5.000 km dari barat ke timur. Oleh karena itu, mengatasi kesenjangan ini adalah inti dalam mewujudkan hak-hak anak di Indonesia.

Potensi anak Indonesia dari sisi jumlah dilihat dari populasi. Indonesia sebagai negara dengan populasi anak terbesar keempat di dunia. Sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Jumlah ini setara dengan 85 juta anak-anak. Komposisi anak di Indonesia adalah sekitar 30,1 persen, dimana lebih dari separuh anak Indonesia terkonsentrasi pada 5 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Banten.

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan TFR di Sumatera Selatan, Hasil SDKI 2012, TFR Sumatera Selatan sebesar 2,8, dan menurun menjadi 2,5 pada tahun 2015 Hasil dari SUPAS 2015. Namun dengan SDKI 2017 yang terakhir dilaksanakan, TFR Sumatera Selatan mengalami kenaikan menjadi 2,6. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020, didapatkan hasil TFR Sumsel berhasil pada posisi 2,3 atau mendekati 2,1.

Berdasarkan komposisi penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2020 berbentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah.



**Gambar 2. Perkembangan Persentase Kelompok Anak Usia 0-14 Tahun 2010, 2012-2020**

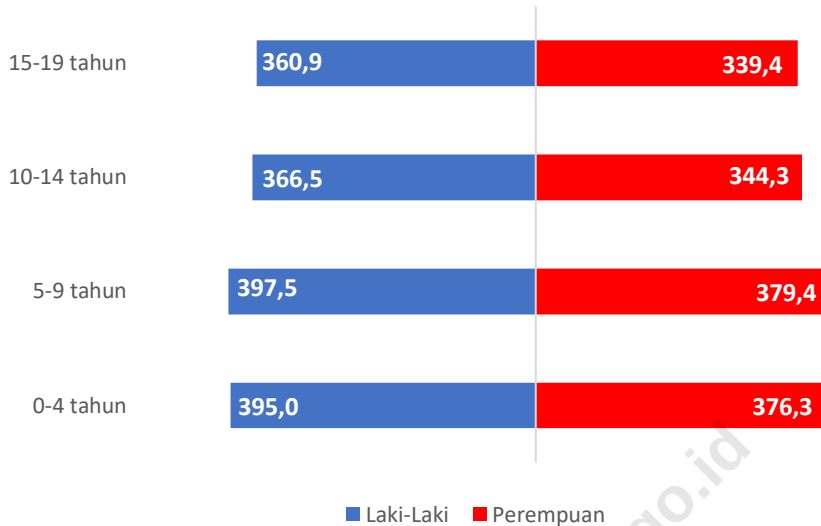
Sumber : BPS (Diolah)

#### 4. Anak Menurut Jenis Kelamin

Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Sumatera Selatan sebanyak 4,32 juta orang, atau 51,02 persen dari penduduk Sumatera Selatan. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Sumatera Selatan sebanyak 4,15 juta orang, atau 48,98 persen dari penduduk Sumatera Selatan. Rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Selatan sebesar 104, yang artinya terdapat 104 laki-laki per 100 perempuan di Sumatera Selatan pada tahun 2020.

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), kelompok usia anak dibagi menjadi kelompok Balita (0-4 tahun), Anak (5-9 tahun), Remaja dibagi atas Remaja early (0-14 tahun), Remaja middle (15-17 tahun), Remaja late (18-19 tahun). Pada tahun 2010 sebanyak 39,43 persen menjadi 34,95 persen di tahun 2020.





**Gambar 3. Piramida Kelompok Umur Anak, 2020**

Sumber : BPS (Diolah)

Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur anak. Secara rata-rata jumlah laki-laki akan lebih banyak daripada jumlah perempuan. Peningkatan kualitas anak perempuan menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan anak perempuan agar memiliki kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam budayanya. Pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan promosi kesehatan melalui penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

## 5. Indeks Modal Manusia 2020 untuk Indonesia

Laporan Indeks Modal Manusia 2020 yang dirilis oleh Grup Bank Dunia mencakup data kesehatan dan pendidikan dari 174 negara – meliputi 98 persen dari seluruh populasi dunia hingga bulan Maret 2020 menunjukkan data dasar sebelum pandemi untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak. Analisis tersebut menunjukkan bahwa sebelum terjadinya pandemi, telah banyak negara yang mencapai kemajuan stabil dalam membangun modal manusia bagi anak-anak, di mana kemajuan terbesar dicapai oleh negara-negara berpenghasilan rendah. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai ini, dan bahkan sebelum adanya dampak dari pandemi, seorang anak yang lahir di suatu negara secara umum dapat diharapkan untuk mencapai hanya 56 persen dari potensi modal manusianya, dihitung relatif terhadap suatu tolok ukur ditempuhnya pendidikan dan kesehatan yang lengkap.

Di antara tahun 2010 dan 2020, nilai Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index - HCI*) di Indonesia meningkat dari 0,50 menjadi 0,54. Ini berarti bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini akan mencapai 54 persen dari produktifitas maksimalnya jika memenuhi tolok ukur pendidikan dan kesehatan yang lengkap.

Selama satu dekade terakhir, kemajuan ini digerakkan terutama oleh penurunan angka *stunting*, yang merupakan kabar gembira, karena tingkat gizi yang cukup sangatlah penting bagi anak-anak untuk dapat membangun modal manusianya. Sementara itu, meskipun angka kelangsungan hidup orang dewasa mengalami peningkatan, angka kematian orang dewasa sebelum waktunya masih tetap tinggi, menandakan perlunya memperkuat akses dan

kualitas layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, di satu sisi akses kepada pendidikan telah mengalami peningkatan, sementara di sisi lain pencapaian siswa suatu cara untuk mengukur kualitas sekolah, mengalami penurunan, menandakan pentingnya untuk memperbaiki proses pembelajaran siswa.

Selama satu dekade terakhir, kemajuan ini digerakkan terutama oleh penurunan angka stunting, yang merupakan kabar gembira, karena tingkat gizi yang cukup sangatlah penting bagi anak-anak untuk dapat membangun modal manusianya. Sementara itu, meskipun angka kelangsungan hidup orang dewasa mengalami peningkatan, angka kematian orang dewasa sebelum waktunya masih tetap tinggi, menandakan perlunya memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, di satu sisi akses kepada pendidikan telah mengalami peningkatan, sementara di sisi lain pencapaian siswa – suatu cara untuk mengukur kualitas sekolah, mengalami penurunan, menandakan pentingnya untuk memperbaiki proses pembelajaran siswa.

Melihat kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini dalam hal Indeks Modal Manusia, Indonesia perlu untuk melanjutkan investasinya pada layanan utama pendidikan, kesehatan, dan gizi, yang meliputi fokus pada dimensi kualitas dan keadilan (*equity*) yang tetap menjadi pekerjaan yang terus berlangsung.

## 6. Orang tua dalam Tumbuh Kembang Anak

Terwujudnya keadaan tersebut memicu pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan rakyat. Namun, sampai kini syarat-syarat untuk memetik bonus demografi sering dilupakan. Perubahan struktur umur yang terlalu cepat ini belum diikuti dengan peningkatan kualitas modal manusianya. Namun, peluang untuk itu terbuka lebar dengan upaya sungguh-sungguh untuk menciptakan modal manusia yang sehat, cerdas, produktif, berkarakter, dan berdaya saing. Peranan ibu akan sangat menentukan melalui asuhan berkualitas dari para ibu, dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, di mana kemampuan kognitif anak terbentuk sejak janin dalam kandungan. Kemudian ibu juga akan mengawal tumbuh kembang anak sampai remaja dan siap memasuki dunia kerja serta menggantikan profil angkatan kerja saat ini yang belum menguntungkan. Peranan ibu dalam pembentukan karakter anak di dalam keluarga sangat menentukan keberhasilan anak di kemudian hari.

## C. PENDIDIKAN

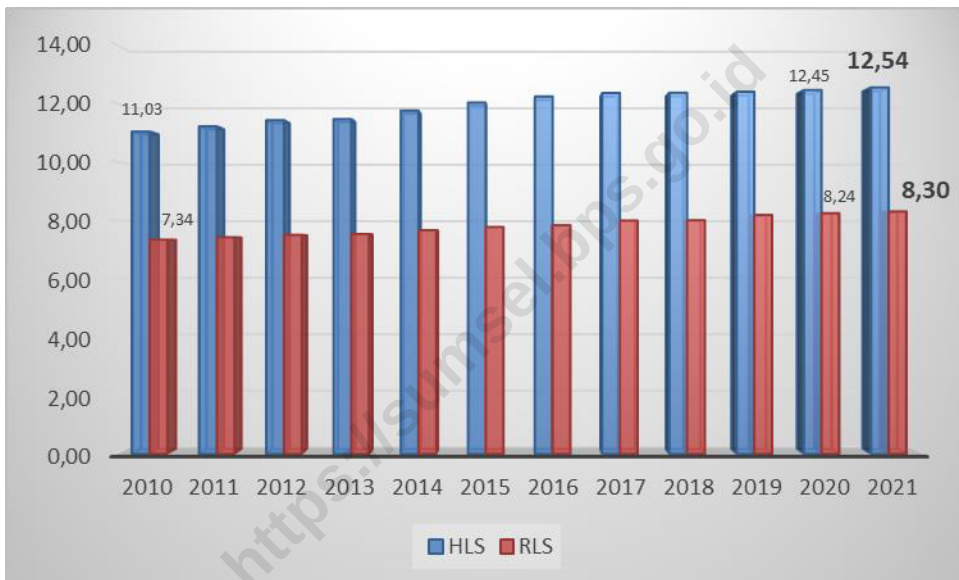
Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan nasional 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

### 1. Target dan Capaian RLS dan HLS

Peningkatan kualitas SDM merupakan prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, dilaksanakan melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing. Pemerintah menargetkan capaian RLS dan HLS di tahun 2020-2021 masing-masing sebesar 9,18 dan 13,89 tahun sedangkan capaian RLS nasional 8,54 tahun dan HLS nasional sebesar 13,08 tahun. Capaian RLS Sumatera Selatan tahun 2021 baru mencapai 8,30 tahun dan HLS Sumatera Selatan 2021 mencapai 12,54 tahun.

Tren HLS dan RLS memiliki kecenderungan terus naik ini mengindikasikan bahwa program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan telah berada di *track* percepatan yang benar. Langkah selanjutnya adalah mempertahankan program dan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan angka HLS dan RLS sesuai target dalam RPJMN dan RPJMD, serta menerapkan strategi ke dalam program-program yang akan disusun sebagai upaya mengatasi kendala yang ada di sektor pendidikan.



**Gambar 4. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Selatan, 2010-2021**

Sumber : BPS (Diolah)

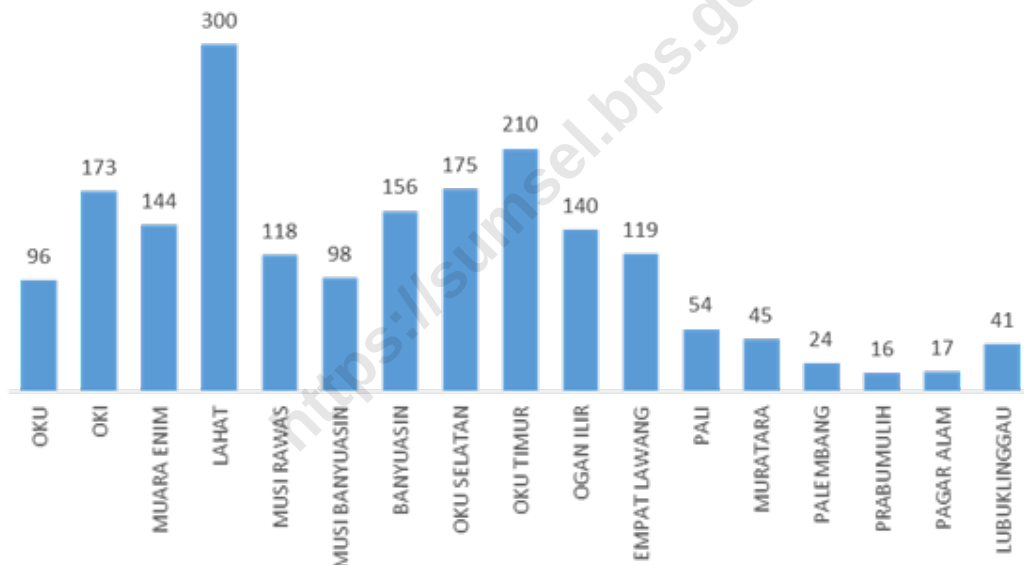
## 2. Akses Pendidikan di Indonesia

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 45 pasal 31: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Masih banyak penduduk Indonesia usia 16 tahun ke atas yang memiliki pendidikan kurang dari 9 tahun, dan ini tersaji dari data BPS yang menunjukkan bahwa hanya 20,82 persen penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMP/MTS sebesar

20,82 persen. Padahal, pemerintah berharap dengan memperoleh pendidikan minimal 9 tahun dapat mengembangkan potensi setiap warga negara untuk dapat mengenyam ke pendidikan lanjutan yang lebih tinggi sehingga diindikasikan bahwa Program Wajib Belajar 9 Tahun belum efektif keberhasilannya.

Ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar di Indonesia sudah semakin merata, tetapi untuk pendidikan SMP dan SMA masih memiliki ketimpangan sedang dan tinggi antar provinsi. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tumbuh cukup pesat. Akan tetapi jika ditelisik dari Data Survei Potensi Desa 2020, Masih ada desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas pendidikan di daerah setempat. Pada Gambar 5 mengilustrasikan bahwa pada tingkat sekolah SMP dari 3289 desa masih terdapat 1926 desa yang masih belum memiliki sekolah setingkat SMP. Hal ini menjadi salah satu penyebab stagnannya RLS Sumatera Selatan yang berada di angka 8 tahun pada beberapa tahun terakhir, sedangkan target RPJMN mencapai 9,18 tahun.

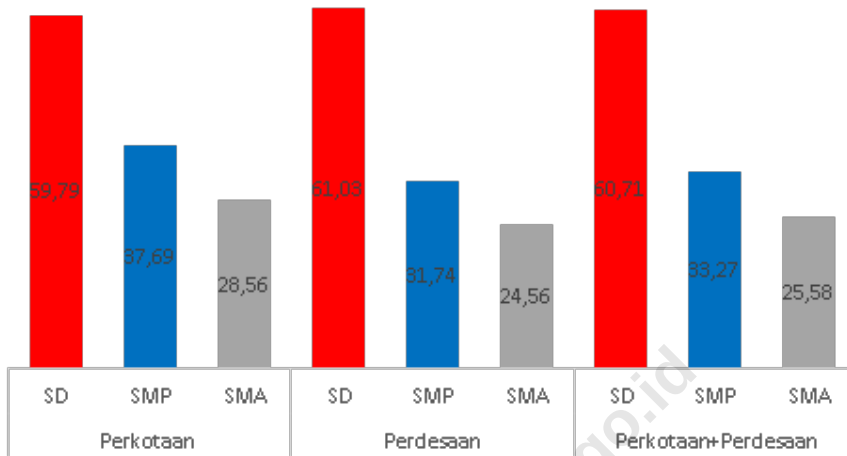


**Gambar 5. Jumlah Desa Yang Belum Memiliki SMP sederajat di Sumatera Selatan (unit), 2020**

Sumber : BPS (Diolah)

Keterbatasan akses terutama akses secara ekonomi dalam pendidikan merupakan penghalang besar dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Keterbatasan ekonomi menyebabkan anak dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah tidak dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan Menengah.

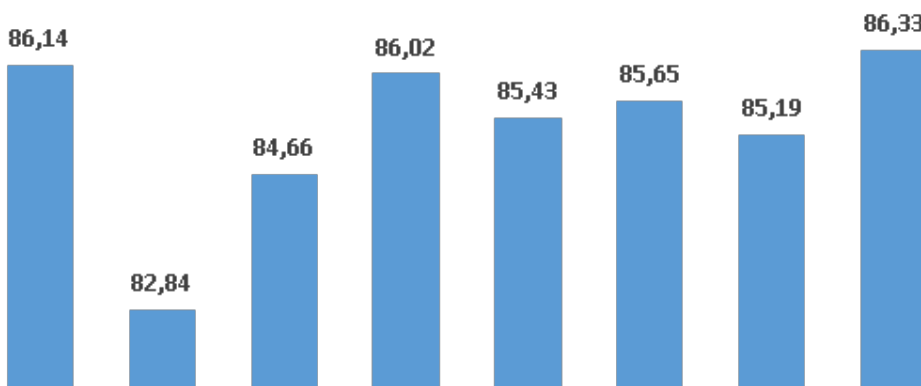
Anak-anak yang menjadi sasaran PIP ini adalah anak-anak usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan berupa pemberian dana bantuan kepada peserta didik. Implementasi PIP merupakan langkah nyata jangka panjang yang bisa mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan anak. Gambar 6 menunjukkan persentase



**Gambar 6. Anak Penerima Program Indonesia Pintar Menurut Tempat Tinggal Sumatera Selatan (persen), 2020**

Sumber : BPS (Diolah)

anak-anak yang menerima PIP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Selatan tahun 2020. Dampak penerimaan PIP secara signifikan meningkatkan angka partisipasi anak bersekolah pada usia 5-17 tahun sebesar 85,19 pada tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan menjadi 86,3 persen di tahun 2020 (Gambar 7).



**Gambar 7. Anak Sumatera Selatan Usia 5-12 Tahun Yang Berstatus Masih Sekolah (persen), 2011-2020**

Sumber : BPS (Diolah)

### 3. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

IPM merupakan indeks untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan komponen dasar meliputi kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. UNDP juga memperkenalkan indeks untuk mengukur perkembangan gender di suatu wilayah yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Pentingnya pembangunan manusia yang diarahkan untuk mengedepankan kualitas SDM tanpa membedakan gender agar terwujud kesejahteraan masyarakat.

Diskriminasi *de jure* dalam konteks pendidikan berkaitan erat dengan aturan yang membedakan kaum perempuan dan laki-laki dalam memasuki bidang-bidang pendidikan tertentu. Secara *de jure*, tidak ada diskriminasi gender dalam pendidikan karena setiap warga negara berhak atas pendidikan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akses pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan outcome pendidikan. Menurut UNESCO dalam *Education Indicators Technical Guidelines* salah satu indikator untuk mengukur outcome pendidikan ialah akses pendidikan yang diwakili oleh angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar.

Angka Partasipasi Sekolah (APS) menunjukkan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah di semua jenjang pendidikan. Jumlah APS SD/MI di kelompok umur 7-12 tahun yang hampir 100 persen, APS SMP/MTs di usia 13-15 tahun juga mengalami peningkatan dimana mendekati 100 persen, akan tetapi APS SMA/MA masih jauh dari 100 persen (Tabel 3).

Ketimpangan gender dalam pendidikan di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa APS SMP di daerah perkotaan merepresentasikan bahwa partisipasi laki-laki pada kelompok umur 13-15 tahun lebih banyak daripada perempuan. Sebaliknya, di daerah perdesaan laki-laki kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun lebih sedikit partisipasi sekolah dikarenakan sebagian besar memilih untuk masuk ke dunia kerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya.

**Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal pada Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2021**

| Daerah Tempat Tinggal | APS Formal |        |       |       |
|-----------------------|------------|--------|-------|-------|
|                       | 5-6        | 7-12   | 13-15 | 16-18 |
| (1)                   | (2)        | (3)    | (4)   | (5)   |
| <b>Perkotaan</b>      |            |        |       |       |
| Laki-laki             | 42,76      | 99,97  | 98,44 | 76,19 |
| Perempuan             | 32,86      | 100,00 | 97,16 | 82,39 |
| Laki-laki+Perempuan   | 37,56      | 99,00  | 97,86 | 79,43 |
| <b>Pedesaan</b>       |            |        |       |       |
| Laki-laki             | 32,06      | 99,58  | 91,68 | 62,53 |
| Perempuan             | 42,90      | 99,28  | 94,23 | 68,24 |
| Laki-laki+Perempuan   | 37,59      | 99,43  | 93,00 | 65,29 |

Sumber : BPS (Diolah)



Partisipasi pendidikan yaitu kontribusi serta keikutsertaan penduduk usia sekolah dalam pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang orang tua terhadap nilai anak di dalam keluarga. Apabila Angka Partisipasi Murni (APM) menentukan penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai pada jenjang tersebut yang dinyatakan dalam persentase.

Pada jenjang SD, hampir seluruh penduduk yang bersekolah tepat waktu baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun pada jenjang pendidikan SMP, anak yang bersekolah di jenjang SMP tepat waktu di usia 13-15 tahun sebesar 75,47 persen di wilayah perkotaan dan sebesar 79,08 persen di wilayah perdesaan. Penduduk yang berada di wilayah perkotaan dan bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SMA di usia 16-18 tahun 62,61 persen dan di wilayah perdesaan sebesar 54,60 persen.

**Tabel 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal pada Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2021**

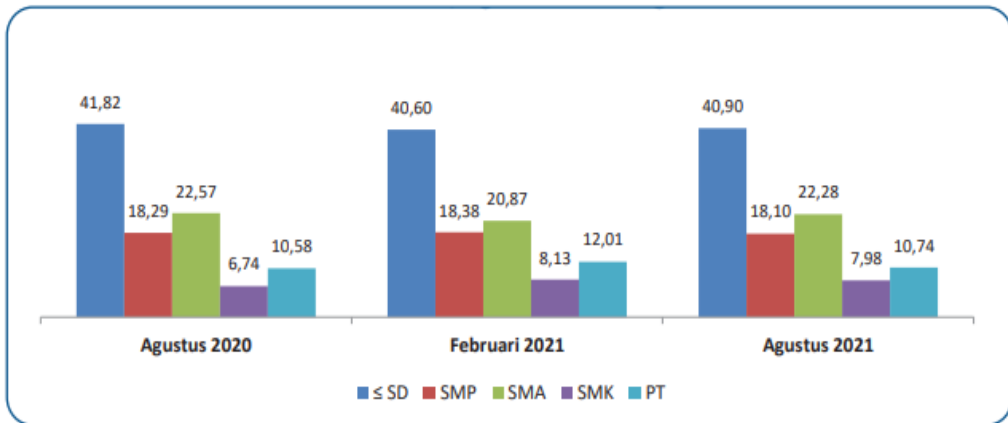
| Daerah Tempat Tinggal | APM Formal |       |       |
|-----------------------|------------|-------|-------|
|                       | SD         | SMP   | SMA   |
| (1)                   | (2)        | (3)   | (4)   |
| <b>Perkotaan</b>      |            |       |       |
| Laki-laki             | 96,80      | 74,47 | 62,61 |
| Perempuan             | 96,16      | 75,69 | 66,01 |
| Laki-laki+Perempuan   | 96,49      | 75,57 | 64,38 |
| <b>Perdesaan</b>      |            |       |       |
| Laki-laki             | 98,89      | 79,08 | 54,60 |
| Perempuan             | 98,75      | 80,84 | 62,20 |
| Laki-laki+Perempuan   | 98,82      | 80,00 | 58,16 |

Sumber : BPS (Diolah)

#### 4. Keselarasan Pendidikan dan Lapangan Kerja

Berkaca dari pendidikan pada Era Revolusi 4.0 yang menjadi suatu tantangan bagi seluruh masyarakat khususnya para pendidik dan pemerhati pendidikan. Era revolusi industri 4.0 bukanlah suatu hal mudah yang bisa di atasi dengan cara atau metode lama melainkan era yang memerlukan sesuatu yang baru yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan tinggi sesuai dengan yang diinginkan. Pendidikan yang terjadi pada era revolusi 4.0 merupakan masa pengetahuan (*knowledge*) yang mengalami peningkatan dan perkembangan yang luar biasa pesat.

Tingkat Pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 40,90 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 10,74 persen.



Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

**Gambar 8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020-2021**

Sumber : BPS (Diolah)

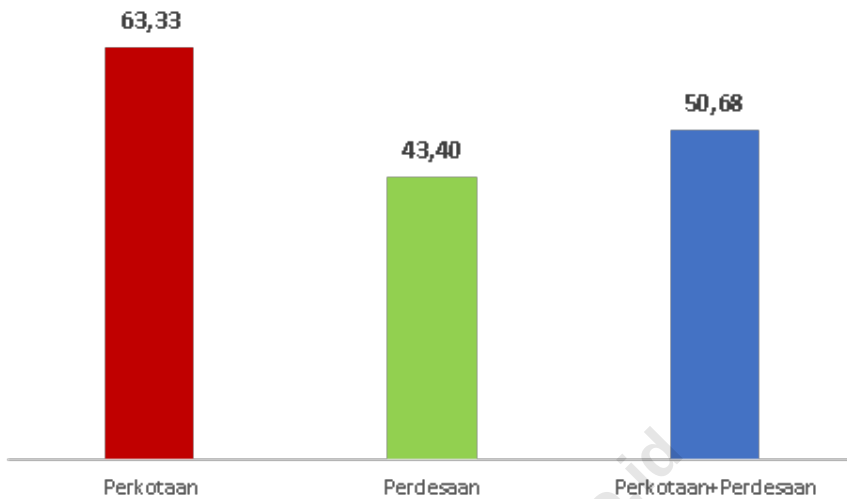
## 5. Pandemi COVID-19 dan Pendidikan di Indonesia

Corona Virus Disease atau yang dikenal COVID-19 telah menjadi perhatian dunia sejak tereteksi di Tiongkok akhir 2019. Hal tersebut mulai berdampak di Indonesia pada Maret 2020, sejak diumumkannya pandemi tersebut di negara kita. Adanya COVID-19 memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial tidak hanya pada Indonesia, akan tetapi terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin.

Indonesia memilih kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) sebagai solusi untuk menekan penyebaran virus. Kebijakan menjaga jarak sosial setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berdampak kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara luring menjadi kegiatan daring.

Menurut Korth et al (2009) menyatakan guru yang memiliki kesiapan dalam pembelajaran dalam kondisi apapun akan meningkatkan kualitas guru. Selain itu, kesiapan yang dimiliki seorang guru dalam menghadapi pembelajaran akan berpengaruh kepada keberhasilan program pendidikan di sekolah serta guru yang memiliki kesiapan yang baik akan membantu meningkatkan semangat belajar para murid.

Pembelajaran daring yaitu penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang massif dan luas sehingga pembelajaran daring dapat diselenggarakan dimana saja serta diikuti secara gratis maupun berbayar (Bilfaqih & Qomarudin, 2015). Selain itu, pembelajaran daring memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajaran dan memberikan metode pembelajaran yang efektif. Agar pembelajaran daring ini dapat berjalan efektif maka diperlukan persiapan oleh pihak sekolah dan orangtua wali murid. Pihak sekolah atau guru harus mempersiapkan diri dengan perangkat baik berupa laptop atau handphone serta paket internet. Sedangkan pihak orangtua mempersiapkan perangkat, paket internet, serta pendampingan terhadap anak-anaknya. Hal tersebut merupakan suatu kondisi yang memberatkan, Sebagaimana data Hasil SUSENAS 2020, proporsi individu yang menguasai memiliki telepon genggam hanya 60 persen di Sumatera Selatan.



**Gambar 9. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah, 2020**

Sumber : BPS (Diolah)

Data KPAI saat pengawasan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi (Juni 2020-Desember 2021) menemukan adanya peserta didik yang putus sekolah. Ada beberapa penyebab selain tidak mampu membayar SPP seperti harus bekerja membantu keluarga, menikah muda, serta masalah ekonomi. Angka putus sekolah tingkat dasar di Indonesia mencapai 10 kali lipat selama pandemi COVID-19 (KPAI, 2021).

## D. KESEHATAN

### 1. Tumbuh Kembang Anak Dimulai dari sejak dalam Kandungan

Seribu hari pertama adalah periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Fase penghitungan seribu hari pertama dimulai dari masa kehamilan 270 hari hingga anak berusia 730 hari (2 tahun). Masa tersebut sangat penting mengingat masa itu merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan awal yang sangat menentukan masa depan anak di masa mendatang.

Berdasarkan rekomendasi WHO (2003), pemberian nutrisi pada anak bisa dilakukan saat lahir melalui Inisiasi Menyusu Dini (IMD), kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, makanna pendamping ASI diberikan paling lambat 6 bulan sambil terus melanjutkan pemberian ASI. Kebutuhan tidur yang mencukupi serta pemberian imunisasi dasar yang lengkap merupakan upaya memaksimalkan kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupan anak.

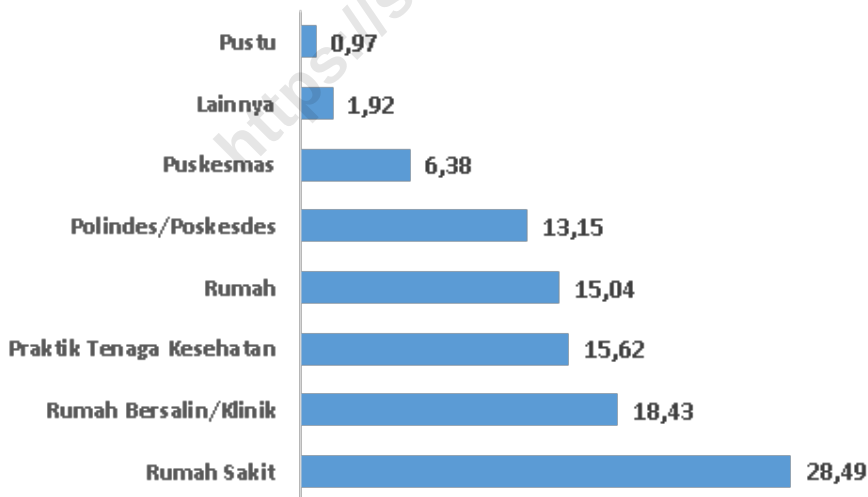
Kematian ibu merupakan peristiwa kompleks yang disebabkan oleh berbagai penyebab yang dapat dibedakan atas determinan dekat, antara, dan jauh. Determinan dekat yang berhubungan langsung dengan kematian ibu merupakan gangguan obstetrik seperti perdarahan, preklamsi/eklamsi, dan infeksi atau penyakit yang diderita ibu sebelum atau selama kehamilan yang dapat memperburuk kondisi kehamilan seperti jantung, malaria, tuberkulosis, ginjal, dan *acquired immunodeficiency syndrome*. Determinan dekat secara langsung dipengaruhi oleh determinan antara yang berhubungan dengan faktor kesehatan seperti status kesehatan ibu,

status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta perilaku penggunaan fasilitas kesehatan. Determinan jauh berhubungan dengan faktor demografi dan sosiokultural. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang kesehatan ibu hamil, pemberdayaan perempuan yang tidak baik, alatar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, serta kebijakan secara tidak langsung diduga berperan dalam meningkatkan kematian ibu (Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2011).

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi di suatu wilayah pada dasarnya menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan berpotensi menyebabkan kemunduran ekonomi dan sosial di level rumah tangga, komunitas, dan nasional. Hal yang paling penting, dampak terbesar kematian ibu adalah penurunan kualitas hidup bayi dan anak yang menyebabkan guncangan dalam keluarga dan selanjutnya mempengaruhi tumbuh kembang anak (Hernandez, 2010). Upaya menurunkan AKI dengan mengimplementasikan *Making Pregnancy Safer* (MPS), merupakan suatu program yang menjamin semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan terlatih.

AKI yang tinggi merupakan permasalahan kesehatan di negara-negara berkembang dan merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih dari 90persen kematian ibu terjadi di negara berkembang (WHO, 2017). AKI Indonesia masih tinggi, menurut hasil Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015 yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari yang tercantum pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 3 yaitu untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua individu pada semua usia dan untuk mengurangi AKI secara global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (United Nations, 2015).

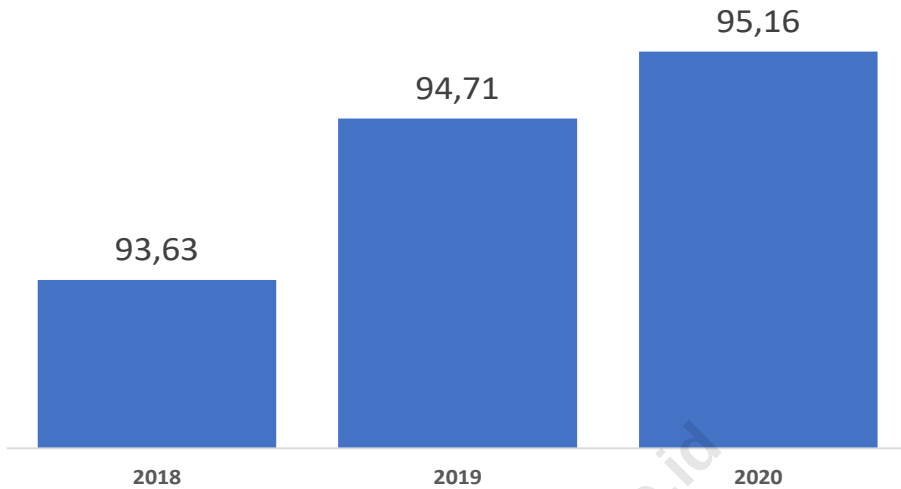
Upaya menurunkan AKI tidak akan optimal jika hanya mengandalkan program pemerintah



**Gambar 10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020-2021**

Sumber : BPS (Diolah)

semata. Penggunaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya meminimalisasi kematian ibu. Gambar 10 menjelaskan semakin meningkatnya kesadaran dalam memilih tempat melahirkan ibu yang dibantu tenaga kesehatan di tahun 2020 sebesar 83,04 persen.

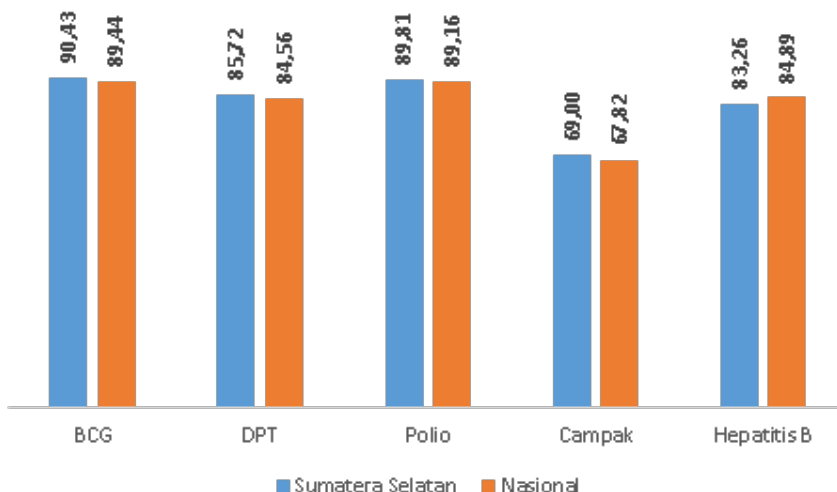


**Gambar 11. Persentase Ibu yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir Indonesia, 2018-2020**

Sumber: BPS, Publikasi Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2020

## 2. Capaian Pemenuhan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Tahun 2020 Menurun

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 130 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Tujuan dilakukan imunisasi pada anak adalah untuk melindungi anak dari berbagai penyakit. Imunisasi dasar lengkap yang dicakup meliputi imunisasi *Basilus Calmette Guerin (BCG)* sebanyak 1 (satu) kali, *Diphtheria Pertusis Tetanus (DPT)* sebanyak 3 (tiga) kali, Polio sebanyak 3 (tiga) kali, Hepatitis B sebanyak 3 (tiga) kali dan imunisasi campak sebanyak 1 (satu) kali. Idealnya, anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sejak berumur 12 bulan karena menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi disebutkan bahwa imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berumur 1 (satu) tahun.



**Gambar 12. Penduduk Sumatera Selatan Umur 0-59 Bulan (Balita) Yang Pernah Mendapat Imunisasi (persen), 2020**

Sumber : BPS (Diolah)

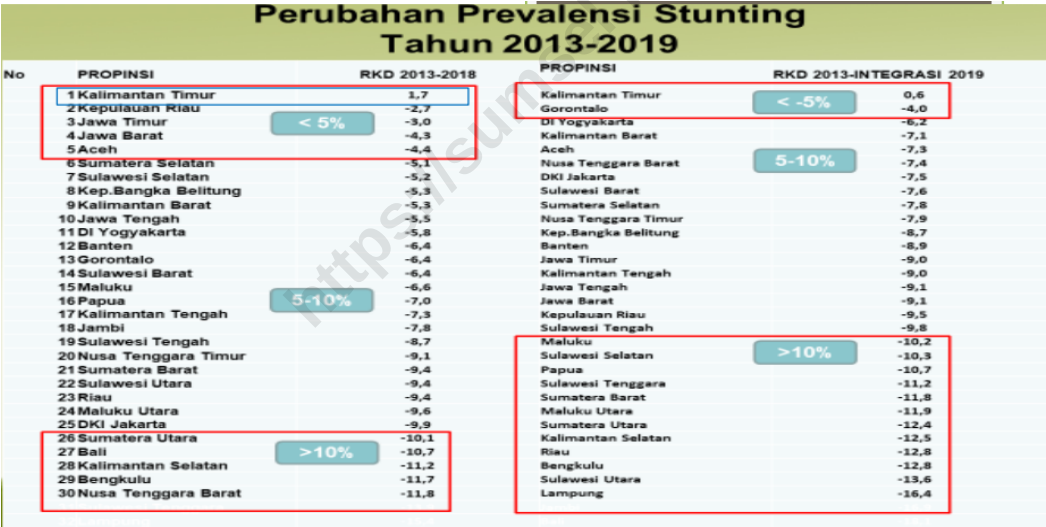
Pemerintah menargetkan persentase imunisasi dasar (IDL) anak usia 12-23 bulan mencapai 90 persen pada 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Namun, berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020, pemberian imunisasi BCG pada penduduk umur 0-59 bulan sudah mencapai 90 persen adalah, sedangkan jenis imunisasi dasar lainnya masih jauh dari 90 persen.

Kemendes mencatat terjadinya penurunan cakupan dasar imunisasi lengkap pada bulan ketiga tahun 2020. Pandemi COVID-19 membuat orangtua takut mengimunisasi anaknya ke fasilitas kesehatan. Orangtua harus mendapat edukasi mengenai pentingnya melengkapi imunisasi anaknya karena imunisasi merupakan salah satu investasi di masa depan bagi anak-anak yang harus diutamakan (Soedjatmoko, 2021).

3. Kecakupan Gizi

Gizi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuh kembang anak yang optimal. Gizi yang cukup dan seimbang sangat diperlukan dalam periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Periode emas dimulai sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Menurut *World Food Programme*, Pengaruh stunting dapat menghambat perkembangan otak, menurunkan daya tahan atau imun tubuh, serta menyebabkan rendahnya IQ dalam jangka waktu yang pendek. Dalam kawasan Asia Tenggara, angka *stunting* di Indonesia termasuk tertinggi kedua setelah Kamboja.



Gambar 13. Perubahan Prevalensi Stunting Menurut Provinsi (persen), 2013-2019

Sumber : BPS (Diolah)

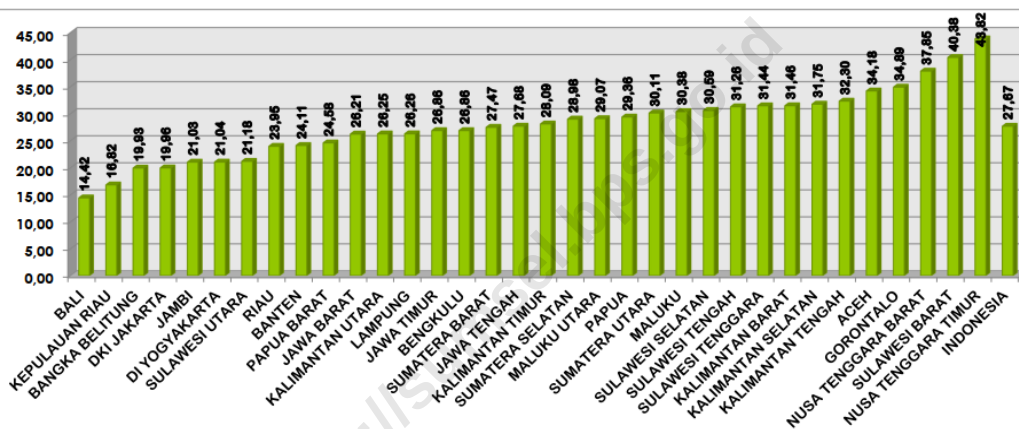
4. Balita Stunting

Masalah gizi kurang masih menjadi perhatian utama di berbagai negara, terutama pada kelompok balita. Kondisi gagal tumbuh yang menyebabkan tubuh balita mengeril dikenal dengan istilah stunting. *Stunting* atau gagal tumbuh adalah suatu kondisi yang menggambarkan status gizi kurang yang memiliki sifat kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal masa kehidupan yang direpresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur kurang dari minus dua standar deviasi atau tinggi anak seumurnya berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO (Ni'mah, 2015). *Stunting* yang diidap tidak hanya berpengaruh pada tinggi anak, namun anak cenderung berisiko tinggi terkena infeksi atau penyakit.



Persentase balita *stunting* di Indonesia mencapai 27,7 persen, sedangkan target pemerintah mencapai 14 persen di tahun 2024. Upaya menurunkan angka *stunting* Sumatera Selatan dinilai cukup signifikan. Hal tersebut tergambarkan dari perubahan prevalensi *stunting* yang terjadi di Sumatera Selatan selama 2013-2019 berada pada kisaran 5-10 persen, atau tepatnya menurun sebesar 7,8 persen.

Prevalensi *stunting* anak balita di Indonesia cenderung statis. Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan *stunting* yang cukup signifikan, tetapi *stunting* dinilai masih menjadi permasalahan serius di Sumatera Selatan karena angka prevalensi masih di atas 20 persen. Keterlibatan semua unsur masyarakat secara kolektif diperlukan untuk meningkatkan gizi anak Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Bagian yang tak kalah penting adalah memberikan pelayanan kesehatan neonatal kepada ibu hamil secara intensif dan mendorong ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif.

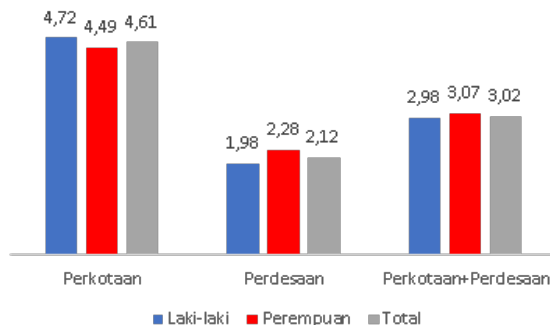


**Gambar 14. Proporsi Stunting Pada Balita Menurut Provinsi (persen), 2019**

Sumber : BPS (Diolah)

## 5. Dampak Pandemi COVID-19 pada Kesehatan Anak

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, muncul dengan dilatarbelakangi data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan terjadinya penurunan kunjungan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan bagi bayi, anak umur di bawah lima tahun (balita), dan anak serta tutupnya sebagian besar posyandu di Indonesia selama pandemi terjadi. Tidak tercapainya berbagai target pemerintah di bidang kesehatan anak merupakan imbas dari pandemi COVID-19.



**Gambar 15. Persentase Anak 0-17 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020**

Sumber : BPS (Diolah)

## E. PEKERJA ANAK

Keberadaan pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama dimulai negara-negara Eropa kemudian negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi anak itu sendiri, latar belakang keluarganya, pengaruh orang tua, budaya, dan lingkungannya.

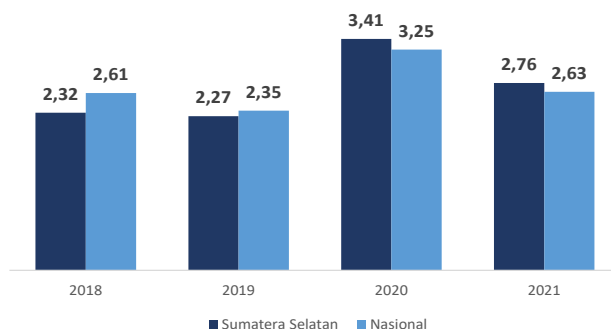
Tidak semua pekerjaan yang dilakukan anak dan tidak semua anak yang bekerja disebut pekerja anak. Definisi pekerja anak positif adalah pekerjaan yang tidak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi atau mengganggu sekolah anak-anak. Namun, kerap terjadi “pekerja anak” yang negatif didefinisikan sebagai pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi dan martabat anak-anak, dan yang menyerang perkembangan fisik dan mental.

Bentuk-bentuk pekerja anak menurut Pasal 3 Konvensi ILO No.182:

- Semua bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, ijon dan perbudakan serta kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau mewajibkan anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata
- Penggunaan, pengadaan, atau penawaran seorang anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan pornografi
- Penggunaan, pengadaan atau penawaran seorang anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan
- Pekerjaan yang menurut sifatnya atau keadaan di mana pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan

### 1. Pendidikan dan Kesehatan Pekerja Anak

Perlambatan perekonomian mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi tenaga kerja karena sudah tidak mampu membayar gaji. Jalan yang ditempuh dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan sehingga potensi kemiskinan semakin melebar. Banyak kepala keluarga sudah tidak mampu menafkahi istri dan anaknya. Ironisnya, kondisi sulit tersebut menggiring anak terpaksa ikut membantu perekonomian keluarga.

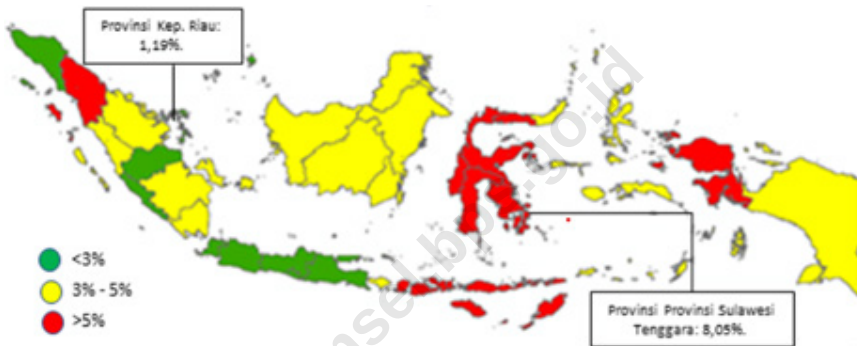


**Gambar 16. Penduduk Sumatera Selatan Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan “SD Ke Bawah” (persen), 2018-2021**

Sumber : BPS (Diolah)

Ada sekitar 42-66 juta anak berpotensi menjadi pekerja demi membantu perekonomian keluarga dan secara umum sekitar 386 juta anak ikut bekerja sampai dengan tahun 2019 (ILO, 2020). Sedangkan di Indonesia, Filantropi Tanggap COVID-19 mencatat ada sekitar 11 juta anak yang berpotensi menjadi pekerja jika selama pandemi ini belum usai.

Keterkaitan antar pandemi dengan anak yang menjadi pekerja yaitu orangtua yang kesulitan ekonomi dengan terpaksa menjadikan anak melakukan tugas perbantuan dengan bekerja demi menolong ekonomi keluarganya (HRW, 2020). Alasan lainnya adalah disrupsi sektor pendidikan. Kebijakan pemerintah berupa *Social Distancing* yang memberlakukan program *School From Home*, atau sekolah tidak melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka yang menyebabkan banyak anak terpaksa tidak terkontrol belajarnya bahkan sampai dengan tidak melanjutkan sekolah dan kemudian menjadikan mereka sebagai pekerja (ASI, 2020)



**Gambar 17. Persentase Anak Bekerja Usia 10-17 Tahun Menurut Provinsi, 2020**

Sumber : BPS (Diolah)

Kemiskinan mengalami peningkatan yang merupakan salah satu dampak Pandemi Covid-19. Salah satu penyebab utama anak mengalami putus sekolah adalah faktor kemiskinan yang menghimpit dan menghambat pemenuhan pendidikan anak. Dengan demikian, persyaratan untuk bisa melanjutkan sekolah tidak bisa dipenuhi. Kondisi anak yang bekerja karena diajak orangtua untuk membantu perekonomian keluarga, akhirnya anak pun tidak mau lagi bersekolah.

Jumlah anak yang bekerja semakin meningkat sejak dimulainya masa pandemi di Indonesia pada awal 2020. Data Sakernas Agustus 2020 menyebutkan jumlah anak yang bekerja di Indonesia sekitar 2.176.389 anak. Jumlah ini meningkat dibandingkan Agustus 2019 yaitu anak bekerja sejumlah 1.633.020 anak. Salah satu penyebab atas peningkatan anak bekerja di masa pandemi adalah keluarga yang memanfaatkan anak untuk diperkerjakan agar menambah penghasilan keluarga (BHRInstitute, 2021).

## 2. Kemiskinan sebagai Faktor terjadinya Pekerja Anak

Berbagai permasalahan yang timbul dari meluasnya pandemi COVID-19. Hal ini mempengaruhi peningkatan kemiskinan rumah tangga secara signifikan. Krisis ini membuat anak-anak beresiko kehilangan hak-hak dasar mereka dan layanan esensial (UNICEF, 2020). Tidak hanya itu kemiskinan rumah tangga juga menjadi faktor utama tingginya angka pekerja anak.

Dampak positif dari bekerja pada usia anak adalah dengan bekerja mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini tentunya akan lebih menjamin pemenuhan kebutuhan hidup mereka, termasuk kebutuhan nutrisi dan kesehatan. Lingkungan kerja juga

menyediakan berbagai stimulasi yang berguna bagi perkembangan kognitif dan psikososial anak (Bequele & Myers, 1995). Berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan keluarga juga menimbulkan perasaan berguna dan dibutuhkan yang dapat memupuk *self esteem* anak (Bequele & Myers, 1995).

### 3. Siklus Kemiskinan dan Pekerja Anak

Pekerja anak yang juga mengalami putus sekolah dipicu oleh faktor ketidakmampuan keluarga membiayai sekolah, membeli perlengkapan sekolah akibat penghasilan orangtua yang tidak cukup dalam pemenuhan hidup sehari-hari. Selain itu, adanya anggapan bahwa anak merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi. Di kalangan menengah ke bawah, kekerasan dan pengeksploitasian (bekerja) pada anak didorong karena faktor kemiskinan, sedangkan di kalangan menengah ke atas dikarenakan ambisi orangtua untuk menjadikan anaknya yang terbaik di sekolah, di masyarakat termasuk sebagai selebritis cilik (Seto Mulyadi, Kompas 16 Januari 2006).

Pendapatan rumah tangga, pendidikan anak, jenis kelamin anak, pendidikan kepala rumah tangga dan nilai upah anak adalah beberapa faktor yang memicu timbulnya pekerja anak. Pendapatan rumah tangga yang rendah menjadikan keluarga akan mengerahkan seluruh anggota keluarga untuk bekerja agar mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk mengerahkan anak di bawah usia kerja. Semakin rendah pendapatan rumah tangga maka waktu kerja anak juga akan semakin tinggi. Dengan kondisi anak bekerja berdampak hilangnya hak anak untuk mengakses pendidikan ataupun kesehatan sehingga anak tidak siap menghadapi persaingan di masa datang.

### 4. Pekerja Anak Menghasilkan Inefisiensi Produktivitas Tenaga Kerja

Alasan kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran menyebabkan anak memilih bekerja untuk membantu orangtuanya menghasilkan uang. Sementara itu, anak yang bekerja di pabrik disebabkan oleh tingginya permintaan tenaga kerja dan kemauan anak untuk dibayar dengan murah. Hal tersebut menjadi keadaan yang sangat rawan bagi anak untuk mengalami eksploitasi. Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal memberi peluang untuk terjadinya eksploitasi.

Ada dua sisi yang menjelaskan tentang pendekatan teori dalam memperkerjakan anak yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan menyatakan bahwa permintaan terhadap pekerja anak sangat ditentukan oleh adanya kebutuhan perusahaan, sedangkan sisi penawaran menyatakan bahwa ketersediaan pekerja anak sangat tergantung pada partisipasi anak di sekolah dan ketersediaan waktu luang mereka terutama anak-anak yang bekerja paruh waktu (Nachrowi dan Salahudin, 1997).

Tjandraningsih (1995) menjelaskan adanya dua pendekatan teori dalam memperkerjakan anak yaitu dari sisi permintaan yang menyatakan bahwa memperkerjakan anak-anak dan perempuan dewasa dianggap sebagai pencari nafkah kedua dan melipatgandakan keuntungan. Kedua, teori dari sisi penawaran yang menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan sebab utama yang mendorong anak-anak bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup dari keluarganya.

## F. PERKAWINAN ANAK

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya praktek perkawinan usia anak masih berlangsung di berbagai belahan dunia yang merefleksikan

perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan.

### 1. Tren Data Perkawinan Usia Anak Indonesia

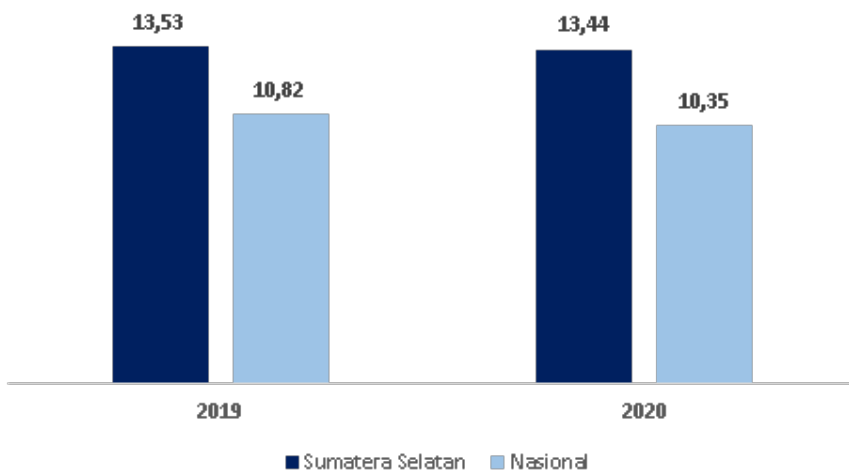
Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Perkawinan usia anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Dalam deklarasi hak asasi manusia, dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun, kenyataan yang dihadapi dalam perkawinan usia anak, persetujuan menikah seringkali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orangtua/wali anak sehingga anak setuju untuk menikah sebatas rasa bhakti atau hormat terhadap orangtua. Orangtua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat dan kehilangan kesempatan untuk memilih. Perkawinan usia anak merupakan bentuk perlakuan salah pada anak (*child abuse*) (IHEU, 2005).

### 2. Target dan Capaian Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak

Indonesia termasuk dalam 10 negara yang memiliki angka prevalensi menikah yang tinggi. Setidaknya 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Pada tahun 2018, sebanyak 1,2 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 hingga 2020, angka prevalensi perkawinan usia anak mengalami penurunan, namun hanya sebesar 0,47 persen.

Indonesia menargetkan angka perkawinan usia anak turun dari 11,21 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 persen di tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah karena berdasarkan hasil



**Gambar 18. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun, 2019-2020**

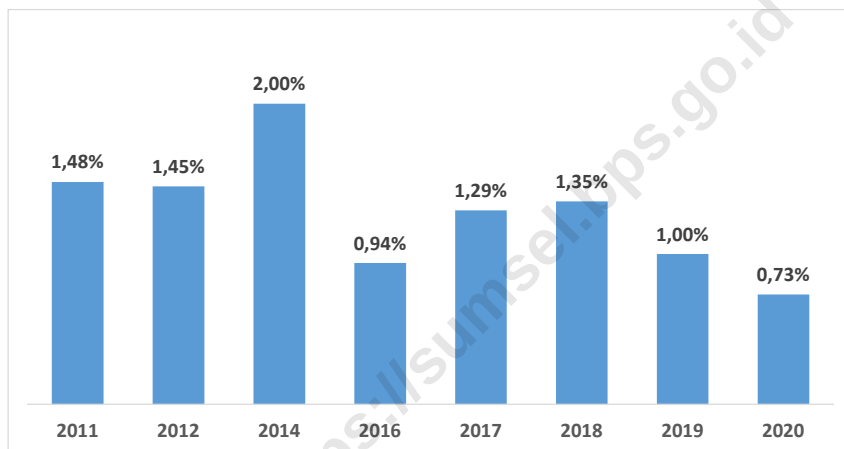
Sumber : BPS, Susenas 2010-2020

Susenas rata-rata penurunan persentase perkawinan usia anak selama periode 2008 hingga 2018 hanya sebesar 0,31 persen poin.

### 3. Perkawinan Usia Anak Menurut Wilayah

Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka perkawinan usia anak di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan, untuk kelompok usia 15-19 tahun perbedaannya cukup signifikan yaitu 5,28 persen di perkotaan dan 11,8 persen di perdesaan. Hal ini merepresentasikan bahwa wanita usia muda di perdesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda (Palu, B, 2009).

Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan mendata terjadi kenaikan pernikahan usia dini di Sumatera Selatan selama pandemi COVID-19. Jumlah total pernikahan usia dini selama tahun 2020 mencapai 58.715 pasangan yang tercatat dari



**Gambar 19. Persentase Anak Perempuan Sumatera Selatan Umur 10-17 Tahun dengan Status Perkawinan berstatus “Kawin” (persen), 2011-2020**

S u m b e r :

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Publikasi Profil Anak 2012-2020)

Kantor Kementrian Agama setempat. Angka tersebut dinilai mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 13,53 persen. Akan tetapi, mengalami kenaikan pernikahan usia dini di tahun 2021 hingga mencapai 7500 pasangan. Lima daerah yang menjadi penyumbang angka pernikahan usia dini di Sumatera Selatan adalah Ogan Komering Ilir, Musi Rawas Utara, OKU Selatan, OKU Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir.

### 4. Meningkatnya Perkawinan Anak di Masa Pandemi COVID-19

Masa Pandemi COVID-19 memiliki keterkaitan dengan rawannya anak menjadi pekerja. Pilihan sulit ini terpaksa dilakukan karena pandemi telah merampas kesejahteraan keluarganya sehingga jatuh pada garis kemiskinan baru. Permasalahannya bukan hanya pada sisi ekonomi tetapi juga menjadi pemicu masalah sosial lainnya seperti maraknya perkawinan anak dan eksploitasi seksual.

Kebijakan untuk sekolah Pertemuan Tatap Muka (PTM) menjadi sekolah daring atau



mengakibatkan anak harus putus sekolah serta ditambah dengan masalah ekonomi di keluarga maka dampaknya bukan hanya pada permasalahan pekerja anak, tetapi juga maraknya perkawina anak. Bahkan jika pandemi ini berlangsung selama 2 tahun dan pemerintah tetap memberlakukan kebijakan yang sama terhadap sistem pendidikan, diprediksi akan ada 4 juta anak perempuan yang berpotensi kawin di bawah umur dan menjadi pekerja anak (Batha E, 2020).

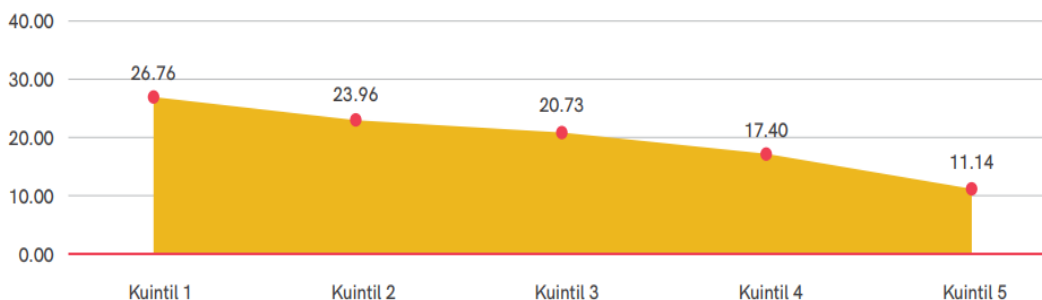
Selama pandemi COVID-19, pernikahan anak semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020. Meningkatnya pernikahan anak ini disebabkan diantaranya oleh alasan ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar dari rumah, dan menghindari perzinahan.

### 5. Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Usia Anak

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, perempuan usia 20-24 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah cenderung berpeluang lebih besar melakukan perkawinan pada usia di bawah 18 tahun. Sementara, mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi memiliki prevalensi terendah dalam melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun.

Pada kelompok kuintil pengeluaran pertama, 26,76 persen diantaranya adalah rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, pada kelompok kuintil pengeluaran kedua, ketiga, keempat, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun masing-masing sebesar 23,96 persen, 20,73 persen, dan 17,40 persen. Pada kelompok kuintil pengeluaran kelima yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok lainnya yaitu sebesar 11,14 persen.

Hasil Susenas Maret 2018 menunjukkan bahwa perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia sebelum 18 tahun yang berstatus miskin lebih besar dibandingkan yang kawin di atas usia 18 tahun yaitu sebesar 13,76 persen berbanding 10,09 persen, namun perbedaan angka tersebut tidak signifikan. Hal tersebut menegaskan bahwa kemiskinan menjadi faktor pendorong perkawinan usia anak, namun bukan satu-satunya faktor utama atau faktor satu-satunya (Bappenas dan BPS, 2020).

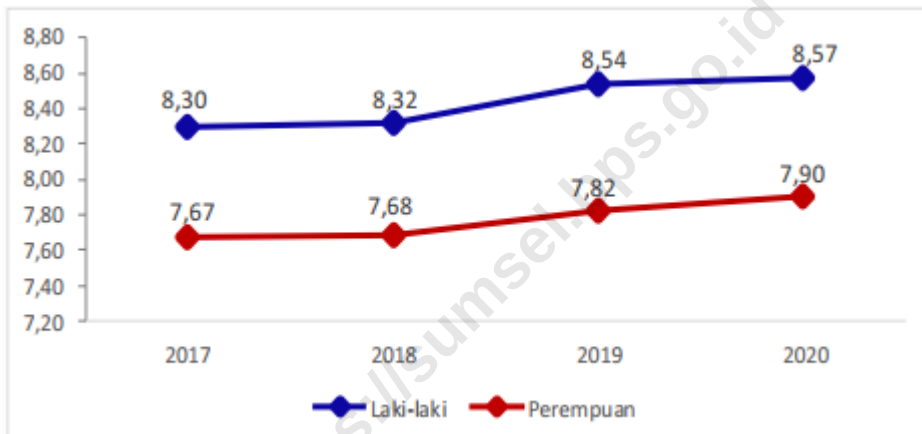


**Gambar 20. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Kawin Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Tingkat Kesejahteraan (Kuintil Pengeluaran), 2018**

Sumber : BPS (Diolah)

Beberapa faktor yang erat kaitannya dengan praktik perkawinan anak seperti faktor ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. Menurut data hasil Susenas Maret 2018, perempuan yang melakukan perkawinan pertama di atas usia 18 tahun mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, Rata-rata lama sekolah (RLS) baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Sumatera Selatan secara rata-rata mencapai 8,57 tahun untuk RLS pada laki-laki dan 7,90 tahun untuk perempuan. Dewi dan Dartono menjelaskan bahwa untuk mencegah perkawinan usia anak adalah dengan mengedepankan sekolah menengah serta pelatihan keterampilan terutama bagi anak perempuan.

## 6. Dampak Perkawinan Usia Anak



**Gambar 21. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan (tahun), 2017-2020**

Sumber : BPS (Diolah)

Secara lebih khusus, perkawinan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal karena dapat mengganggu atau mengakhiri masa penting kehidupan mereka sebagai anak-anak, ketika hak-hak mereka diakui dan tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa dan mereka mungkin belum siap. Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang ayah dan dengan situasi itu menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja mereka.

Perkawinan anak berdampak pada partisipasi tenaga kerja anak perempuan dan perempuan. Anak perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini memiliki kecenderungan untuk dikeluarkan dari sekolah. Anak perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan mengalami beban yang tinggi dari pekerjaan rumah tangga, dan seringkali terisolasi serta tidak dapat mengakses jaringan sosial, pengetahuan baru, dan keterampilan baru serta sumber daya yang memungkinkan dalam pengembangan ekonomi. Anak perempuan yang melangsungkan perkawinan anak yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja formal biasanya menghadapi beban kerja ganda, yakni beban dari tugas-tugas rumah tangga yang

juga menjadi bebannya.

Banyak perempuan muda di negara berkembang tidak memiliki banyak pilihan selain melangsungkan perkawinan pada usia muda. Kebanyakan pengantin muda kemudian menjadi ibu muda. Selain adanya implikasi kesehatan akibat kehamilan pada usia yang muda, perkawinan anak membatasi akses perempuan muda tersebut untuk bekerja produktif.

Perempuan cenderung menganggap kesiapan mengurus rumah tangga sebagai ukuran untuk kesiapan dalam menikah, sedangkan laki-laki cenderung menganggap kesiapan secara ekonomi sebagai ukuran kesiapan untuk menikah. Norma sosial yang ada di masyarakat mengenai gender masih sering mempengaruhi perkawinan anak. Ketika sebuah masalah memiliki keterkaitan dengan norma sosial, maka intervensi berupa kebijakan pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena yang harus diubah adalah nilai yang sudah mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada tambahan intervensi dari level rumah tangga dan komunitas. Sehingga solusi yang bisa diterapkan adalah intervensi dari keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam mengubah norma sosial agar mendukung kesetaraan gender dan menolak perkawinan anak

## G. KESIMPULAN

1. Sumatera Selatan harus mempersiapkan anak sedini mungkin sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, utamanya untuk dapat memetik keuntungan dari bonus demografi dan upaya mitigasi dari penuaan populasi.
2. Penyebaran penduduk usia anak tidak merata dan merupakan cerminan dari penyebaran penduduk secara keseluruhan. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dalam upaya pemerataan penyebaran penduduk, mengingat SDM merupakan aset utama dalam pembangunan bangsa.
3. Pekerja anak dan perkawinan usia anak merupakan fenomena yang menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas anak Indonesia. Pandemi COVID-19 yang menjadi katalis meningkatnya kedua tantangan tersebut. Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, pemerintah Sumatera Selatan hendaknya terus berupaya mengentaskan kedua tantangan tersebut dengan berbagai kebijakan.
4. Orang tua memegang peranan penting dalam memastikan tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak serta dalam pembentukan karakter anak. Orangtua dan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dari seorang anak.
5. Perencanaan dan persiapan yang matang dalam dunia pendidikan, dukungan kesehatan, serta terpenuhinya hak anak akan membentuk generasi yang berdaya saing dan menjadi investasi yang tidak ternilai bagi Sumatera Selatan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Adioetomo, & Moertiningsih, S. (2005). "Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi." Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

ASI, 2020. Leaving No-One Behind: Guidance for policymakers, donors and business leaders to ensure that responses to COvid-19 reach victims of modern slavery and people vulnerable to slavery. Anti-Slavery International (ASI). [http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2020/04/ASI\\_Leaving-noone-behind-April-2020-1.pdf](http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2020/04/ASI_Leaving-noone-behind-April-2020-1.pdf)

Bappenas, BPS, UNICEF, PUSKAPA. 2020. Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta, 2020 <http://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

Batha, E. 2020. Coronavirus puts 4 million girls at risk of child marriage. Thomas Reuters Foundation, 14 May 2020. [http://news.trust.org/item/20200514221931-3k1vf/?utm\\_campaign=trending&utm\\_medium=trendingWebWidget&utm\\_source=detailPage&utm\\_content=link4](http://news.trust.org/item/20200514221931-3k1vf/?utm_campaign=trending&utm_medium=trendingWebWidget&utm_source=detailPage&utm_content=link4).

Bequale, A., & Myers, W. 1995. First thing first in child labour: eliminating work detrimental to children. ILO, Jenewa.

BHRInstitute. 2021. Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Pekerja Anak Pada Perkebunan Kelapa Sawit <http://bhrinstitute.id/pandemi-covid-19-dan-perindungan-pekerja-anak-pada-perkebunan-kelapa-sawit/~text>

Demografi di Indonesia. Journal of Efilantropi.idconomic and Economic Education , 3 (2), 124 - 136.

Hernandez-Correa JC. Maternal Mortality and risk factors at the community level. Economic Working Paper. Departemen of Economics. Michigan Western Michigan University; 2010.

HRW, 2020. COVID-19 and children's right. Human Rights Watch, 9 April 2020 <http://covid19filantropi.id/cegah-eksploitasi-pekerja-anak-selama-pandemi-covid-19>.

IHEU. 2005. UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse <http://www.iheu.org>

International Labour Organization (ILO), 2020. Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work, 2020.

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan. Angka Kematian Ibu Melahirkan. Jakarta: 2011. <http://www.menegpp.go.id/V2/index.php/datadaninformasi/kesehatan>.

Kominfo. 2015. Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia. Jakarta: Kominfo.

Korth, B. B, Erickson, L., & Hall, K. M. (2009) Defining zTeacher Educator Through the Eyes of Classroom Teachers. The Professional Educator, 33(1), 1-12. [http://myaccess.library.utoronto.ca/loginurl=http://search.proquest.com/docview/194687907/accountid=1477155Cnhttp://bf4dv7zn3u.search.serialsolutions.com?c8&rft\\_id=info:sid/ProQ:educationalumni&rft\\_val\\_fmt=in](http://myaccess.library.utoronto.ca/loginurl=http://search.proquest.com/docview/194687907/accountid=1477155Cnhttp://bf4dv7zn3u.search.serialsolutions.com?c8&rft_id=info:sid/ProQ:educationalumni&rft_val_fmt=in)

- Maryati, S. 2015. *Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus*
- Nachrowi, N. D. 1996. *Pekerja Anak di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya*. Tidak dipublikasikan.
- Ni'mah, Khoirun, dan Siti Rahayu Nadhiroh (2015). "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita". *Media Gizi Indonesia*, Vol 10, No. 1, hal 13-19, 2015.
- Palu, B. 2008. *Menyelamatkan Generasi Muda*. <http://bappenas.go.id>
- Rusli, S., Toersilaningsih, R., Meirida, D., Kurniawan, U. K., & Setiawan, K. D. 2015. *Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi*.
- Soedjiatmoko, 2021. *Imunisasi Dasar Anak Wajib Dilengkapi di Era Pandemi COVID-19: Cegah Penyakit Berbahaya*. <http://www.wartaperawat.com/imunisasi-dasar-anak-wajib-dilengkapi-di-era-pandemi-covid-19-cegah-penyakit-berbahaya/>
- Sumargo dan Simajuntak, *Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia*, 2017.
- Tjandraningsih, Indrasari. 1995. "Pemberdayaan Pekerja Anak Studi mengenai Pendamping Pekerja Anak". Bandung: Yayasan Airlangga.
- UNICEF. 2020. *The Alliance for Children Protection in Humanitarian Action, Tehnical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic, Version 1, Maret 2020*, [http://www.unicef.org/media/65991/file/Tehnnical%20note:%20protection%20of%20children%20during%20the%20coronavirus%20disase%202019%20\(COVID-19\)%20PANDEMIC.PDF](http://www.unicef.org/media/65991/file/Tehnnical%20note:%20protection%20of%20children%20during%20the%20coronavirus%20disase%202019%20(COVID-19)%20PANDEMIC.PDF)
- United Nations. 2015. *Transforming our world the 2030 Agenda for Suistanable Development*. <http://sustainabledevelopment.unt.org/post2015transformingourworld>
- WHO. 2019. *Maternal Mortality*. <http://www.who.inten/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>





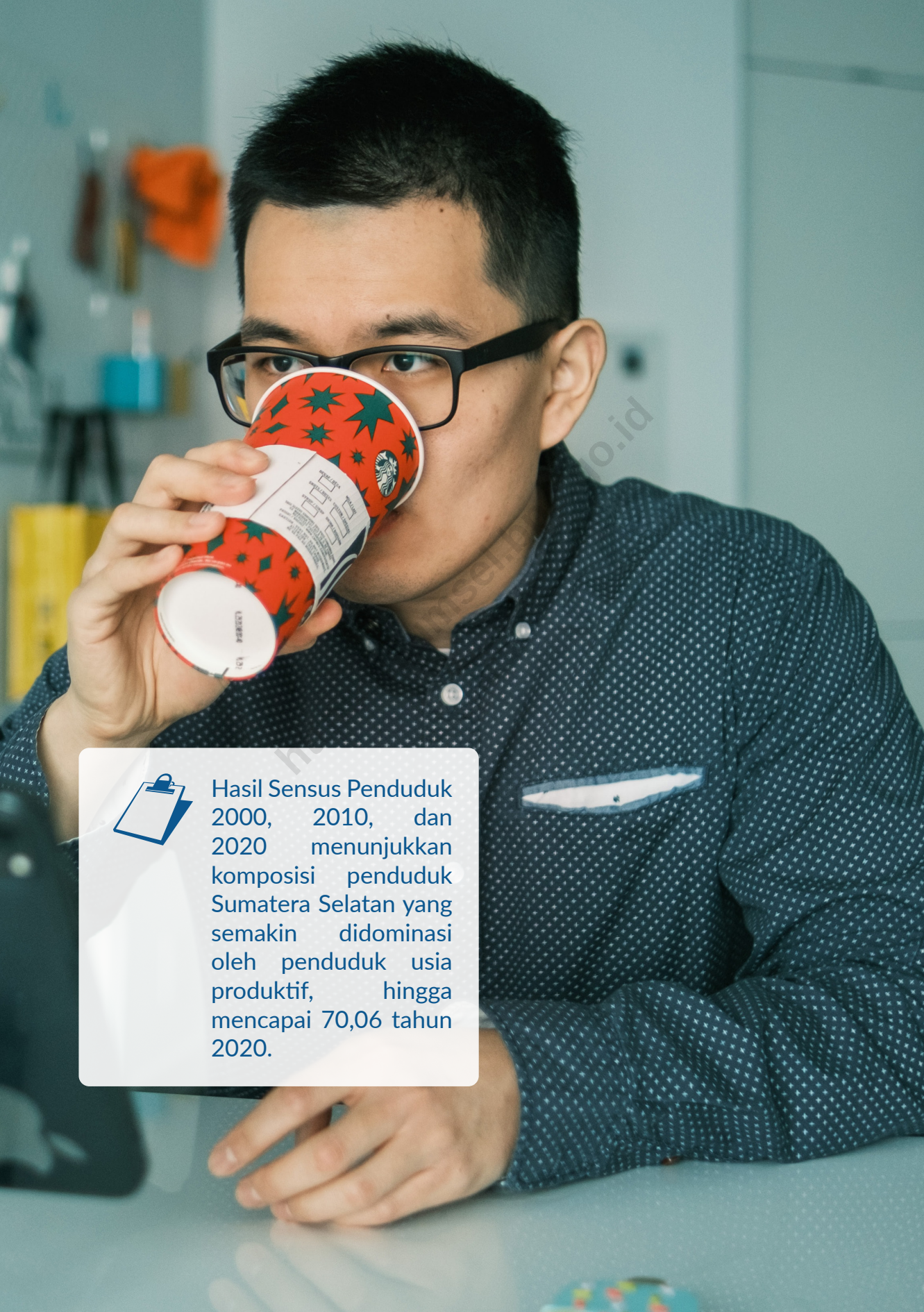


3

# Profil Usia Produktif

- A. Usia Produktif dan Pembangunan Sumatera Selatan
- B. Bonus Demografi dan Tantangannya
- C. Kesimpulan





Hasil Sensus Penduduk 2000, 2010, dan 2020 menunjukkan komposisi penduduk Sumatera Selatan yang semakin didominasi oleh penduduk usia produktif, hingga mencapai 70,06 tahun 2020.



# Profil Usia Produktif

**P**embangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan nasional harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap peningkatan kualitas hidup penduduknya sebagai objek pembangunan. Namun, tantangan terbesar dalam upaya integrasi penduduk dan pembangunan adalah bahwa penduduk juga merupakan subjek (*human capital*) dari pembangunan itu sendiri. Hal ini menyebabkan penduduk yang produktif dan berkualitas menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia (*life cycle approach*).

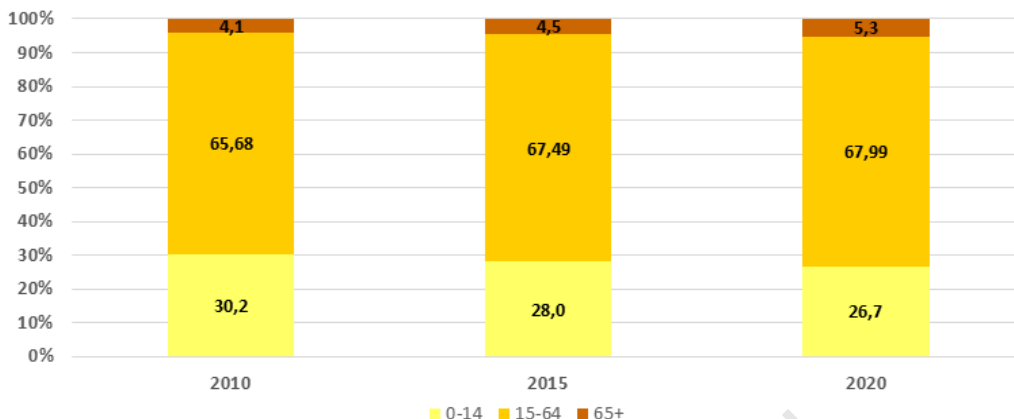
Di masa otonomi daerah yang telah berjalan selama hampir dua dekade ini, isu pembangunan di level regional juga tak kalah krusial, tak terkecuali Sumatera Selatan yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke sembilan di Indonesia atau terbesar ke tiga di Pulau Sumatera. Dari sisi sumber daya alam, Sumatera Selatan sudah memiliki modal yang melimpah. Pertanian dan pertambangan adalah sebagian sektor andalan Sumatera Selatan yang keunggulannya telah diakui secara nasional. Oleh karena itu, karakteristik penduduk yang beragam serta isu kualitas penduduk usia produktif akan sangat menentukan bagaimana pelaksanaan pembangunan dan capaian hasil pembangunan di masa yang akan datang.

## A. Usia Produktif dan Pembangunan Sumatera Selatan

*Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan penduduk usia produktif sebagai penduduk yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Besaran penduduk produktif di suatu wilayah dapat dijadikan indikasi seberapa besar potensi jumlah penduduk yang mampu dan siap bekerja. Adapun menurut William H. Frey, penduduk juga dapat diklasifikasikan dalam enam generasi yang disebut sebagai Post Gen Z, Gen Z, Milenial, Generasi X, Baby Boomer, dan Pre-Boomer. Dari enam klasifikasi tersebut empat generasi di antaranya mencakup penduduk usia produktif, yakni generasi baby boomer, generasi X, generasi millennial, dan generasi Z. Adapun persentase total dari empat generasi tersebut di Sumatera Selatan mencapai 83,91 persen.

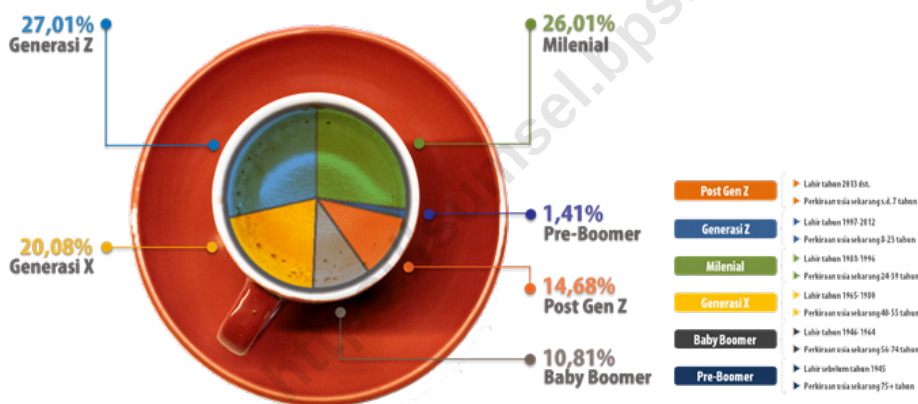
## B. Bonus Demografi: Potensi dan Tantangannya

Bonus demografi adalah suatu kondisi kependudukan ketika proporsi anak-anak di bawah 15 tahun terus menurun, sedangkan proporsi penduduk usia kerja 15-64 tahun meningkat cukup pesat dan kenaikan proporsi penduduk lansia (65 tahun



**Gambar 1. Persentase Penduduk menurut Kelompok Usia Sumatera Selatan**

Sumber : SP2020 diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



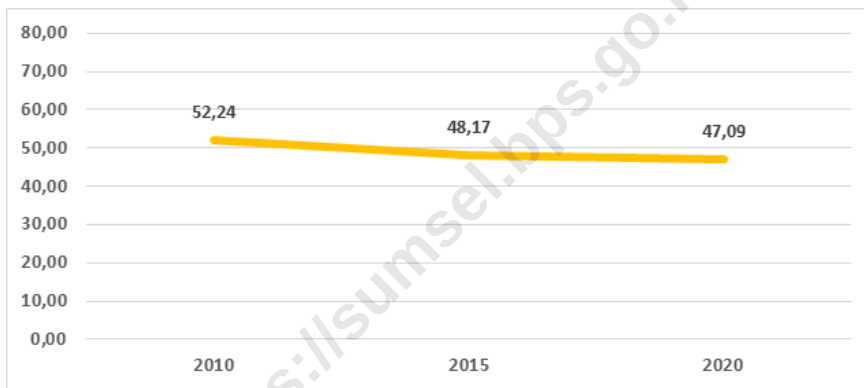
**Gambar 2. Komposisi Penduduk Sumatera Selatan Menurut Generasi Tahun 2020**

Sumber : SP2020 diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

ke atas) masih lamban (Adioetomo & Pardede, 2018). Kondisi bonus demografi suatu wilayah dapat dikenali dengan melihat terjadinya penurunan angka ketergantungan (*dependency ratio*) secara terus menerus. Angka ketergantungan ini didapatkan dengan membagi jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun dikalikan dengan 100. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa penduduk usia kerja di suatu wilayah dianggap sebagai potensi untuk menggerakkan roda perekonomian, sedangkan penduduk usia di bawah 15 tahun dianggap belum produktif dan penduduk usia 65 tahun ke atas dianggap sudah berkurang kapasitas produksinya. Dengan demikian, *dependency ratio* dapat pula diartikan sebagai rasio antara penduduk usia non-produktif dan penduduk usia produktif yang menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh kelompok penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Besarnya persentase penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif mengindikasikan bahwa Sumatera Selatan telah memasuki masa bonus demografi. Fenomena bonus demografi tersebut dapat dilihat dari angka *dependency ratio* di tahun 2020 yang berada di bawah lima puluh persen yaitu sekitar 47,09 persen. Artinya 1 penduduk usia produktif di Sumatera Selatan menanggung sekitar 1 orang penduduk yang belum/tidak lagi produktif. Dari grafik di bawah dapat dilihat sebenarnya fenomena bonus demografi tersebut sudah mulai terjadi sejak tahun 2015 dengan angka *dependency ratio* sebesar 48,17 persen.

Dalam lingkup pembangunan, bonus demografi sendiri bukanlah suatu “hasil” yang langsung dapat dinikmati, melainkan “alat” atau “peluang” yang memiliki potensi untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mencapai tujuan pembangunan manusia di suatu wilayah. Mengalami bonus demografi tidak otomatis membuat suatu wilayah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, dengan potensi penduduk usia produktif yang masif, hal tersebut sangat mungkin untuk dicapai. Upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas,



**Gambar 3. Dependency Ratio Penduduk Sumatera Selatan**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

kemampuan kognitif dan kecakapan hidup yang tinggi, berketerampilan teknis, produktif, dan berdaya saing dengan karakter yang baik adalah hal yang akan mendukung cita-cita bahwa demografi akan menyejahterakan bangsa akan tercapai (Adioetomo dan Pardede, 2018). Beberapa keuntungan yang dapat diambil dari bonus demografi di antaranya adalah menurunnya jumlah pengangguran, meningkatnya daya saing bangsa, terwujudnya generasi emas yang berkualitas, kreatif dan inovatif, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkelanjutan, serta terbukanya peluang Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di tahun 2045. Dari telaah hal-hal di atas, setidaknya ada dua hal menjadi poin krusial dalam upaya memaksimalkan potensi momentum bonus demografi yakni kualitas dan kondisi ketenagakerjaan dari penduduk usia produktif itu sendiri.

Penduduk usia produktif dapat pula dipandang sebagai modal manusia, yang memiliki karakteristik kesehatan, tingkat pendidikan dan pengetahuan, dan juga pengalaman yang menunjukkan kualitas dari penduduk usia produktif. Kualitas penduduk usia produktif berbanding lurus dengan produktivitas, sehingga upaya peningkatan kualitas penduduk usia produktif akan berdampak besar pada peningkatan produktivitas. Penduduk usia produktif yang kesehatannya baik, misalnya, akan lebih jarang absen bekerja sehingga produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan penduduk usia produktif yang kesehatannya buruk. Tingkat pendidikan juga demikian, penduduk usia produktif dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih memudahkannya untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi yang

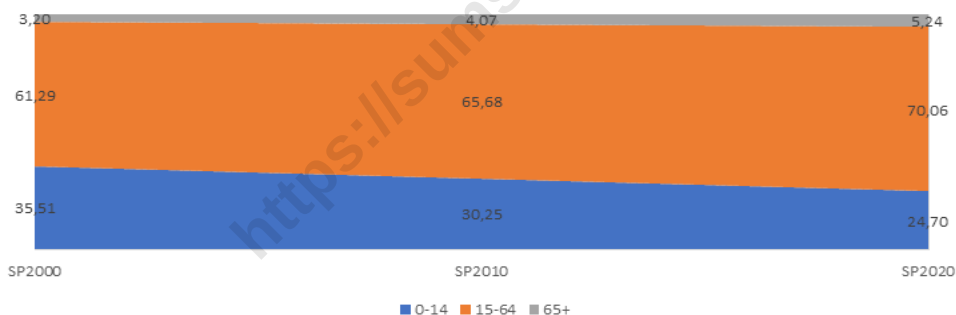
secara langsung mampu meningkatkan produktivitas, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi penduduk usia produktif tersebut. Di sisi lain, bonus demografi baru dapat dipetik dan dinikmati hasilnya apabila penduduk usia produktif terjun ke dunia kerja, di mana penduduk usia produktif tersebut dapat bekerja dan menghasilkan “produk” sehingga dapat diukur produktivitasnya. Dengan demikian, ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi isu yang krusial dalam pemanfaatan bonus demografi.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, telaah mengenai karakteristik penduduk usia produktif dan juga kondisi ketenagakerjaannya di Sumatera Selatan menjadi hal yang menarik dan perlu untuk dilakukan. Untuk mengambil manfaat dari bonus demografi tidak hanya kuantitas namun harus didukung dengan kualitas penduduk, sehingga beberapa pertanyaan perlu diajukan: apakah penduduk usia produktif di Sumatera Selatan berkualitas? apakah kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan sudah menunjukkan kondisi yang ideal bagi penduduk usia produktif untuk menunjukkan dan meningkatkan produktivitasnya?

## C. Profil Penduduk Usia Produktif di Sumatera Selatan

### 1. Tren dan Sebaran Penduduk Usia Produktif Provinsi Sumatera Selatan

Wilayah Sumatera Selatan memiliki penduduk usia produktif yang terus meningkat proporsinya dari tahun ke tahun. Hasil Sensus Penduduk 2000, 2010, dan 2020 menunjukkan komposisi penduduk Sumatera Selatan yang semakin didominasi oleh penduduk usia produktif, hingga mencapai 70,06 persen menurut hasil sensus terkini.



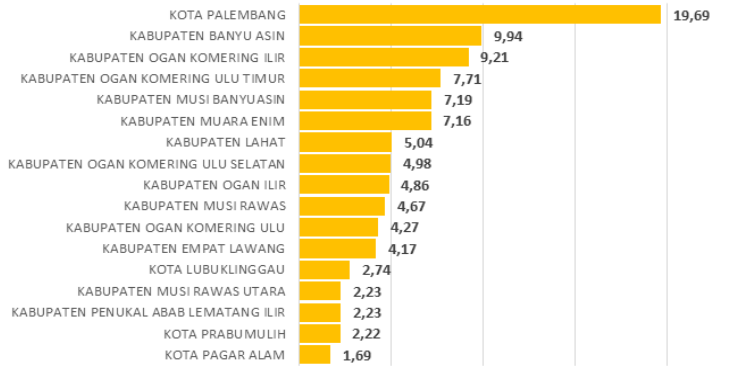
**Gambar 4. Sebaran Usia Produktif di Sumatera Selatan (persen)**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penduduk usia produktif di Sumatera Selatan tampak berpusat di ibukota provinsi dan wilayah penyangga di sekitarnya. Dari 5,76 juta penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun di Sumatera Selatan, hampir seperlima di antaranya berada di Kota Palembang. Kabupaten satelit di sekitar Kota Palembang seperti Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyumbang penduduk usia produktif yang cukup tinggi dengan kontribusi masing-masing sebesar 9,94 persen dan 9,21 persen. Sementara itu dua kabupaten baru dan tiga kota lain yang ada di Sumatera Selatan memiliki kontribusi penduduk usia produktif paling sedikit.

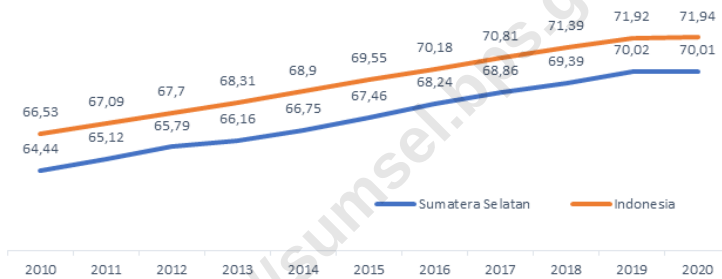
### 2. Kualitas Usia Produktif Sumatera Selatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan positif. Dalam dua tahun terakhir, status IPM Sumsel masuk kategori tinggi meskipun sedikit menurun di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Angka IPM yang semakin membaik tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan semakin membaik. Kualitas hidup masyarakat yang baik sangat vital dalam



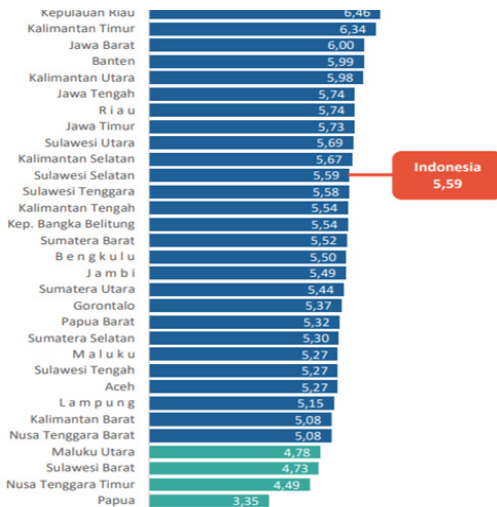
**Gambar 5. Sebaran Usia Produktif di Sumatera Selatan (persen)**

Sumber : SP2020 diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



**Gambar 6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan Selatan (persen)**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



**Gambar 7. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Tahun 2020**

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



upaya percepatan pembangunan, khususnya di masa bonus demografi mendatang.

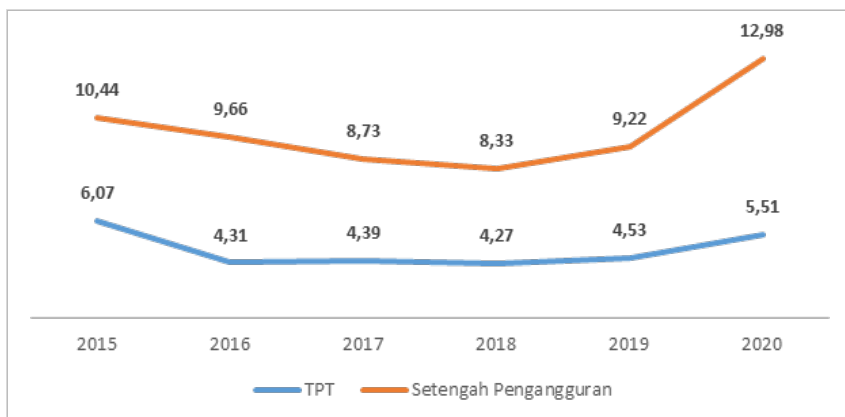
Selain kualitas manusianya, satu hal yang tak kalah penting adalah bagaimana pembangunan infrastruktur di era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Sayangnya, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Sumatera Selatan masih cukup jauh tertinggal dibanding provinsi-provinsi besar lainnya, bahkan angkanya masih di bawah angka rata-rata nasional. Indeks IP-TIK merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK.

### 3. Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Usia Produktif Sumatera Selatan

Tingkat pengangguran terbuka dalam enam tahun terakhir berada pada kisaran 4-6 persen dan cenderung menurun kecuali di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 yang meningkat menjadi 5,51 persen. Namun jika ditinjau lebih lanjut, angka setengah pengangguran yang mencerminkan kurangnya jam kerja (jam kerja di bawah 35 jam per minggu) dan masih tingginya keinginan mencari pekerjaan tambahan juga masih cukup tinggi yaitu berada pada kisaran 8 s.d. 13 persen. Hal tersebut dapat mengindikasikan masih rendahnya kompetensi tenaga kerja dan kesesuaian atas kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada.

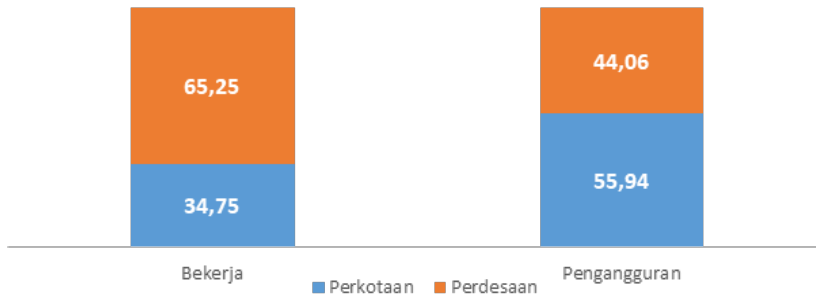
Dengan karakteristik pendidikan dan budaya yang ada, wajar jika penduduk usia produktif yang bekerja di Sumatera Selatan masih banyak terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Sejalan dengan itu, persentase penduduk yang menganggur di perdesaan (44,06 persen) masih lebih rendah dibandingkan di perkotaan yang mencapai 55,94 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kesempatan kerja di wilayah perdesaan masih lebih besar dibanding di perkotaan. Hanya saja pilihan lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan tidak sebanyak yang ada di perkotaan. Sejalan dengan itu juga, penduduk usia produktif yang tidak memiliki kompetensi dan daya saing di perkotaan akan sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Hampir setengah atau sekitar 45,99 persen penduduk yang bekerja di Sumatera Selatan berada di sektor pertanian, dengan sekitar 70 persen di antaranya mengusahakan subsektor perkebunan sawit, karet dan kopi. Sektor perdagangan dan industri pengolahan masing-masing mampu menyerap sekitar 16,21 persen dan 5,91 persen penduduk yang bekerja. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi leading sector di Sumatera Selatan ternyata hanya mampu menyerap sekitar 1,53 persen.



**Gambar 8. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Selatan, 2010-2020**

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS



**Gambar 9. Penduduk Bekerja dan Menganggur Menurut Tempat Tinggal**

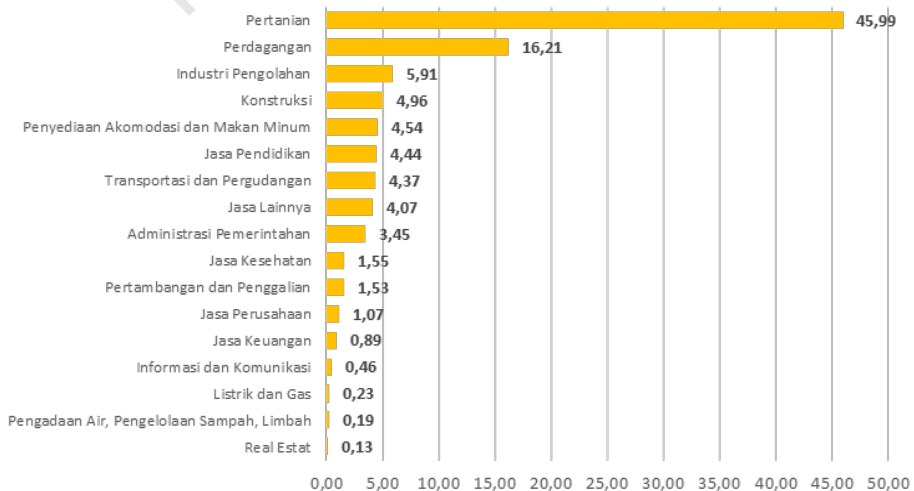
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS

Sampai di sini dapat dilihat bahwa potensi terbesar dari perekonomian Sumatera Selatan berada di sektor pertanian. Artinya sektor pertanian tidak mungkin dapat dikesampingkan dalam upaya pembangunan perekonomian Sumatra Selatan yang kokoh dan berkelanjutan, terutama dalam menyongsong bonus demografi ke depan. Lalu, bagaimanakah peran generasi Z dan generasi Milenial sebagai kunci penggerak perekonomian ke depan?

Selama enam tahun terakhir, persentase penduduk yang bekerja di sektor formal juga masih berada di bawah angka empat puluh persen, sementara sisanya berada di sektor informal. Menurut status pekerjaan, sektor informal dicirikan oleh mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar, berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu keluarga/pekerja tak dibayar, serta pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Masih tingginya pekerja sektor informal ini menunjukkan masih rendahnya kompetensi dan daya saing serta rendahnya kepemilikan modal usaha dan tempat/lahan usaha.

#### 4. Kondisi Sumatera Selatan Menjawab Peluang Bonus Demografi

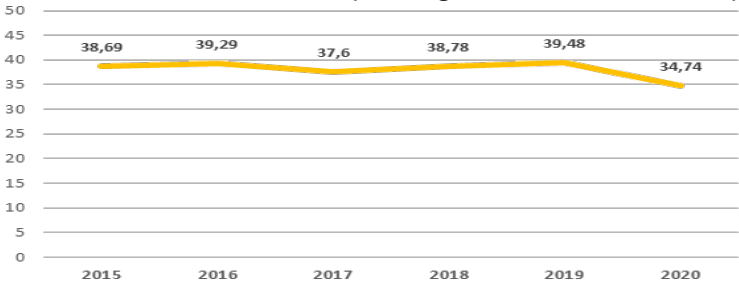
Indeks daya saing daerah (IDSD) yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional



**Gambar 10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2020**

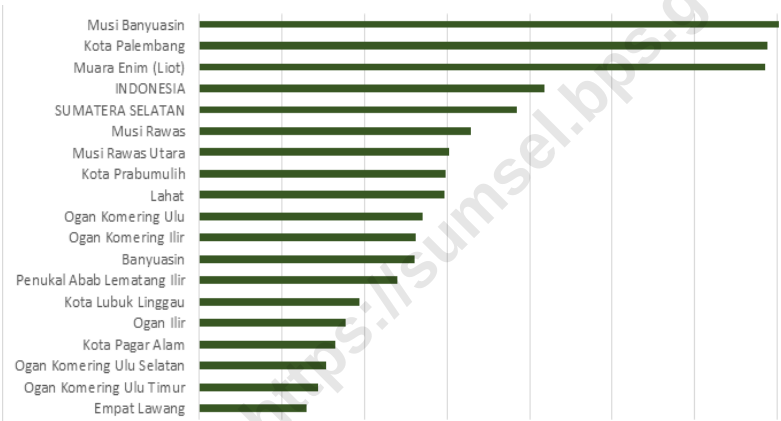
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS

(BRIN) merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Indikator ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan baik domestik maupun internasional demi



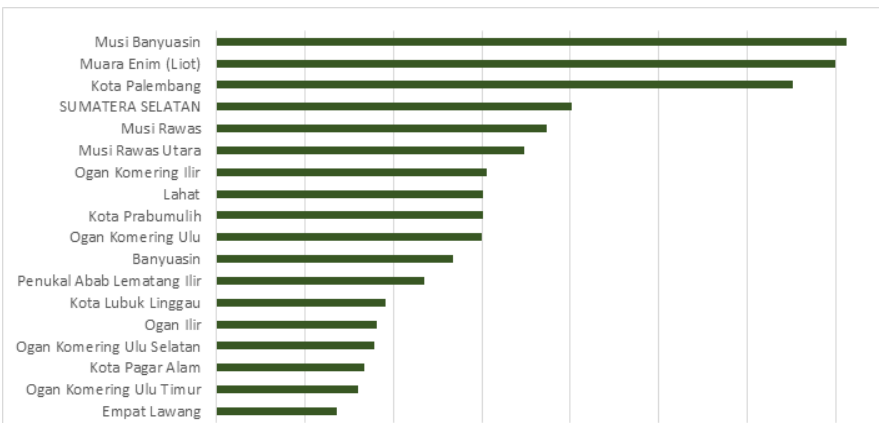
Gambar 11. Penduduk Bekerja di Sektor Formal

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS



Gambar 12. Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2020 (juta rupiah per tenaga kerja per tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik

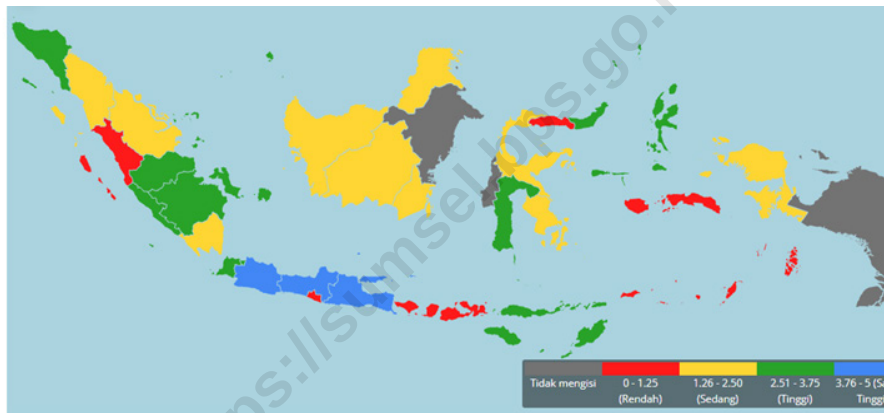


Gambar 13. Produktivitas Jam Kerja Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2020 (juta rupiah per jam per tenaga kerja)

Sumber : Badan Pusat Statistik

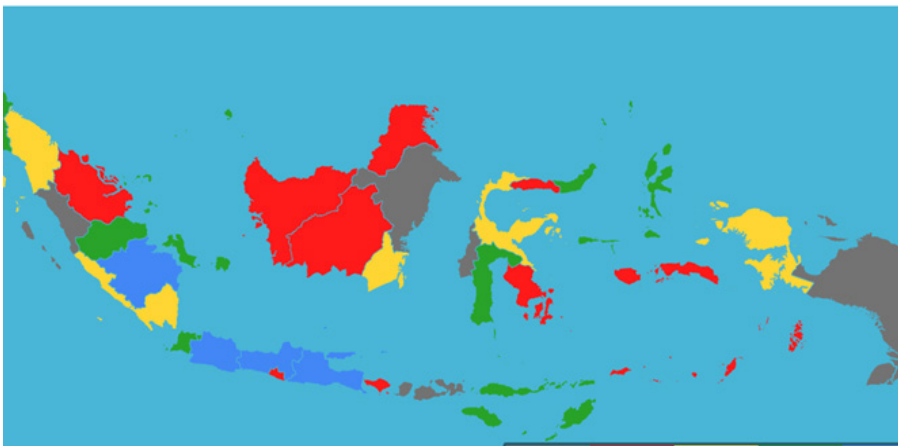
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Di tahun 2020, Sumatera Selatan mencatatkan capaian indeks daya saing daerah yang tergolong kategori tinggi di angka 3,5890 dari skala 0-5 yang ditetapkan oleh BRIN. Artinya Sumatera Selatan mempunyai potensi yang besar untuk menjadi lebih maju lagi karena mampu bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia. Tingginya indeks daya saing yang diraih oleh Sumatera Selatan didukung oleh tingginya Skor Ekosistem Inovasi Daerah yang mencapai 4,0833 dari skala 0-5 yang membuat Sumatera Selatan masuk kategori daerah yang menunjukkan inovasi daerah yang tinggi dalam kegiatan pemerintahannya.

Sementara itu, kehadiran internet telah mempengaruhi banyak segi kehidupan manusia di seluruh belahan dunia, terutama perkembangan ekonomi yang makin mengarah pada penerapan ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi digital yang makin maju pesat pada akhirnya akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional, dan khususnya juga bagi tenaga kerja. Kehadiran platform jual-beli online, jasa transportasi online, jasa keuangan online dan sebagainya yang menandakan makin suburnya ekosistem ekonomi digital telah



**Gambar 14. Produktivitas Jam Kerja Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2020 (juta rupiah per jam per tenaga kerja)**

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional



**Gambar 15. Data Ekosistem Inovasi Daerah Wilayah Provinsi di Indonesia, 2020**

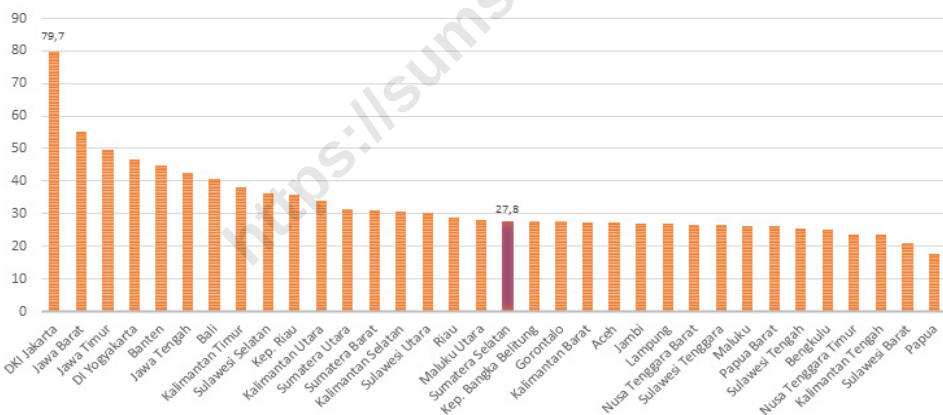
Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

mengubah pola penyerapan dan komposisi tenaga kerja di masyarakat. Untuk itu, kesiapan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal pemanfaatan teknologi untuk mendukung ekonomi digital sangat diperlukan.

*East Ventures*, sebuah start-up di bidang teknologi menyusun suatu indeks daya saing digital yang disebut *East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI)*. Indeks ini digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi digital di suatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek input yang mencakup sejumlah pilar utama yang mendukung terciptanya ekonomi digital, aspek output yang menggambarkan sejumlah pilar terkait ekonomi digital yang dihasilkan, serta aspek penunjang yang mendukung secara tidak langsung pengembangan ekonomi digital. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, EV-DCI Sumatera Selatan bernilai 27,8, sedikit lebih rendah dengan skor Indonesia secara umum yakni sebesar 27,9. Dengan skala 0-100, angka 27,8 menunjukkan bahwa daya saing digital di Sumatera Selatan masih rendah dan potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di wilayah ini masih sangat besar.

## 5. Penduduk Usia Produktif Sumatera Selatan Menurut Generasi

Menjawab tantangan bonus demografi yang akan berlangsung pada tahun 2020-2035, maka analisis ketenagakerjaan usia produktif perlu difokuskan pada generasi atau kelompok umur mana saja yang akan menjadi penggerak perekonomian dan juga penikmat hasil pembangunan dalam konteks bonus demografi mendatang. Untuk itu, analisis usia produktif di sini akan ditinjau dan dipilah menurut kelompok usia Generasi Z (usia 15-23 tahun), Generasi Y/



**Gambar 16.** *East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) menurut Provinsi, 2020*

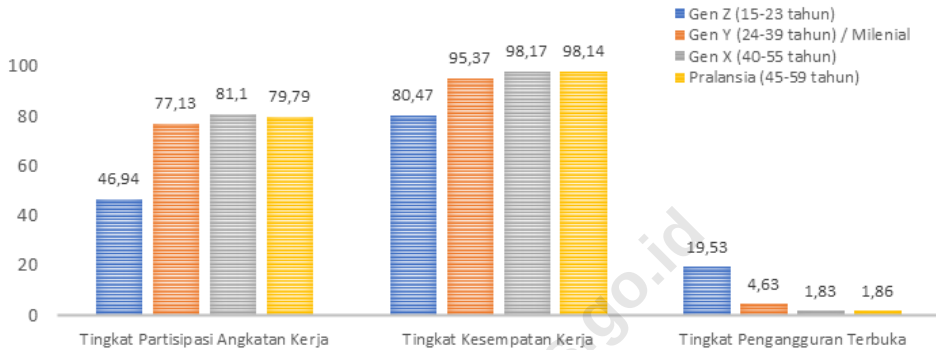
Sumber : *East Ventures*

Milenial (usia 24-39 tahun) dan Generasi X (usia 40-55 tahun).

Generasi Z dan Generasi Milenial merupakan dua kelompok usia produktif dengan persentase terbesar saat ini, sekaligus merupakan generasi kunci penggerak roda perekonomian dan pembangunan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Generasi inilah yang akan menentukan bagaimana wajah Sumatera Selatan dalam periode waktu mendatang, khususnya pasca masa bonus demografi. Untuk itu pembentukan generasi yang berkualitas, unggul dan berdaya saing perlu menjadi fokus berbagai pemangku kebijakan saat ini.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada kelompok Gen Z memang masih rendah

karena masih banyak di antaranya yang bersekolah (bukan angkatan kerja). Namun, di antara angkatan kerja yang tersedia ternyata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kelompok ini masih cukup tinggi yaitu mencapai 19,53 persen. Sementara itu Generasi Milenial menunjukkan angka yang lebih baik, selain tingkat partisipasinya yang sudah mencapai 77,13 persen, tingkat penganggurannya juga berkisar 4,63 persen di tahun 2020. Di sisi lain, penduduk yang masuk dalam kelompok pralansia menunjukkan angka TPT yang lebih rendah,



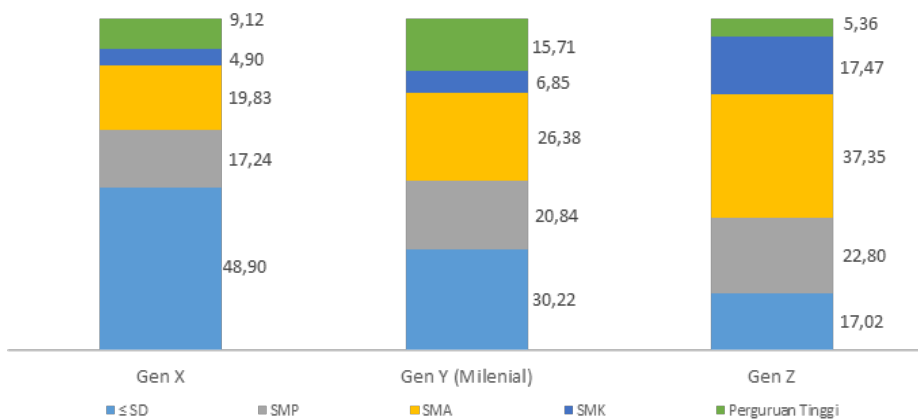
**Gambar 17. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Generasi Usia Produktif**

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS

yaitu sekitar 1,86 persen.

Dari sisi kualitas penduduk usia produktif, mayoritas pendidikan yang ditamatkan oleh Generasi X (usia 40-55 tahun) yang bekerja adalah SD ke bawah dan SMP. Hal berbeda ditunjukkan oleh Generasi Milenial dan Generasi Z yang memiliki persentase pendidikan SD ke bawah yang semakin kecil. Adapun mayoritas penduduk yang bekerja pada kedua generasi tersebut telah memiliki pendidikan SMA dan perguruan tinggi.

Di sisi lain, mayoritas penduduk Generasi Milenial dan Generasi Z yang menganggur justru berlatar belakang pendidikan setara SMA dan perguruan tinggi. Bahkan sekitar 10,06



**Gambar 18. Penduduk Sumatera Selatan yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Generasi Usia Produktif**

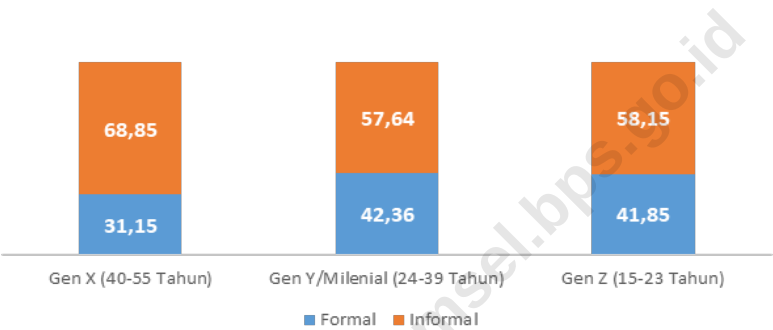
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS



persen Generasi Milenial yang menganggur berasal dari pendidikan SMK. Gambaran tersebut menunjukkan program wajib belajar mampu mendongkrak kuantitas pendidikan penduduk muda. Tetapi, pendidikan yang tinggi belum menjamin kelompok penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kompetensinya. Sementara itu, ditinjau menurut generasi penduduk usia produktif, ternyata kaum milenial dan Gen Z mulai banyak yang bekerja di sektor formal dibanding Gen X.

6. Situasi Pralansia Sumatera Selatan

Kelompok penduduk pralansia adalah penduduk yang saat ini berusia 45-59 tahun. Di masa pasca bonus demografi mendatang, kelompok penduduk ini akan menjadi kelompok lansia dengan jumlah yang tidak sedikit. Jika kelompok ini tidak mempunyai kualitas dan persiapan yang terukur maka bisa menjadi beban bagi generasi di bawahnya.

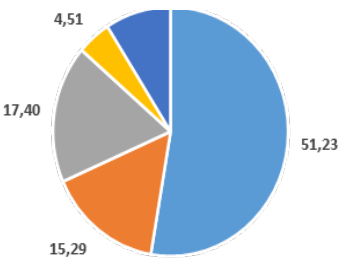


Gambar 19. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Generasi dan Sektor  
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, Diolah

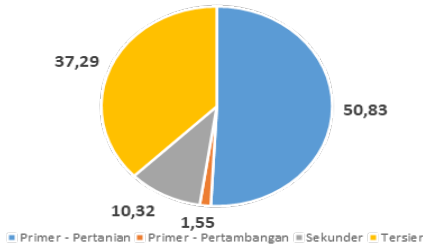
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kelompok pralansia saat ini adalah sekitar 79,79 persen dengan 1,86 persen di antaranya menganggur. Di antara kelompok pralansia yang bekerja, lebih dari setengahnya berlatar belakang pendidikan SD ke bawah. Ditinjau dari lapangan usaha yang diusahakan, lebih dari lima puluh persen di berada di lapangan usaha pertanian. Sementara itu, lebih dari 2/3 kelompok ini bergerak di sektor informal.

7. Permasalahan Pemuda Sumatera Selatan

Menurut UU No. 40 tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun yang merupakan periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kelompok generasi yang diusulkan oleh William H. Frey, sebenarnya kelompok usia tersebut tercakup dalam Generasi Z dan Generasi Y (milenial). Kelompok inilah yang akan menjadi

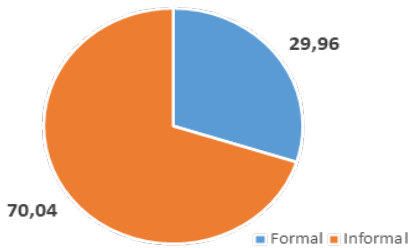


Gambar 20. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Generasi dan Sektor  
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, Diolah



**Gambar 21. Kelompok Pralansia Bekerja Menurut Lapangan usaha**

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, Diolah

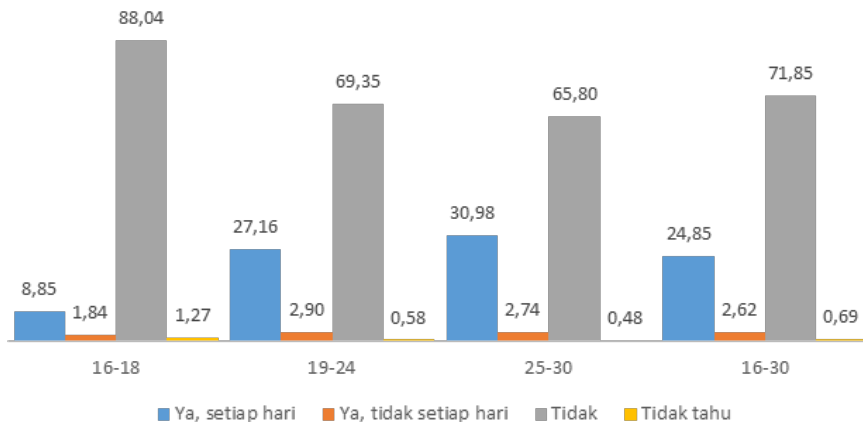


**Gambar 22. Kelompok Pralansia Bekerja Menurut Sektor**

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, Diolah

aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan dalam periode 10-20 tahun mendatang. Kualitas, daya saing dan kompetensi pemuda akan sangat menentukan keberhasilan bonus demografi ke depan.

Dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dampak negatif penggunaan tembakau pada kesehatan di antaranya dapat menyebabkan penyakit berbahaya, salah satunya adalah kanker. Jika seorang pemuda merokok, maka hal tersebut tentu akan berisiko terhadap kesehatannya di masa yang akan datang.



**Gambar 23. Persentase Pemuda Sumsel yang Merokok Tembakau, 2020**

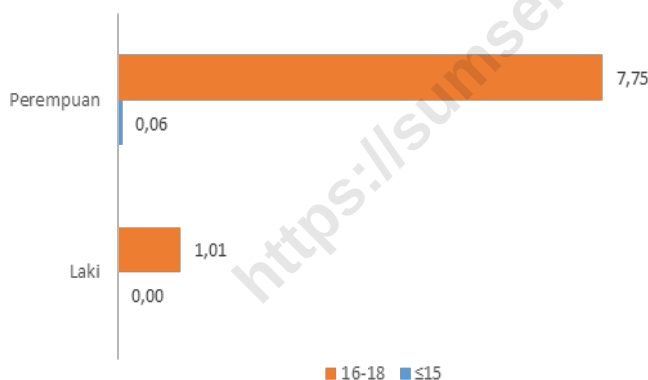
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Susenas 2020, sekitar 24,85 persen pemuda di Sumsel merokok setiap hari. Jika dilihat menurut kelompok umur yang lebih kecil, sekitar 8,85 remaja usia 16-18 tahun (setara SMA) mengaku merokok setiap hari, 1,84 persen lainnya mengaku merokok tidak setiap hari. Persentase pemuda yang merokok tembakau semakin tinggi pada kelompok umur 25-30 tahun hingga mencapai sepertiga pemuda Sumsel.

Perkawinan pada usia anak cenderung menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, dan hak sosial anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia perkawinan bagi wanita dan pria adalah sembilan belas tahun.

Berdasarkan data Susenas 2020, ada sekitar 7,75 persen perempuan berusia 16-18 tahun yang sudah menikah/kawin sementara 0,06 persen lainnya masih berusia 15 tahun ke bawah. Di sisi lain ada sekitar 1,01 persen laki-laki berusia 16-18 tahun yang telah melangsungkan pernikahan.

Permasalahan pemuda selanjutnya adalah narkoba dan obat/bahan. Segala jenis narkoba cukup berbahaya dan merupakan masalah bersama. Daya rusaknya sangat dahsyat terutama bagi para pemuda di usia produktif. Indonesia yang memiliki populasi tinggi merupakan pangsa pasar yang menggiurkan bagi para bandar, karena itu semua elemen bangsa harus saling bersinergi, bersama perang melawan narkoba sehingga peredarannya dapat ditekan



**Gambar 24. Persentase Pernikahan Dini, 2020**

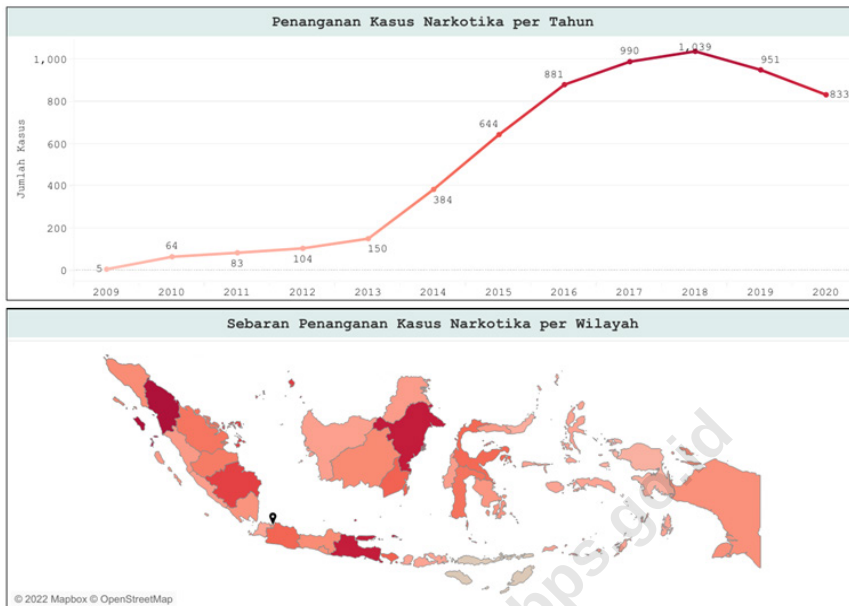
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Diolah

hingga zero narkoba.

Menurut data statistik penanganan kasus narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba dalam satu dekade terakhir cenderung meningkat. Adapun kasus narkoba di Sumatera Selatan cukup tinggi hingga masuk dalam lima besar kasus narkoba nasional. Hal ini tentu perlu dijadikan peringatan bagi penanganan narkoba yang ada di Sumatera Selatan.

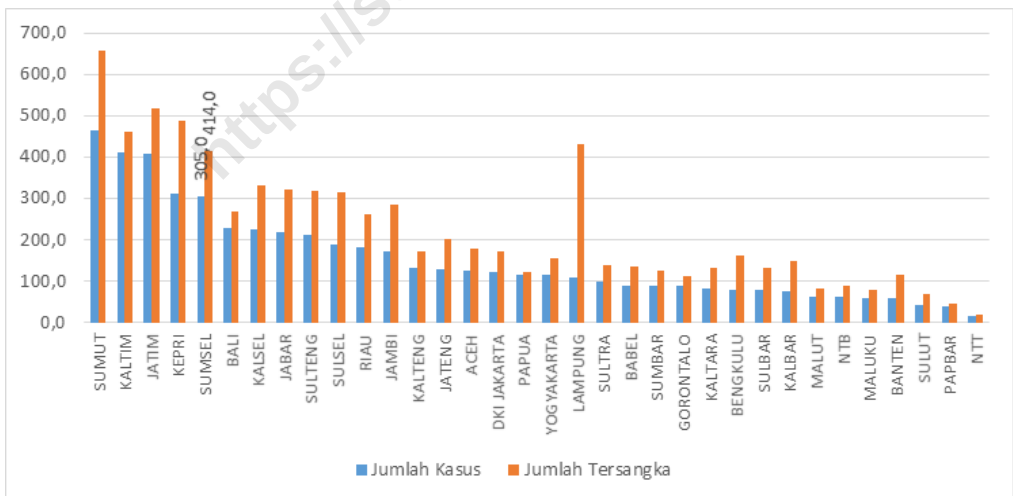
## D. Kesimpulan

1. Jumlah penduduk usia produktif Sumatera Selatan yang terus meningkat memunculkan banyak potensi ekonomi dan sosial di tahun 2045.
2. Berbagai persoalan usia produktif (pemuda) berpotensi mengganggu proses pembangunan



**Gambar 25. Penanganan Kasus Narkotika, 2020**

Sumber : Badan Narkotika Nasional



**Gambar 26. Jumlah Kasus dan Tersangka Narkotika Menurut Provinsi di Indonesia, 2020**

Sumber : Badan Narkotika Nasional

usia produktif di masa depan. Untuk itu, saat ini perlu adanya kolaborasi dan elaborasi berbagai pihak untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang ada.

3. Isu ketenagakerjaan di Sumatera Selatan cukup kompleks karena berkaitan dengan karakteristik penduduk Sumatera Selatan yang cukup beragam. Ketenagakerjaan menjadi semakin krusial karena akan bersinggungan dengan dampak bonus demografi.
4. Penduduk usia produktif yang berkualitas dari sisi pendidikan, karakter, kompetensi dan kesehatan menjadi kunci penting penting keberhasilan pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan pembangunan nasional.
5. Secara umum meskipun terjadi peningkatan kualitas penduduk usia produktif dan infrastruktur pendukung pembangunan tetapi masih kalah dibanding provinsi lainnya

<https://sumsel.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M. (2018). Bonus Demografi dan Jendela Peluang Meletakkan Dasar Pembangunan Manusia. Dalam Adioetomo, S.M. & Pardede, E.L (Ed). Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini (pp.23-35). Depok: Rajagrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Pemuda Indonesia 2020. Jakarta:BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Jakarta:BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2020. Jakarta:BPS.
- East Ventures. 2020. East Ventures Digital Competitiveness Index 2020: Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital di 34 Provinsi dan 24 Kota di Indonesia. Insight Report.
- International Labour Office ILO. 2011. Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. Geneva: ILO.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- <https://indeks-inovasi.brin.go.id/> diakses pada 18 April 2022
- <https://www.bnn.go.id>
- <https://www.bps.go.id>
- <https://www.brin.go.id>
- <https://www.oecd.org>
- <https://www.sumsel.bps.go.id>







4

# Profil Penduduk Lanjut Usia

- A. Lansia dan Bonus Demografi
- B. Lansia SMART, Tantangan dan Peluang
- C. Sebaran Lansia
- D. Lansia dan Keluarga
- E. Perlindungan Bagi Lansia
- F. Potensi Lansia di Masa Setelah Bonus Demografi
- G. Kesimpulan



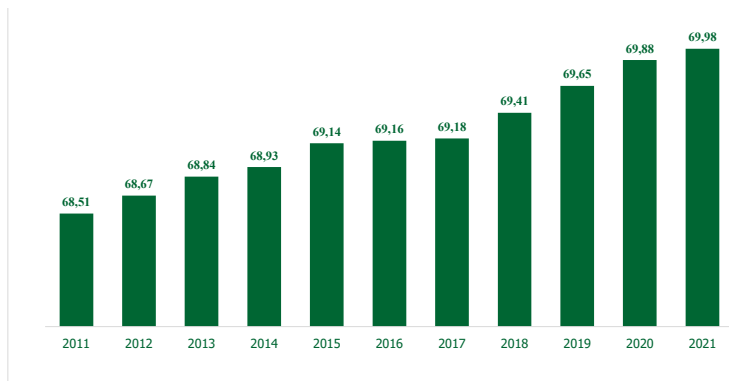


# Profil Penduduk Lanjut Usia

**A**ging population atau penuaan penduduk di masa mendatang akan menjadi isu yang krusial di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Struktur umur penduduk Sumatera Selatan saat ini berada pada tahap transisi dari penduduk muda menjadi penduduk tua atau lanjut usia. Hal ini karena proporsi penduduk muda (di bawah 15 tahun) kurang dari 30 persen, sementara proporsi penduduk lanjut usia (usia 60+) kurang dari 9 persen. Pada tahun 2010, proporsi penduduk usia 60+ tahun atau lebih sebesar 6,24 persen, meningkat menjadi 8,75 persen pada tahun 2020. Walaupun bukanlah masalah yang mendesak, tetap perlu melakukan program-program yang mendukung pembangunan kelanjutusiaan sehingga diharapkan lansia dapat tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif.

## A. Lansia dan Bonus Demografi

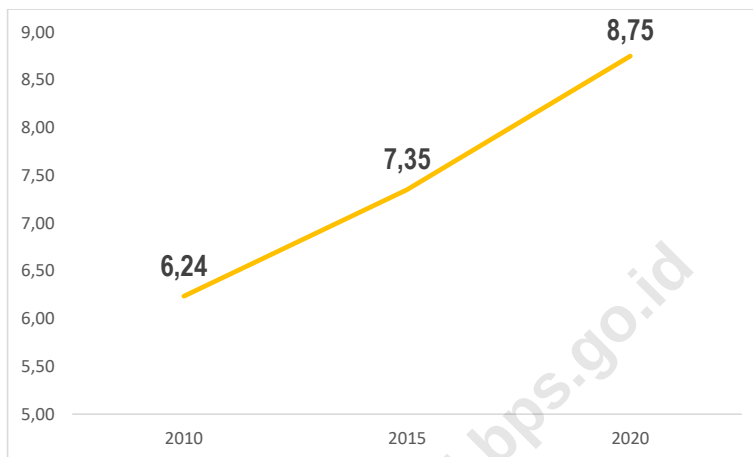
Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 dan *World Health Organization* (WHO) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) di Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,47 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,21 persen per tahun. Pada tahun 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Sumatera Selatan adalah 68,51 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 69,98 tahun.



**Gambar 1. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Sumatera Selatan, 2011-2021**

Sumber: BPS, Susenas Maret, 2011-2021

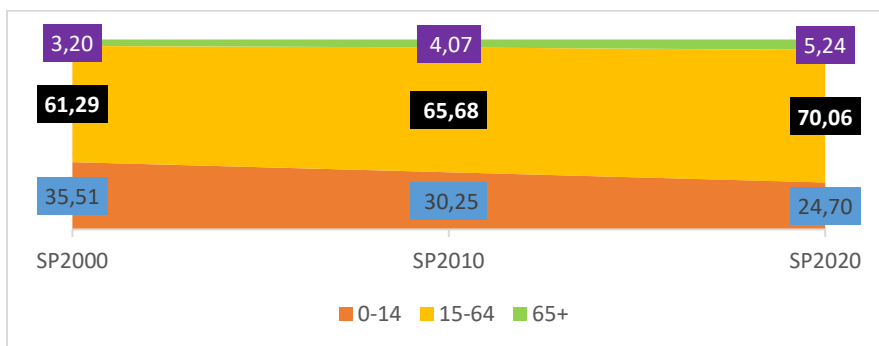
Menurut data proyeksi penduduk, Angka Kelahiran Total (TFR) di Sumatera Selatan 2020 sebesar 2,3 menurun dari tahun 2015 yang sebesar 2,4. Peningkatan harapan hidup dan penurunan fertilitas menyebabkan proporsi lansia dari waktu ke waktu meningkat. Pada tahun 2010, ada sebesar 6,24 persen penduduk lansia di Sumatera Selatan. Setiap tahun, proporsi penduduk lansia semakin meningkat hingga sebesar 8,75 persen di tahun 2020.



**Gambar 2. Persentase Penduduk Lansia Sumatera Selatan, 2010, 2015 dan 2020**

Sumber: Proyeksi SP2010, Supas 2015, Proyeksi Supas 2015, SP2020

Pada tahun 2000, proporsi penduduk usia produktif di Sumatera Selatan sebesar 61,29 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,06 persen di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Sumatera Selatan masih berada dalam masa bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk dengan usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Struktur umur penduduk Sumatera Selatan saat ini berada pada tahap transisi dari penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk muda (di bawah 15 tahun) kurang dari 30 persen, sementara proporsi penduduk tua (usia 65+) kurang dari 5 persen. Pada tahun 2000, proporsi penduduk usia 65 tahun atau lebih sebesar 3,20 persen, meningkat menjadi 4,07 persen pada tahun 2010 dan meningkat atau lebih menjadi 5,24 persen pada tahun 2020.



**Gambar 3. Komposisi Penduduk Sumatera Selatan menurut Kelompok Umur, 2000-2020**

Sumber: SP2000, SP2010, SP2020

Bonus demografi akan menciptakan jendela peluang (*window of opportunity*) ketika angka beban ketergantungan berada pada titik terendah. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi pada periode tahun 2020-2030 (Adioetomo, 2005). Selanjutnya, ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan mengalami fase penuaan penduduk (*aging population*).

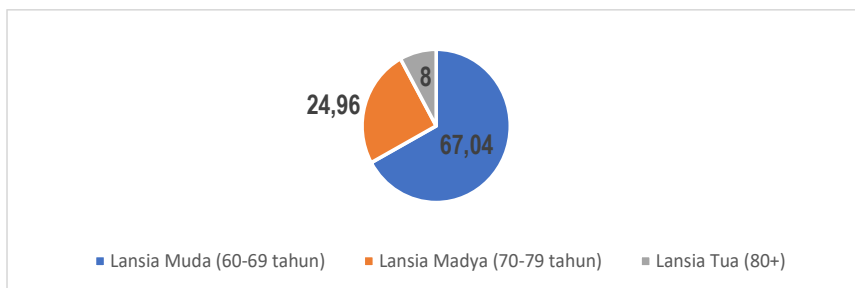
Lansia menunjukkan sifat kearifan dan kebijaksanaan serta kaya akan pengalaman menjadi faktor positif dari lansia (Perlmutter dan Hall, 1992). Lansia juga dianggap sebagai guru atau tokoh yang menjadi tempat pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Lansia juga memiliki keterbatasan, khususnya fisik yang mengakibatkan penurunan kesehatan dan kemampuan beraktivitas. Adanya bonus demografi juga menimbulkan dampak terjadinya ledakan jumlah penduduk lansia di era pasca bonus demografi yang dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah.

Bonus demografi memberikan konsekuensi jika pada era pasca bonus demografi akan terjadi ledakan jumlah lansia. Agar lansia tidak menjadi beban di kemudian hari, pra lansia saat ini harus berkualitas. Lansia masih dianggap sebagai pemimpin, dan memberikan nasehat dengan berbagai pengalaman yang dimiliki. Lansia yang aktif masih menjadi tulang punggung.

## B. Lansia SMART, Tantangan dan Peluang

Fenomena meningkatnya jumlah lansia memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan beberapa referensi, dampak penuaan penduduk diantaranya adalah penurunan produktivitas, penurunan tabungan, penurunan penerimaan pajak, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial, peningkatan beban ketergantungan, penurunan pendapatan per kapita yang akan berdampak pada penurunan konsumsi, dan peningkatan angka disabilitas.

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari mengingat banyak dari mereka saat ini masih berusia produktif dalam beberapa tahun yang akan datang akan berusia lanjut atau pensiun. Ketika seseorang menjadi lansia artinya dia berada pada fase puncak dalam siklus hidup manusia yang di dalamnya bagaikan rantai kehidupan yang saling berkaitan. Dengan kata lain, kondisi lansia nantinya akan ditentukan bagaimana keputusan yang diambil di masa lalu. Untuk itu, perlu persiapan serius serta dukungan dari berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga persentase yang akan menjadi lansia nantinya dapat menjadi lansia tangguh dan terjamin kehidupannya di hari tua.



**Gambar 4. Distribusi Lansia menurut Kelompok Umur di Sumatera Selatan, 2020**

Sumber: BPS, SP2020



Persebaran penduduk lansia di Sumatera Selatan menurut jenis kelamin masih didominasi oleh lansia laki-laki dibandingkan dengan lansia perempuan (52,29 persen berbanding 47,71 persen). Selanjutnya, jika dilihat dari kelompok umur, persentase lansia di Sumatera Selatan sebagian besar diisi oleh lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun) dengan persentase 67,04 persen, diikuti oleh lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun) sebesar 24,96 persen dan terakhir lansia tua (kelompok umur 80+ tahun) sebesar 8 persen.

Pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga turut andil dalam pemberdayaan lansia. Kementerian Kesehatan bergerak melalui pembentukan dan pembinaan lansia dengan posyandu lansia atau posbindu lansia. Langkah ini lebih mengutamakan upaya peningkatan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan disamping upaya penyembuhan dan pemulihan bagi lansia yang sakit. Tujuannya membentuk lansia “Smart” yaitu sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Pemerintah ingin mewujudkan lansia yang masih terus aktif dan menjadi potensi bagi pembangunan. Komposisi lansia yang masih didominasi oleh kelompok lansia muda, merupakan peluang bagi terwujudnya Lansia SMART.

### 1. Tantangan dan Peluang Mewujudkan Lansia SMART

Dalam perspektif masyarakat secara umum, lansia masih dianggap membebani keluarga atau orang-orang yang masih berusia produktif. Padahal seharusnya pandangan tersebut dapat ditempatkan secara bijak mengingat potensi dan kearifan yang dimiliki para lansia untuk mengawal bangsa ini, karena dengan pengalaman yang panjang, sudah tentu memiliki hal-hal yang patut kita maknai di era kekinian atas dasar pengalaman yang dimiliki lansia tersebut. Penambahan akumulasi penduduk lansia juga dikaitkan dengan penghitungan rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif termasuk di dalamnya adalah lansia. Dengan bertambahnya lansia sebagai kelompok yang dianggap kurang produktif maka beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif juga otomatis bertambah.



**Gambar 5. Rasio Ketergantungan Lansia, 2015-2020**

Sumber: Proyeksi SP2010, Supas 2015, Proyeksi Supas 2015, SP2020

Penambahan jumlah lansia diikuti dengan peningkatan rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk produktif. Pada tahun 2020, tercatat rasio ketergantungan lansia sebesar 13,55 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung sekitar 14 orang penduduk lansia. Suatu keniscayaan bahwa bertambahnya lansia berbanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan termasuk di dalamnya perawatan yang pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia. Untuk itu, perlu adanya peningkatan sinergi dalam melaksanakan program-program terkait

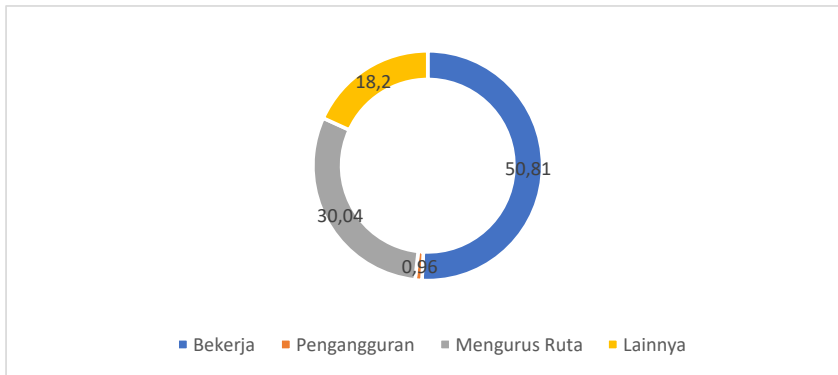
dengan lansia yang dapat mengurangi beban ketergantungan lansia terhadap kelompok usia produktif. Tujuannya adalah untuk membuat lansia menjadi sehat, mandiri, dan aktif selama mungkin guna turut mendorong ekonomi dapat tumbuh ketika lansia mereka bekerja.

Tantangan utama peningkatan penduduk lansia di Sumatera Selatan memiliki dampak sosial dan ekonomi baik bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. Banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satu hal yang paling utama adalah kestabilan finansial penduduk lansia. Tidak banyak lansia yang memiliki jaminan pensiun atau telah mempersiapkan finansial secara matang untuk kehidupan di hari tua. Sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa dalam satu struktur keluarga, orang tua (lansia) secara ekonomi harus bergantung pada anaknya atau yang lebih muda. Hal ini menjadikan penduduk usia produktif memiliki beban tanggungan yang banyak yaitu diri sendiri, keluarga inti, dan orang tua sehingga penduduk mereka menjadi bagian dari sandwich generation.

Transisi demografi yang mengubah struktur penduduk menjadi *ageing population* juga diiringi dengan transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit degeneratif. Permasalahan kesehatan ini juga menjadi tantangan bagi lansia. Menurut WHO (2012) beban kesehatan lansia di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berasal dari penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Kesehatan yang buruk pada lansia tidak hanya berdampak bagi individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan jaminan serta fasilitas kesehatan yang memadai untuk lansia. Lingkungan yang mendukung seperti transportasi ramah lansia juga penting diciptakan agar penduduk lansia dapat beraktivitas dengan baik.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh lansia. WHO menyatakan bahwa lansia merupakan kelompok usia paling rentan terpapar Covid-19. Kerentanan pada lansia terjadi karena melemahnya fungsi imun serta adanya penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, dan diabetes (LIPI, 2020). Dari data WHO, di Eropa, lebih dari 95% kematian terjadi pada usia lebih dari 60 tahun atau lebih, dan lebih dari 50% terjadi pada penduduk berusia 80 tahun atau lebih. Di Indonesia berdasarkan data bulan Juni 2020, persentase kematian pada kelompok lansia sebesar 43,60% dimana angka ini merupakan yang tertinggi dibanding kelompok umur lainnya. Pada kondisi ini, penduduk lansia memerlukan perlindungan dan akses terhadap makanan bergizi, ketersediaan kebutuhan dasar, obat-obatan, serta perawatan sosial. Untuk itu, sangat penting bagi negara untuk memberikan respon komprehensif terhadap dampak pandemi ini bagi lansia. Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting untuk melindungi serta menjaga lansia di situasi pandemi ini. Bagi keluarga yang memiliki lansia atau hidup bersama lansia, harus memperhatikan protokol kesehatan agar mencegah lansia terpapar Covid-19. Penting juga bagi keluarga yang tidak bertempat tinggal bersama lansia untuk tetap berusaha memantau dan memperhatikan lansia, serta memastikan kebutuhan sehari-hari lansia terpenuhi.

Terjadinya peningkatan jumlah lansia, selain menjadi tantangan, juga dapat memberikan kontribusi/peluang yang baik bagi negara apabila lansia berada dalam keadaan sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Penduduk lansia yang produktif, berkualitas, dan memiliki segudang pengalaman bisa menjadi kekuatan dan peluang untuk Sumatera Selatan. Mereka dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran-pemikiran untuk pembangunan.



**Gambar 6. Rasio Ketergantungan Lansia, 2015-2020**

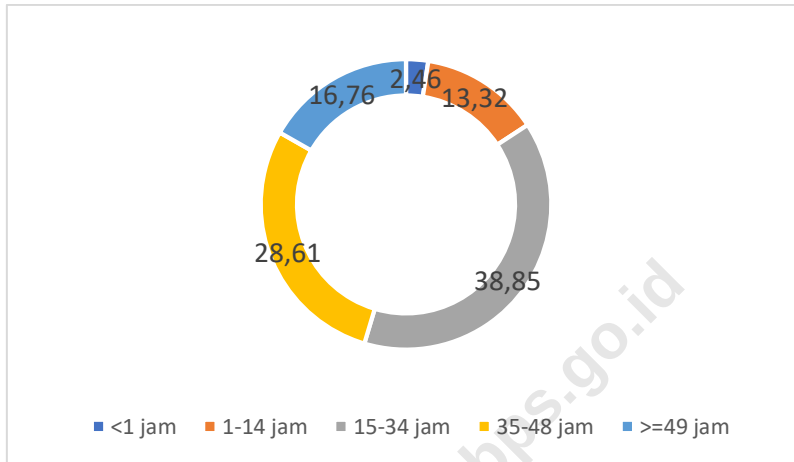
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020

Lansia bekerja tua dan berdaya, itulah kata yang mewakili sebagian besar lansia di Sumatera Selatan. Gambar 6 memperlihatkan bahwa sekitar separuh lansia masih tetap aktif bekerja di usia senja mereka (50,81 persen). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi lansia untuk bekerja, terutama faktor sosial demografi dan sosial ekonomi. Wirakartakusumah & Anwar (1994) mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga alasan yang memengaruhi lansia untuk bekerja. Pertama, masih banyak lansia yang tetap kuat secara fisik dan mental sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari pasar kerja. Kedua, terjunnya lansia ke pasar kerja karena desakan ekonomi. Ketiga, alasan yang bukan didasarkan pada motif ekonomi, tetapi lebih didasarkan pada motif aktualisasi diri atau emosi. Sementara itu, sebesar 30,04 persen lansia mengurus rumah tangga, 18,20 persen lansia melakukan kegiatan lainnya, dan sisanya sebesar 0,96 persen merupakan lansia pengangguran atau mencari pekerjaan.

Produktivitas lansia dan peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat melalui jumlah jam kerja. Seyogianya, jam kerja lansia semakin menurun seiring dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah. Partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi tidak lagi diutamakan pada kuantitas jam kerjanya, melainkan lebih kepada kualitas kerja yang tercermin keahlian dan pengalamannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak lansia yang bekerja secara penuh dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Bahkan, terdapat lansia yang bekerja secara berlebihan, yaitu dengan jumlah jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu. Berdasarkan jumlah jam kerja, dari setiap 10 orang pekerja lansia, setidaknya ada 1-2 orang yang bekerja secara berlebihan (jumlah jam kerja lebih dari 49 jam dalam seminggu). Lansia tentu tidak sepatutnya bekerja berlebihan. Selain itu, jam kerja berlebih akan mengancam kondisi fisik dan mental lansia dalam jangka panjang, serta menurunkan produktivitas dalam bekerja (Anker dkk, 2002). Sementara itu, pekerja lansia dengan jumlah jam kerja antara 15 - 34 jam sebesar 38,85 persen dan jumlah jam kerja antara 35 - 48 jam sebesar 28,61 persen.

Tingkat kesejahteraan lansia dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh lansia bekerja. Lansia memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menjamin kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, lansia bekerja biasanya memperoleh penghasilan yang lebih sedikit daripada kelompok usia produktif. Hal ini disebabkan adanya stigma bahwa produktivitas lansia menjadi rendah karena kondisi fisiknya yang lemah sehingga membuat upah atau pendapatan yang diterima lansia lebih rendah dibanding usia produktif. Padahal kebutuhan hidup lansia tidak jauh berbeda dari usia produktif. Bahkan terkadang lansia memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kesehatan dibanding usia produktif. Secara umum rata-rata penghasilan dari lansia yang bekerja yaitu sebesar 1,17 juta

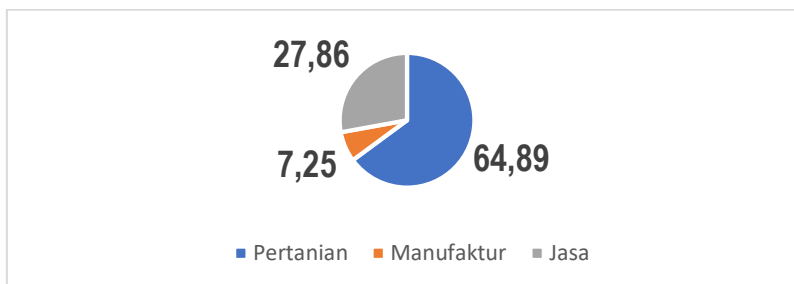
rupiah per bulan. bahwa sebesar 38,97 persen lansia yang bekerja memperoleh upah yang rendah. Upah rendah yang dimaksud dalam publikasi ini terbatas untuk penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas baik pertanian maupun non pertanian.



**Gambar 7. Rata-rata Jumlah Jam Kerja dan Persentase Penduduk Lansia Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

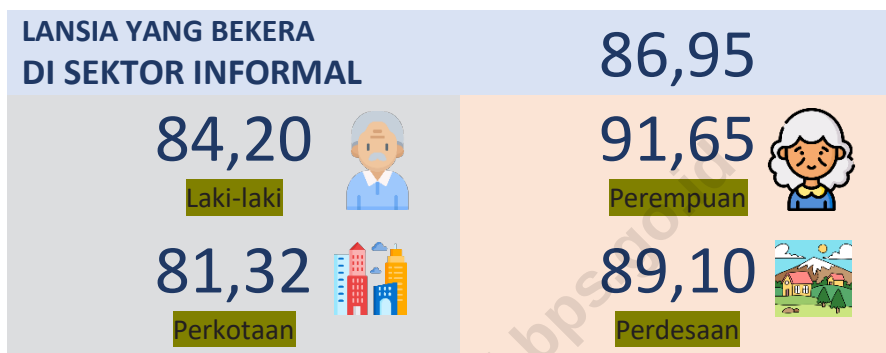
Jumlah penduduk lansia yang masih bekerja ini bisa dipandang bahwa mereka masih mampu bekerja tapi juga bisa bermakna bahwa tingkat kesejahteraan lansia masih rendah sehingga mereka terpaksa harus bekerja menghidupi diri dan keluarganya. Sektor pertanian ini merupakan sektor yang berperan besar dalam perekonomian penduduk Sumatera Selatan, terutama karena sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, sektor ini juga merupakan sektor yang paling tahan menghadapi krisis dan tetap tumbuh positif pada saat resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 melanda yang melanda seluruh dunia. Lebih dari separuh (64,89 persen) penduduk lansia bekerja di sektor pertanian, disusul sektor jasa (27,86 persen) dan sektor manufaktur sebesar 7,25 persen.



**Gambar 8. Lapangan Usaha Lansia Bekerja Tahun 2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sebagian besar penduduk lansia bekerja di sektor informal yaitu sebesar 86,95 persen sehingga membuat pekerja lansia menjadi rentan karena tidak memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, dan imbalan kerja layak. Jika dilihat dari aspek gender, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan memiliki persentase pekerja informal di atas 80 persen. Persentase pekerja informal perempuan mencapai sebesar 91,65 persen masih lebih besar bila dibandingkan dengan persentase pekerja informal laki-laki yaitu sebesar 84,20 persen. Berdasarkan tempat tinggal, lansia perdesaan yang bekerja di sektor informal (89,10) lebih besar dibandingkan di perkotaan (81,32).

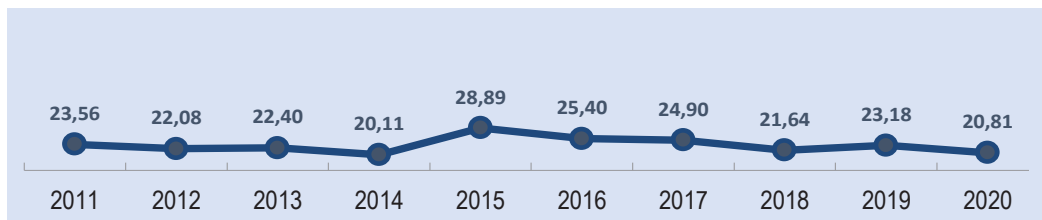


**Gambar 9. Lapangan Usaha Lansia Bekerja Tahun 2020**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020

## 2. Angka Kesakitan Pada Lansia

Keluhan kesehatan yang dialami penduduk lansia dapat mengakibatkan aktivitas sehari-harinya menjadi terganggu. Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia atau proporsi penduduk lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir pada tahun 2020 mencapai sebesar 20,81 persen. Angka kesakitan tahun 2020 Lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 23,56 namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 20,11. Angka kesakitan ini merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.



**Gambar 10. Angka Kesakitan Penduduk Lansia Sumatera Selatan Tahun 2011- 2020**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar) Maret 2011 - 2020

Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 21 orang di antaranya mengalami sakit. Angka kesakitan penduduk lansia perempuan lebih rendah dengan lansia laki-laki. Angka kesakitan laki-laki di Sumatera Selatan tercatat sebesar 21,91 dan penduduk lansia perempuan sebesar 19,77 persen. Angka kesakitan penduduk lansia yang tinggal di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang tinggal di daerah perdesaan. Angka kesakitan penduduk lansia di daerah perkotaan tahun 2020 sebesar 16,82 persen, sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 23,10 persen. Terlihat bahwa derajat kesehatan penduduk lansia di perkotaan lebih baik dibandingkan derajat kesehatan penduduk lansia di perdesaan. Kecenderungan ini terlihat jelas baik untuk penduduk lansia laki-laki maupun lansia perempuan.

**Tabel 1. Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Sumatera Selatan, 2020**

| Provinsi     | Jenis Kelamin |              |                       |
|--------------|---------------|--------------|-----------------------|
|              | Laki-laki     | Perempuan    | Laki-Laki + Perempuan |
| (1)          | (2)           | (3)          | (4)                   |
| Perkotaan    | 17,78         | 15,93        | 16,82                 |
| Perdesaan    | 24,24         | 22,01        | 23,10                 |
| <b>Total</b> | <b>21,91</b>  | <b>19,77</b> | <b>20,81</b>          |

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

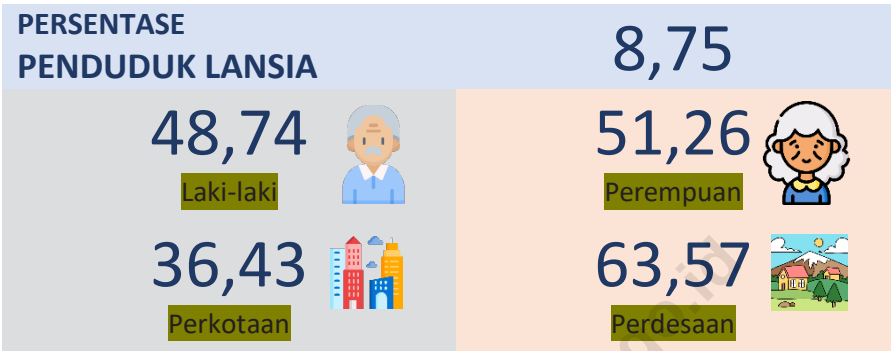
Sejalan dengan terjadinya transisi epidemiologi, penyakit yang dialami para penduduk lanjut usia merupakan penyakit tidak menular yang bersifat degeneratif atau disebabkan oleh faktor usia misalnya penyakit jantung, diabetes melitus, stroke, serta gangguan pendengaran dan penglihatan (Kemenkes RI, 2019). Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh penduduk lanjut usia. WHO menyatakan bahwa penduduk lanjut usia merupakan kelompok paling rentan terpapar Covid-19. Kerentanan ini terjadi karena melemahnya daya tahan tubuh serta adanya penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, dan diabetes (LIPI, 2020). Persentase kematian penduduk lanjut usia akibat Covid-19 merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

Dalam rangka penuaan penduduk, pemerintah telah mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lansia, antara lain dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan, yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia. Selain itu, sebagai respon terhadap pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi lansia, salah satunya melalui Panduan Perlindungan Lanjut Usia yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya perlindungan terhadap lansia, khususnya perempuan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi Gerakan Sayang Lansia yang tujuannya untuk mendorong lansia sehat, aman, dan terlindungi. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi lansia ditujukan untuk menjaga agar lansia tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan.



C. Sebaran Lansia

Persentase penduduk lansia di Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Selatan sebesar 8,75 persen. pada tahun 2020 penduduk lansia Sumatera Selatan telah mencapai 740.892 orang. Perbandingan persentase penduduk lansia (60+) Sumsel tahun 2020 antara laki-laki dan perempuan adalah 48,74 berbanding 51,26. Lansia di

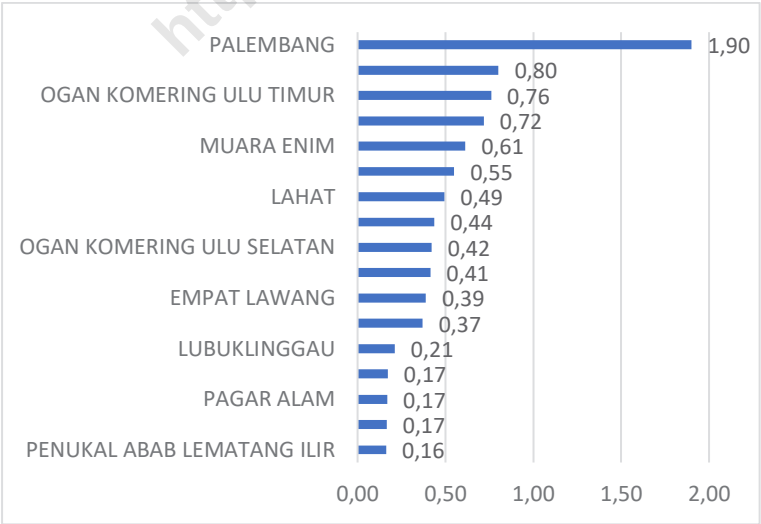


Gambar 11. Persentase Penduduk Lansia Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Sumatera Selatan, 2020

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Sumatera Selatan mayoritas tinggal di daerah perdesaan sebesar 63,57 persen dibandingkan dengan lansia yang tinggal di daerah perkotaan hanya 36,43 persen.

Populasi penduduk lansia tersebar secara tidak merata di berbagai wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Persentase tertinggi di tempati oleh Kota Palembang yang mencapai 1,9 persen penduduk lansia dibandingkan jumlah penduduk Sumatera Selatan. Kedua ditempati oleh Kabupaten Banyuasin yang mencapai 0,8 persen dan diikuti oleh Kabupaten Ogan



Gambar 12. Sebaran Penduduk Lansia Sumatera Selatan Menurut Wilayah, 2020 (%)

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Komering Ulu Timur sebesar 0,76 persen. Sementara itu, Kabupaten Penukal Abab Penukal Ilir mempunyai sebaran lansia sebesar 0,16 persen.

Persentase penduduk lansia kabupaten/kota bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota adalah 7,03 persen hingga 9,92 persen. Kabupaten/kota yang mempunyai lansia dengan persentase tertinggi di Sumsel berturut-turut adalah Pagar Alam (9,92%) , OKU Timur (9,91%), dan Empat Lawang (9,87%) sedangkan yang lainnya relatif sama, sekitar 7-9%, untuk terendah persentasenya adalah PALI (7,03%), Prabumulih (7,26%), dan Musi Banyuasin (7,48%). Persentase tertinggi untuk lansia laki-laki adalah OKU Timur (9,83%), Empat Lawang (9,56%), dan Pagar Alam (9,22%) dan terendah untuk lansia laki laki Prabumulih (7,00%), Lubuk Linggau (7,30%), dan Musi Rawas Utara (7,45%).

Sedangkan persentase lansia perempuan tertinggi di Pagar Alam (10,65%), Lahat (10,48% ) dan Palembang (10,38%) sedangkan kab/kota dengan persentase lansia perempuan terendah di Musi Banyuasin (7,44%), PALI (7,48%) dan Prabumulih (7,53%). Komposisi penduduk lansia setiap kabupaten kota nampak bervariasi, namun secara umum mengelompok dalam dua bentuk pola yaitu mayoritas laki-laki dan sebaliknya mayoritas perempuan. Secara umum,

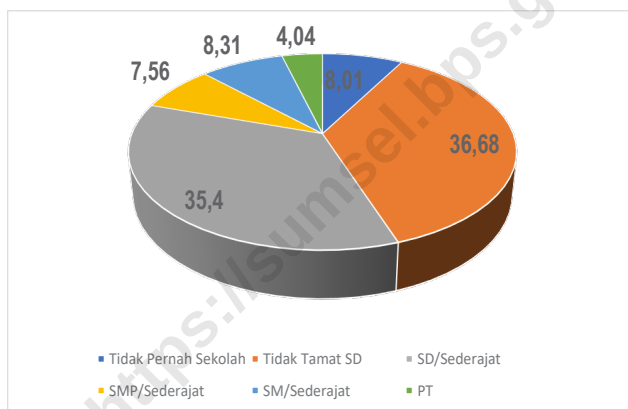
**Tabel 2. Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan, 2020**

| Kabupaten/Kota<br>(1)      | Laki-Laki<br>(2) | Perempuan<br>(3) | Total<br>(4) |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogan Komering Ulu          | 8,32             | 8,72             | 8,52         |
| Ogan Komering Ilir         | 8,04             | 7,77             | 7,91         |
| Muara Enim                 | 8,15             | 8,80             | 8,47         |
| Lahat                      | 9,01             | 10,48            | 9,72         |
| Musi Rawas                 | 9,05             | 8,70             | 8,88         |
| Musi Banyuasin             | 7,53             | 7,44             | 7,48         |
| Banyu Asin                 | 8,16             | 8,06             | 8,11         |
| Ogan Komering Selatan      | 8,81             | 8,67             | 8,74         |
| Ogan Komering Ulu Timur    | 9,83             | 9,99             | 9,91         |
| Ogan Ilir                  | 8,23             | 9,51             | 8,86         |
| Empat Lawang               | 9,56             | 10,21            | 9,87         |
| Penukal Abab Lematang Ilir | 6,59             | 7,48             | 7,03         |
| Musi Rawas Utara           | 7,45             | 7,99             | 7,71         |
| Palembang                  | 8,91             | 10,38            | 9,64         |
| Prabumulih                 | 7,00             | 7,53             | 7,26         |
| Pagar Alam                 | 9,22             | 10,65            | 9,92         |
| Lubuklinggau               | 7,30             | 8,05             | 7,67         |
| Sumsel                     | 8,48             | 9,04             | 8,75         |

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

kabupaten/kota mayoritas lansianya laki-laki ada 7 kabupaten yaitu OKI, OKU Selatan, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Timur, dan OKU, sedangkan kabupaten/kota lainnya lebih banyak perempuan.

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia terampil dan produktif yang pada gilirannya secara tidak langsung dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus sejak dini ditanamkan pada generasi muda sehingga dapat menjadi bekal mereka di masa datang. Dari sisi pendidikan, relatif banyak penduduk lanjut usia yang belum mengenyam pendidikan. Kondisi ini tercermin dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 yang menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia Sumatera Selatan didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Lebih dari separuh penduduk lanjut usia Sumatera Selatan tidak tamat SD/ sederajat atau tidak pernah bersekolah (44,69 persen). Sementara itu, hanya 42,96 persen penduduk lanjut usia Sumatera Selatan yang berpendidikan SD/ sederajat atau SMP/ sederajat, dan 12,35 persen yang berpendidikan SMA/ sederajat ke atas. Mengingat pentingnya sumber daya manusia (SDM), pendidikan dan pengetahuan serta keterampilan generasi muda perlu ditingkatkan



**Gambar 13. Distribusi Penduduk Lansia menurut Tingkat Pendidikan di Sumatera Selatan Tahun 2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

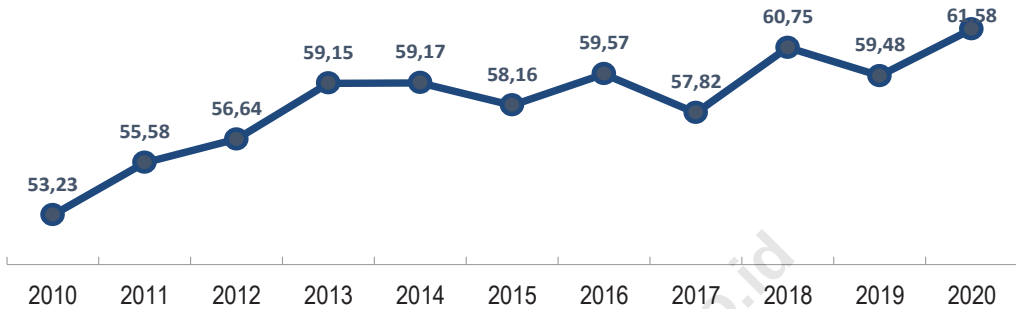
untuk mengantisipasi kesiapan mereka menjelang hari tua. Hal ini dikarenakan generasi muda yang sekarang akan menjadi lansia di masa datang diharapkan mampu berperan dalam memberikan wawasan yang luas kepada generasi berikutnya.

#### D. Lansia dan Keluarga

Bertambahnya jumlah lansia dari tahun ke tahun turut mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Satu di antara empat rumah tangga di Sumatera Selatan merupakan rumah tangga lansia. Kondisi tersebut seyogianya penting untuk menjadi perhatian bagi seluruh pihak, baik keluarga, masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, dan pemerintah untuk dapat memberikan dukungan, baik sosial maupun ekonomi. Apalagi jika dilihat dari angka proyeksi penduduk Sumatera Selatan tahun 2010-2045, penduduk lansia diprediksi akan semakin bertambah tiap tahunnya.

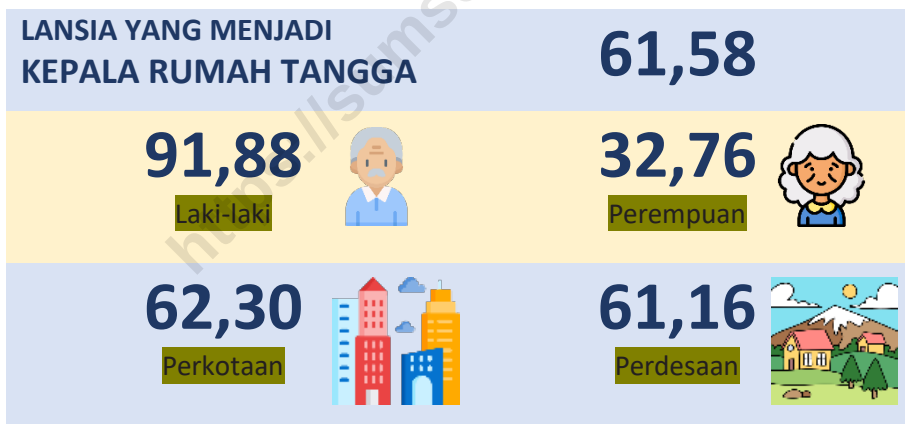
Sejak 2010 hingga 2020, persentase lansia yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) lebih dari 50 persen. Pada tahun 2010 terdapat 53,23 persen penduduk lansia di Sumatera Selatan,

dan persentasenya cenderung meningkat hingga tahun 2020 persentase lansia yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) sebanyak 61,58 persen. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa enam dari sepuluh lansia di Sumatera Selatan masih terbebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh anggota rumah tangganya dengan perannya sebagai KRT. Tingginya persentase lansia yang menjadi KRT tersebut bisa disebabkan karena



**Gambar 14. Perkembangan Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) di Sumatera Selatan 2010-2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020



**Gambar 15. Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT), 2020**

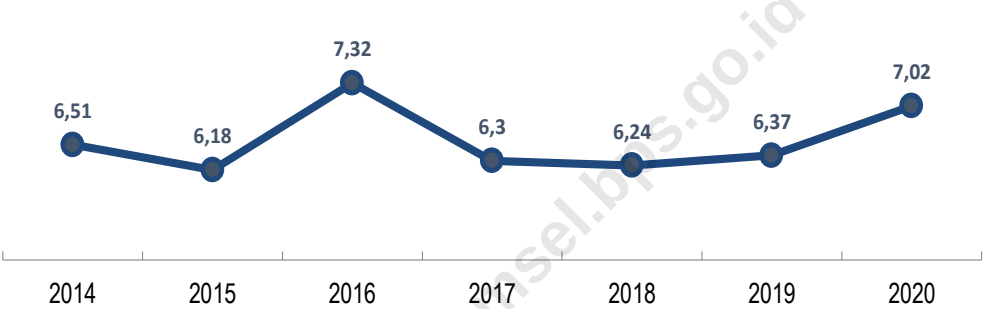
Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

perspektif sosial masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman bahwa pengambilan keputusan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga menjadi tanggung jawab dari anggota rumah tangga yang paling senior.

Tingginya persentase lansia yang berperan sebagai KRT tersebut merupakan kombinasi dari prespektif sosial masyarakat yang menganut budaya timur, bahwa lansia harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda, dan aspek budaya patrilineal yang mengutamakan peranan laki-laki dalam menjadi KRT. Selain itu, jika dilihat dari gender terdapat 32,76 persen lansia perempuan yang menjadi KRT. Fenomena itu dapat dimungkinkan terkait dengan lebih tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan dibandingkan laki-laki. Memperkuat

pernyataan tersebut, banyak dari lansia berjenis kelamin perempuan yang akhirnya meneruskan hidup dengan status cerai mati dan memilih untuk hidup tanpa pasangan, kecenderungan yang agak berbeda pada lansia laki-laki yang memilih untuk menikah kembali. Lebih jauh, berdasarkan hasil penelitian diungkapkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh lansia perempuan cenderung memiliki status ekonomi yang relatif rendah. Hal tersebut wajar karena secara fisik, perempuan biasanya tidak sekuat laki-laki.

Tempat tinggal lansia tidak dapat dipisahkan dari perawatan kesehatan lansia. Data Susenas 2020 menunjukkan bahwa 7,02 persen lansia Sumatera Selatan tinggal sendiri dan cenderung meningkat dalam empat tahun terakhir. Di tahun 2020, masih sebesar 92,98 persen lansia tinggal bersama keluarganya. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa lansia yang masih memiliki pasangan, kebutuhan hidupnya diperhatikan oleh pasangannya. Di sisi lain, lansia yang berstatus sebagai orang tua/mertua, kehidupannya akan diperhatikan oleh anak atau menantunya. Dengan dukungan keluarga, lansia akan merasa masih ada yang memperhatikan,



Gambar 16. Persentase Penduduk Lansia Status Tinggal Sendiri di Sumatera Selatan, 2014-2020

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

sehingga mereka akan merasa bahagia dan secara psikologis akan meningkatkan kesehatan. Adanya peningkatan persentase lansia yang tinggal dengan anggota keluarga maupun pasangan menunjukkan meningkatnya kesadaran dalam memperhatikan kesejahteraan lansia.

Selanjutnya, berdasarkan tipe daerah, persentase lansia di perdesaan yang tinggal sendiri lebih tinggi dibandingkan lansia di perkotaan (8,5 persen berbanding 4,45 persen). Lebih jauh, terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi pada lansia yang tinggal sendiri antara lansia perempuan dengan lakilaki (9,64 persen berbanding 4,27 persen). WHO (1977)

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Lansia Menurut Pola Tempat Tinggal Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah di Sumatera Selatan, 2020

| Karakteristik | Tinggal Sendiri | Tinggal Bersama Keluarga | Total |
|---------------|-----------------|--------------------------|-------|
| (1)           | (2)             | (3)                      | (4)   |
| Perkotaan     | 4,45            | 95,55                    | 100   |
| Perdesaan     | 8,50            | 91,5                     | 100   |
| Laki-laki     | 4,27            | 95,73                    | 100   |
| Perempuan     | 9,64            | 90,36                    | 100   |

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

menggambarkan bahwa lansia yang tinggal sendiri merupakan kelompok yang berisiko dan memerlukan perhatian khusus (Iliffe dkk. 1992). Lansia yang tinggal sendiri kemungkinan: a) cenderung miskin; b) Memiliki pola makan kurang baik sehingga berpengaruh terhadap kesehatannya; dan c) Sebagian besar tinggal di pedesaan.

Status ekonomi lansia dilihat berdasarkan status ekonomi rumah tangga dimana lansia tersebut tinggal. Rumah tangga lansia diurutkan berdasarkan pengeluaran per kapitanya kemudian dikelompokkan ke dalam 40 persen rumah tangga lansia dengan status ekonomi terbawah, 40 persen rumah tangga lansia dengan status ekonomi menengah, dan 20 persen rumah tangga lansia dengan status ekonomi teratas. Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa lansia di Sumatera Selatan mayoritas berada di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (39,7 persen). Sementara itu, lansia yang tinggal pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas hanya sebesar 21,47 persen

**Tabel 4. Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran di Sumatera Selatan, 2020**

| Karakteristik | 40 Persen<br>Terbawah | 40 Persen<br>Menengah | 20 Persen<br>Teratas | Total      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| (1)           | (2)                   | (3)                   | (4)                  | (5)        |
| Perkotaan     | 35,37                 | 38,65                 | 25,98                | 100        |
| Perdesaan     | 37,82                 | 39,70                 | 22,48                | 100        |
| Laki-laki     | 33,07                 | 40,99                 | 25,95                | 100        |
| Perempuan     | 39,87                 | 38,66                 | 21,47                | 100        |
| <b>Total</b>  | <b>36,55</b>          | <b>39,79</b>          | <b>23,65</b>         | <b>100</b> |

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

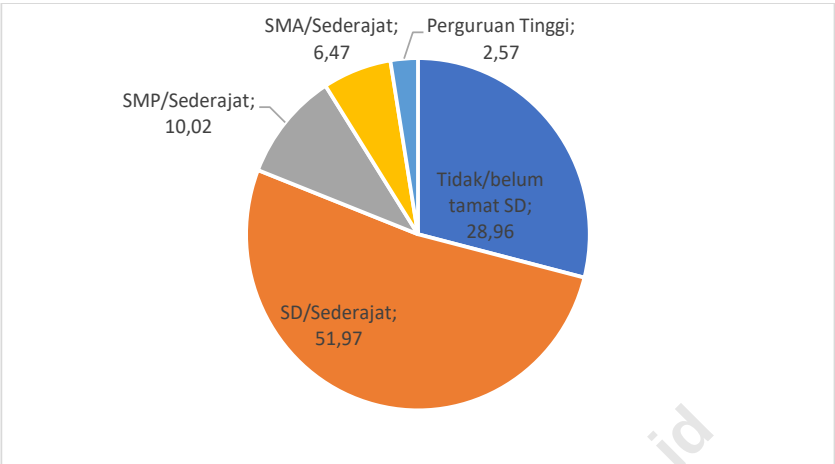
atau hanya sekitar 2 dari 10 lansia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lansia di Sumatera Selatan masih cukup mengkhawatirkan secara ekonomi, terlebih jika hal ini terjadi pada lansia dengan kondisi kesehatan yang sudah tidak prima dan membutuhkan biaya pengobatan yang relatif tinggi.

Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase lansia yang tinggal pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah berbeda antara lansia di perkotaan (35,37) dengan lansia di pedesaan (37,82). Terdapat juga perbedaan status ekonomi antara lansia laki-laki dan lansia perempuan apabila dilihat menurut jenis kelamin. Hal ini terlihat dari lebih tingginya persentase lansia perempuan yang berada pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah daripada lansia laki-laki (33,07 persen berbanding 39,87 persen).

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini, penduduk lansia bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 80,93 persen pada Agustus 2020. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 2,57 persen pada Agustus 2020.

Penduduk lansia yang bekerja sebagai pengusaha dengan buruh tetap pada tahun 2020 sebesar 3,74 persen. Persentasenya masih sangat rendah bila dibandingkan dengan lansia yang bekerja pada status pekerjaan lainnya diluar pekerja bebas baik pertanian maupun non pertanian. Hal ini menunjukkan skala usaha penduduk lansia Sumatera Selatan pada umumnya masih rendah. Penduduk lansia yang memiliki status pekerjaan berusaha umumnya





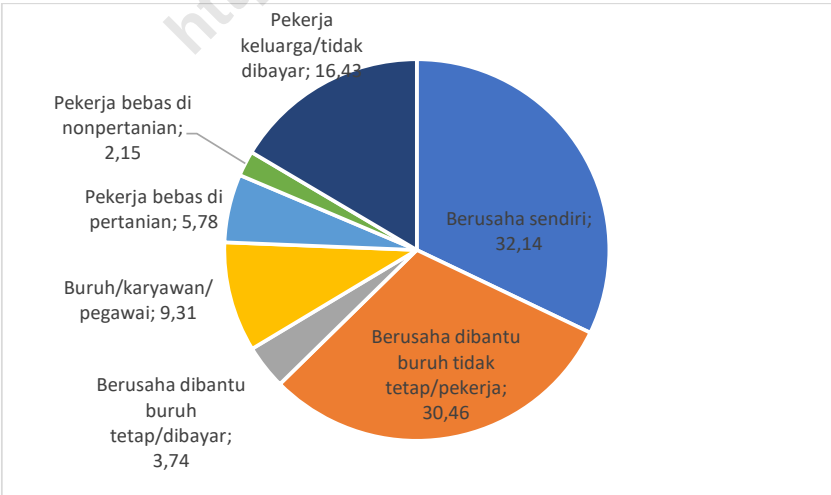
**Gambar 17. Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Selatan, 2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

adalah mereka yang berusaha sendiri yaitu sebesar 32,14 persen atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/art sebesar 30,46 persen.

**E. Perlindungan Bagi Lansia**

Sejalan dengan bertambahnya usia, kondisi fisik manusia akan menurun. Oleh karena itu, penduduk lanjut usia memiliki kerentanan sosial maupun ekonomi yang lebih tinggi



**Gambar 18. Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Sumatera Selatan, 2020**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020

dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan terciptanya kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, termasuk di dalamnya lansia. Selain itu, lansia juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu diperhatikan khususnya dengan program-program perlindungan sosial. Bab ini akan membahas beberapa program terkait perlindungan sosial yang ditujukan kepada penduduk lansia, baik yang berupa bantuan sosial maupun jaminan sosial.

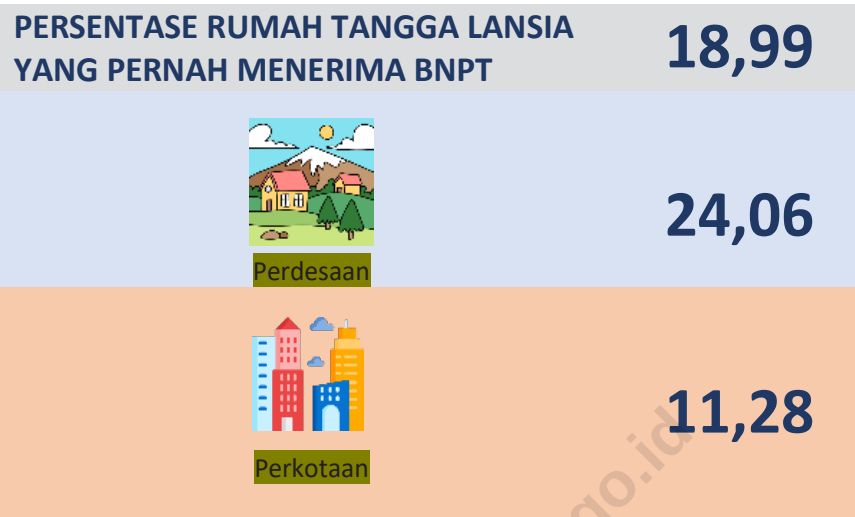
Menurut Kidd, Stephen dkk. (2017), dengan terus bertambahnya penduduk lansia terutama di kalangan penduduk termiskin di Indonesia, sebuah sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk penduduk lansia akan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan nasional secara signifikan. Lebih lanjut menurut Kidd, Stephen dkk. (2017), dampak positif pemberian bantuan sosial lansia yang dapat terjadi di antara lain:

1. Keluarga yang bekerja dapat berinvestasi lebih banyak untuk anak-anak mereka, sehingga akan menghasilkan angkatan kerja masa depan yang lebih produktif;
2. Penduduk lanjut usia akan turut berkontribusi pada investasi ini dengan mendukung cucu-cucu mereka (karena mayoritas lansia yang menerima bantuan sosial akan memberikan sebagian bantuan sosial yang mereka terima kepada anak atau cucu mereka);
3. Penyaluran bantuan tersebut akan memicu belanja, dan menciptakan pasar bagi para wirausahawan di tingkat lokal, sehingga akan membentuk lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi;
4. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar ini akan meningkatkan pendapatan pajak, yang pada akhirnya akan dapat membiayai alokasi anggaran untuk perlindungan sosial di masa depan, dan menciptakan lingkaran positif yang memastikan terlaksananya suatu sistem perlindungan sosial bagi penduduk lansia yang sesuai bagi negara berpendapatan menengah;
5. Hal yang terpenting adalah, dari perspektif hak asasi manusia, seluruh penduduk Indonesia akan mendapatkan perlindungan yang dapat membantu mereka menjalani hari-hari senja mereka dengan penuh harkat dan martabat.

Bantuan Sosial Lansia Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni program subsidi beras sejahtera/rastra. BPNT telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2017. Pelaksanaan BPNT menggantikan penyaluran beras langsung menjadi uang dalam kartu yang dapat dicairkan setiap bulannya dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya, masyarakat dibebaskan dapat membeli kebutuhan pokoknya mulai dari beras, minyak goreng, membeli kebutuhan pangan berupa beras/telur di warung elektronik gotong royong (*e-warong*).

Gambar 19 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga lansia yang pernah menerima BPNT tahun 2020 sekitar 18,99 persen, dengan persentase di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan (24,06 persen dibanding 11,28 persen).

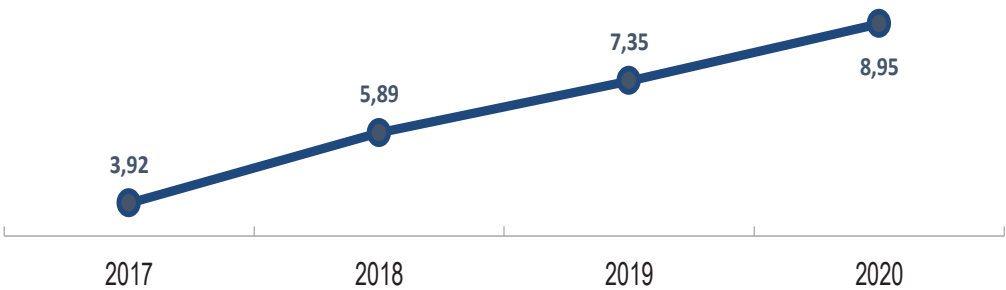
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk lansia yang menerima PKH sejak tahun 2017 terus meningkat. Pada tahun 2017 tercatat



Gambar 19. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima BNPT Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Pengeluaran di Sumatera Selatan, , 2020

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

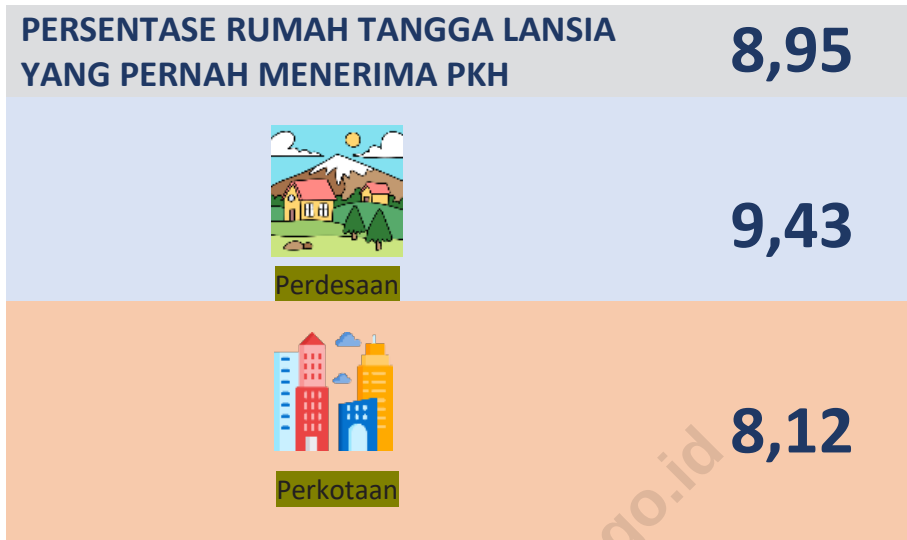
hanya 3,92 persen dari total lansia di Sumatera Selatan menerima PKH, dan terus meningkat hingga sebesar 8,95 persen pada tahun 2020. Dengan meningkatnya jumlah lansia yang mendapatkan PKH, lansia didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.



Gambar 20. Perkembangan Penerima PKH dari Penduduk Lansia di Sumatera Selatan, 2017-2020

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Berdasarkan tipe daerah, persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di perdesaan sebesar 9,43 persen lebih tinggi dibanding perkotaan sebesar 8,12 persen.



**Gambar 21. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Pengeluaran di Sumatera Selatan, 2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Persentase rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS tahun 2020 sekitar 13,59 persen. Lebih rinci dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS dan dapat menunjukkan kartu sebesar 9,12 persen. Menurut tipe daerah, persentase rumah tangga lansia di perkotaan yang memiliki KPS/KKS lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (10,57 persen dibanding 12,14 persen).

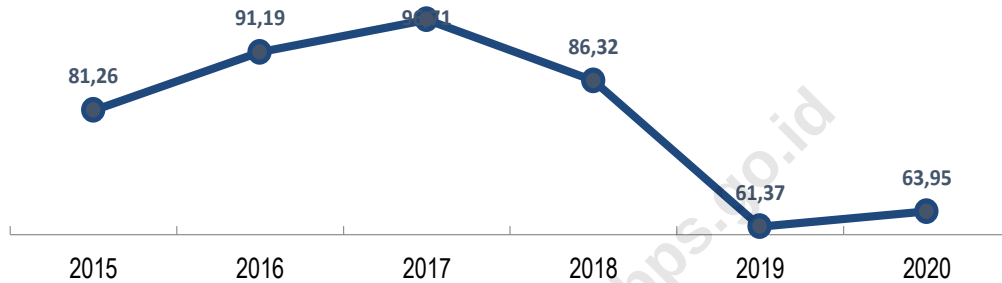
**Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki KPS/KKS Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Pengeluaran di Sumatera Selatan, 2020**

|                         | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| (1)                     | (2)       | (3)       | (4)                   |
| Dapat ditunjukkan       | 5,19      | 7,03      | 9,12                  |
| Tidak dapat menunjukkan | 6,95      | 3,54      | 4,47                  |
| Tidak memiliki          | 87,86     | 89,43     | 86,41                 |

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Populasi lansia yang sedemikian besar membawa dampak positif apabila lansia hidup dengan mandiri, sehat, aktif, dan produktif, namun bisa membawa dampak negatif apabila lansia hidup dalam kondisi ketergantungan penuh pada orang lain atau keluarga, sakit dan tidak produktif. Oleh karena itu, dalam penanganan permasalahan lanjut usia diperlukan program yang komprehensif dan berkesinambungan yang mampu menjawab kebutuhan lansia baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Salah satu upayanya adalah program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.

Jumlah penduduk lansia yang memiliki jaminan kesehatan dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk lansia Sumatera Selatan yang memiliki jaminan kesehatan tercatat sebanyak 81,26 persen menurun menjadi 63,95 persen pada tahun 2020. sehingga pada tahun 2020 masih terdapat 36,05 persen penduduk lanjut usia yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa *Universal Health Coverage* belum sepenuhnya terwujud di Sumatera Selatan. Artinya sistem jaminan kesehatan nasional belum mampu mencakup seluruh penduduk lanjut usia Sumatera Selatan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar seluruh penduduk lanjut usia di Sumatera Selatan memiliki jaminan kesehatan mengingat urgensi yang relatif tinggi bagi mereka untuk memiliki jaminan kesehatan tersebut.



**Gambar 22. Perkembangan Kepemilikan Jaminan Kesehatan oleh Penduduk Lansia di Sumatera Selatan, 2015-2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, persentase lansia yang memiliki JKN sebesar 63,95 persen, dengan persentase lansia di perkotaan yang memiliki JKN lebih tinggi dibanding lansia di perdesaan 79,17 persen berbanding 55,22 persen. Kondisi tersebut terjadi kemungkinan bahwa lansia di perkotaan memperoleh informasi yang memadai dan pelayanan jaminan kesehatan yang lebih baik dibanding di perdesaan

Jenis jaminan kesehatan yang banyak dimiliki lansia adalah BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), sebanyak 35,52 persen. BPJS PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta memberikan perlindungan keuangan atas pengeluaran kesehatan akibat sakit.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004), jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam Pasal 18 UU 40/2004 juga diuraikan lebih lanjut mengenai jenis program jaminan sosial yang meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

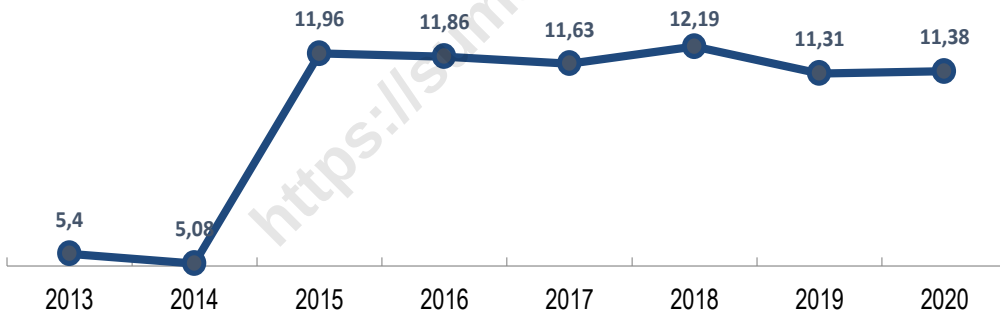
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, secara umum jenis jaminan sosial dapat diklasifikasi menjadi 2 yakni jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup keempat jaminan sosial selain jaminan kesehatan di atas. Gambar 4. 23 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, persentase lansia yang memiliki Jaminan Sosial sebesar 11,38 persen meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 5,4 persen.

**Tabel 6. Persentase Penduduk Lansia Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan, Jenis Jaminan Kesehatan, dan Karakteristik di Sumatera Selatan, 2020**

| Karakteristik<br>(1)       | Persentase<br>(2) |
|----------------------------|-------------------|
| Memiliki jaminan kesehatan | 63,95             |
| Perkotaan                  | 79,17             |
| Perdesaan                  | 55,22             |
| Laki-laki                  | 63,63             |
| Perempuan                  | 64,24             |
| PBI                        | 35,52             |
| Non PBI                    | 20,62             |
| Jamkesda                   | 9,63              |
| Asuransi Swasta            | 0,56              |

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Selain jaminan kesehatan, jaminan sosial di Indonesia juga mencakup jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).


**Gambar 23. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial di Sumatera Selatan, 2013-2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Pada Tabel 7 terlihat bahwa terdapat 11 dari 100 rumah tangga lansia di Sumatera Selatan yang telah memiliki jaminan sosial dengan persentase di perkotaan hampir empat kali lebih tinggi dibanding di perdesaan (21,61 persen dibanding 5,39 persen). Angka tersebut dimungkinkan karena akses dan fasilitas di perkotaan yang lebih baik membuat para lansia lebih mudah untuk mendapatkan jaminan sosial dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.

Berdasarkan jenisnya, tampak bahwa jaminan sosial yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia adalah jaminan pensiun/veteran (8,99 persen). Jaminan pensiun/veteran menjadi yang terbanyak dimiliki dapat disebabkan karena banyaknya lansia yang dulu pekerjaannya merupakan pegawai negeri sipil/polisi/tentara. Sementara itu, pesangon PHK merupakan jaminan yang paling sedikit dimiliki oleh rumah tangga lansia, yakni hanya 2,21 persen.



**Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Kepemilikan Jaminan Sosial, Jenis Jaminan Sosial, dan Karakteristik di Sumatera Selatan, 2020**

| Karakteristik<br>(1)      | Persentase<br>(2) |
|---------------------------|-------------------|
| Memiliki jaminan sosial   | 11,38             |
| Jaminan pensiun           | 8,99              |
| Jaminan hari tua          | 5,46              |
| Asuransi kecelakaan kerja | 4,37              |
| Asuransi kematian         | 5,31              |
| Pesangon PHK              | 2,21              |
| Perkotaan                 | 21,61             |
| Pedesaan                  | 5,39              |

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sebesar 80,47 persen lansia pernah menggunakan jaminan kesehatan dengan menggunakan BPJS PBI sebesar 44,04 perse, BPJS Non PBI 51,77 persen, Jamkesda 2,36 persen, Asuransi Swasta 0,91 persen dan Perusahaan/ kantor sebesar 1,47 persen.

**Tabel 8. Persentase Lansia yang Pernah Menggunakan Jaminan Kesehatan dan Jenis Berobat di Sumatera Selatan, 2020**

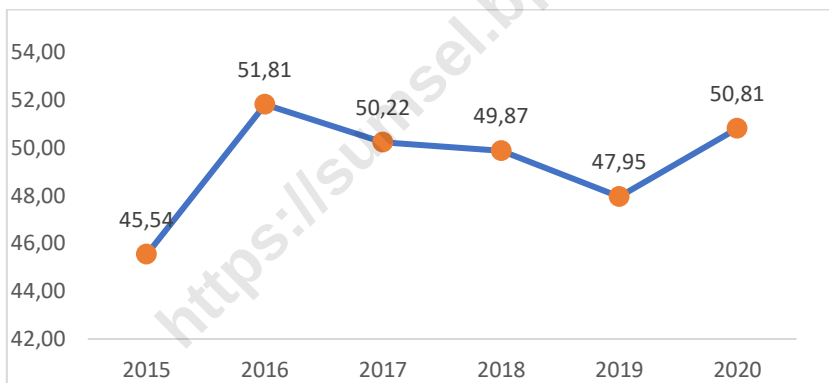
| Menggunakan<br>Jamkesmas untuk<br>Rawat Inap<br><br>(1) | Jaminan Kesehatan |                        |                 |                           |                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                         | BPJS PBI<br>(2)   | BPJS Non<br>PBI<br>(3) | Jamkesda<br>(4) | Asuransi<br>Swasta<br>(5) | Perusahaan/<br>kantor<br>(6) |
| 80,47                                                   | 44,04             | 51,77                  | 2,36            | 0,91                      | 1,47                         |

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

## F. POTENSI LANSIA DI MASA SETELAH BONUS DEMOGRAFI

Dalam Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019, disebutkan bahwa pemberdayaan lanjut usia, keluarga, dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif selama mungkin (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016). Rencana aksi di tahun mendatang memang belum ditetapkan, namun misi yang terkandung dalam Permenkes 25 Tahun 2016 tersebut masih relevan. Potensi terjadinya ageing population di masa depan, diharapkan dapat diantisipasi dengan peningkatan pemberdayaan lansia. Penduduk yang saat ini berusia 40 tahun ke atas diharapkan akan tetap mandiri, aktif dan produktif hingga lansia nanti. Dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2016, mandiri adalah kemampuan untuk melakukan aktifitas sehari-hari secara mandiri. Aktif adalah kemampuan bergerak dan melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa bantuan orang lain dan beraktifitas dalam kehidupan sosial. Produktif adalah kemampuan untuk berdaya guna bagi dirinya dan atau orang lain.

Perkembangan lansia yang bekerja cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 45,54 persen, menjadi 50,81 persen pada tahun 2020 (Gambar 24). Meningkatnya lansia bekerja secara umum mencerminkan peningkatan partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi, perpanjangan usia produktif, serta besarnya potensi pemberdayaan lansia dalam bonus demografi.



**Gambar 24. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja di Sumatera Selatan, 2016-2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

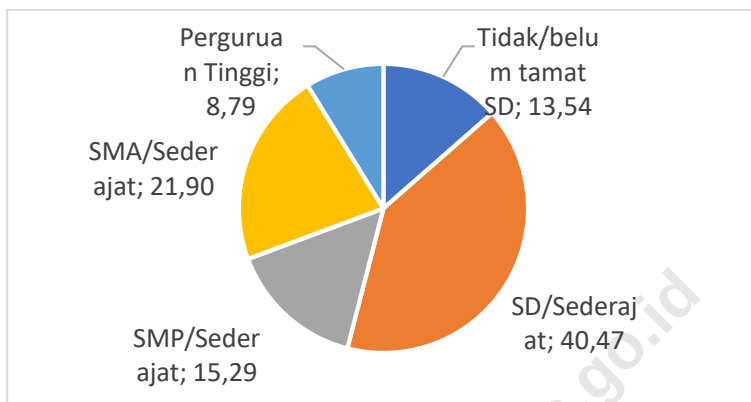
### Profil Penduduk Pralansia

Calon lansia dimasa setelah bonus demografi selesai yang diperkirakan akan terjadi setelah tahun 2035 adalah penduduk yang berumur 45 s/d 59 tahun atau dikategorikan kelompok umur pralansia pada saat SP2020. Menurut Depkes RI (2013) klasifikasi Pralansia adalah seseorang yang berusia antara 45-59 tahun. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk pralansia di Sumatera Selatan sebesar 1,38 juta atau 16,28 persen dari penduduk tahun 2020. Mereka yang terkategori pralansia akan menjadi lansia di tahun 2036. Kelompok ini akan menjadi beban generasi selanjutnya apabila tidak mempunyai kualitas dan persiapan yang terukur.

Dari data Sakernas 2020, mayoritas pralansia menyenangi Pendidikan sampai SD/ sederajat yang mencapai 40,20 persen. Pralansia yang tamat SMA/ sederajat sebesar 22,19 persen. Masih ada sebesar 13,82 persen pralansia yang tidak tamat SD dan hanya sebesar 4,43 persen pralansia yang menyenangi Pendidikan hingga perguruan tinggi.

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020

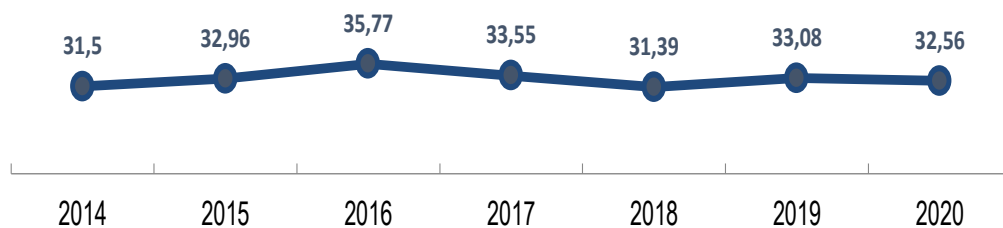
Sektor pralansia bekerja menentukan kondisi perekonomiannya. Sektor informal akan memperoleh upah yang lebih sedikit, sehingga kesempatan menabung untuk menikmati



**Gambar 25. Kelompok Pralansia Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Sumatera Selatan, 2020**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020  
masa lansia akan semakin kecil.

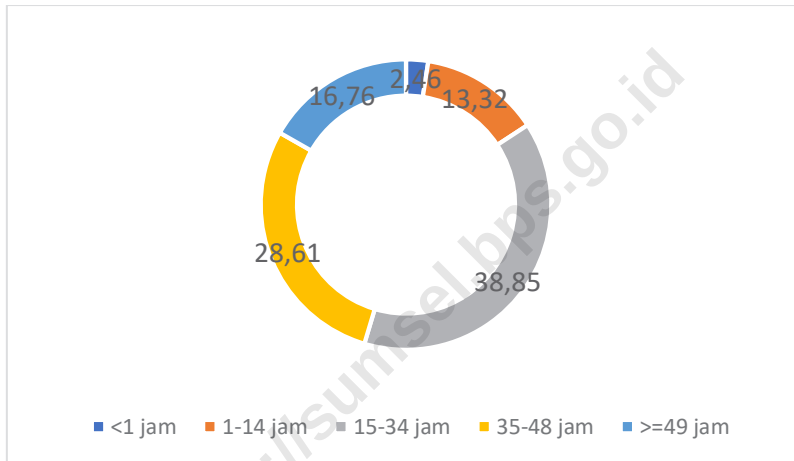
Produktivitas lansia dan peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat melalui jumlah jam kerja. Seyogianya, jam kerja lansia semakin menurun seiring dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah. Partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi tidak lagi diutamakan pada kuantitas jam kerjanya, melainkan lebih kepada kualitas kerja yang tercermin keahlian dan pengalamannya. Rata-Rata Jumlah Jam Kerja Lansia yang Bekerja tahun 2020 sebesar 32,56 jam kerja dalam seminggu. Menurun dari tahun 2019 yang sebesar 33,08 jam kerja, namun meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 31,5 jam kerja dalam seminggu.



**Gambar 26. Rata-Rata Jumlah Jam Kerja Lansia yang Bekerja di Sumatera Selatan, 2014-2020**

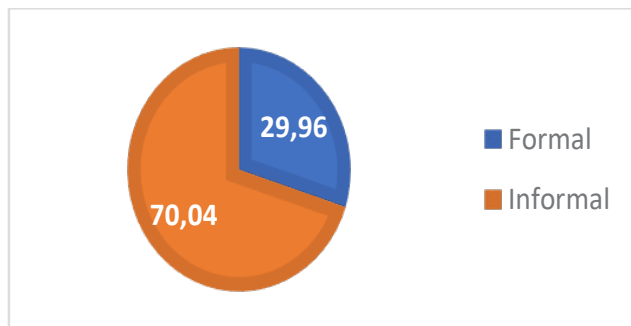
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020

Seiring dengan penurunan kondisi fisik, lansia selayaknya tidak bekerja secara berlebihan dari segi waktu. Apabila lansia bekerja secara berlebihan, kondisi fisik dan mental lansia kemungkinan akan memburuk dalam jangka panjang. Jam kerja berlebih berdampak pada penurunan produktivitas pekerjaan (ILO, 2011 dalam Statistik Penduduk Lanjut Usia 2017). Namun pada kenyataannya, masih banyak lansia yang bekerja secara penuh dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Bahkan, terdapat lansia yang bekerja secara berlebihan, atau disebut *excessive hours*, yaitu dengan jumlah jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu. Sebesar 16,76 persen lansia di Sumatera Selatan bekerja secara berlebihan. Lansia bekerja di Sumatera Selatan paling banyak memiliki jam kerja 15-34 jam dalam seminggu. Hal ini menunjukkan lansia bekerja di Sumatera Selatan masih aktif di pasar kerja dan berusaha untuk tidak tergantung pada penduduk lainnya.



**Gambar 27. Rata-rata Jumlah Jam Kerja dan Persentase Penduduk Lansia Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu di Sumatera Selatan, 2020**

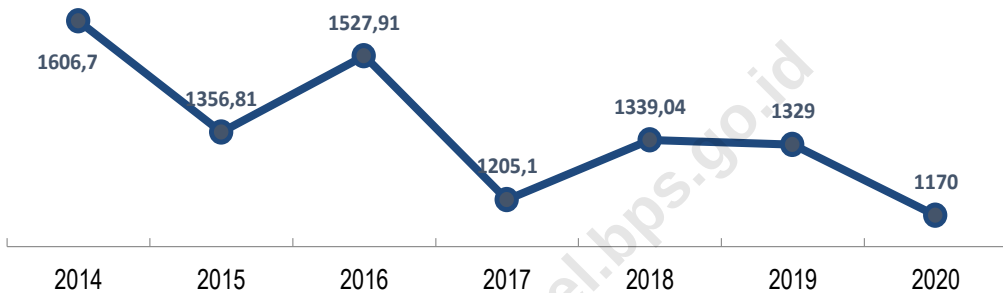
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020



**Gambar 28. Kelompok Pralansia Bekerja Menurut Sektor di Sumatera Selatan, 2020**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tingkat kesejahteraan lansia dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh lansia bekerja. Lansia memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menjamin kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, lansia bekerja biasanya memperoleh penghasilan yang lebih sedikit daripada kelompok usia produktif. Hal ini disebabkan adanya stigma bahwa produktivitas lansia menjadi rendah karena kondisi fisiknya yang lemah sehingga membuat upah atau pendapatan yang diterima lansia lebih rendah dibanding usia produktif. Padahal kebutuhan hidup lansia tidak jauh berbeda dari usia produktif. Bahkan terkadang lansia memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kesehatan dibanding usia produktif. Berdasarkan Gambar 4. 29 dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata penghasilan dari lansia yang bekerja tahun 2020 yaitu sebesar 1,17 juta rupiah per bulan menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 1,61 juta rupiah per bulan.



**Gambar 29. Rata-rata Penghasilan Penduduk Lansia di Sumatera Selatan, 2014-2020**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020

## G. KESIMPULAN

1. Peningkatan Usia Harapan Hidup dan penurunan angka fertilitas berdampak pada semakin meningkatnya jumlah lansia.
2. Sebagian besar lansia merupakan kepala keluarga khususnya lansia laki-laki dan masih banyak lansia yang tinggal sendiri khususnya lansia perempuan dan yang tinggal di perdesaan.
3. Rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk produktif semakin meningkat. Dengan bertambahnya lansia sebagai kelompok yang dianggap kurang produktif maka beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif juga bertambah.
4. Jumlah penduduk lansia yang memiliki jaminan kesehatan dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan.
5. Setengah dari lansia masih bekerja. Meningkatnya lansia bekerja secara umum mencerminkan peningkatan partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi, perpanjangan usia produktif, serta besarnya potensi pemberdayaan lansia dalam bonus demografi.
6. Lansia diharapkan dapat mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Namun, pekerjaan yang sepantasnya dilakukan oleh lansia adalah pekerjaan yang sesuai. Tantangan penuaan penduduk di masa depan adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi lansia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, & Moertiningsih, S. (2005). Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Borjas, T George. 1980. The relationship between wages and weekly hours of work: the role of division bias. *The Journal of Human Resources*, Vol. 15, (No. 3) : 1-13.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2016. Jakarta:BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020. Jakarta:BPS.
- International Labour Office ILO. 2011. Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. Geneva: ILO.
- Iliffe, S. et al. 1992. Are Elderly People Living Alone an at Risk Group. *British Medical Journal*, Vol. 305, No. 6860, 1001-1004.
- Kemkes RI. 2016. Situasi Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia. Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. ISSN 2442-7659.
- LIPI. (2020, 30 April). Lansia dalam Pandemi Covid. Diakses dari <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/847-lansia-dalam-situasi-pandemi-covid-19>.
- LIPI. (2020, 5 Agustus). Penuaan Penduduk, dan Resiliensi Lansia Dikala Pandemi Covid 19. Diakses dari <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/1028-penuaan-penduduk-dan-resiliensi-lansia-di-kalapandemi-covid-19>
- Perlmutter, M. & Hall, E.(1985). Adult development and aging. New York: Jhon Willey & Sons
- Population and Human Resources Journal. Departemen of Geography University of Adelaide
- WHO. (1977). Prevention of Mental Disorders in the Elderly. World Health Organization. Copenhagen
- WHO. (2012). Good Health Adds Life to Years. Global brief for World Health Day 2012. WHO reference number: WHO/DCO/WHD/2012 2.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Wirakartakusumah, MD dan Evi H. Anwar. 1994. Aging in Indonesia: Demographic Characteristic.



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1131 Palembang 30129 Telp 0711-351665  
Homepage : <http://www.sumsel.bps.go.id> E-mail : [bps1600@bps.go.id](mailto:bps1600@bps.go.id)